



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

NOMOR : SK.195 / BPSDMP-2017

TENTANG

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 2015-2019 TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan tindak lanjut Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 maka dipandang perlu untuk melakukan Penetapan Reviu Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015-2019, mengingat adanya perubahan kebijakan, strategi dan lingkungan strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Renstra BPSDMP) 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian perhubungan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 873 tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019;

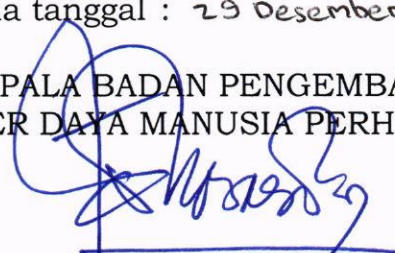
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019.
- PERTAMA** : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
- KETIGA : Reviu Rencana Strategis (Renstra) dapat ditinjau kembali dalam kondisi tertentu sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- KEEMPAT : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap implementasi Reviu Rencana Strategis (Renstra) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan sesuai bidangnya masing-masing.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku , Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor, SK.979/BPSDMP-2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

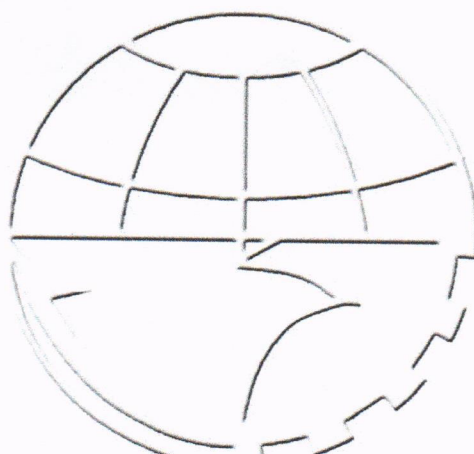
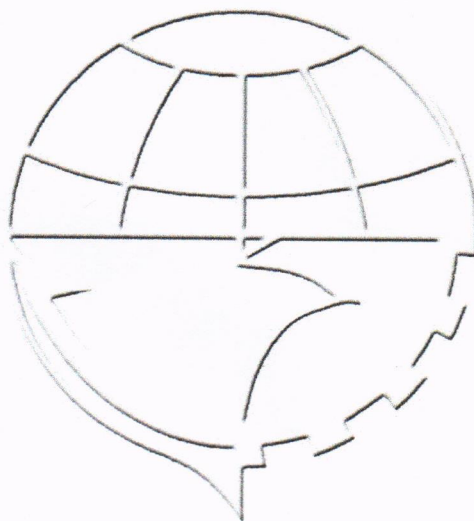
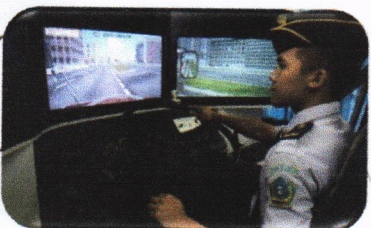
Ditetapkan : JAKARTA
pada tanggal : 29 Desember 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,


DJOKO SASONO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.



REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

TAHUN 2015- 2019

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

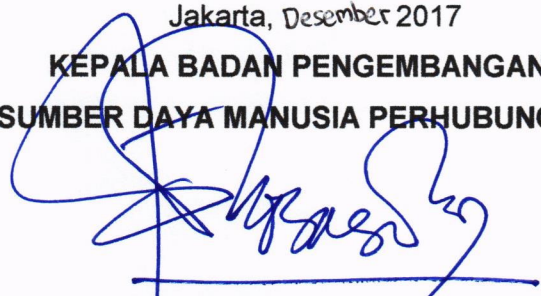
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, penyusunan Reviu Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 2015-2019 ini dapat diselesaikan.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015-2019 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019. Reviu Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan sarana evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015 - 2019 untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja BPSDMP pada kurun waktu 2015 - 2017 dalam mengemban tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan sesuai amanat Undang-Undang di bidang Transportasi dan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 serta mewujudkan visi Kementerian Perhubungan yaitu konektifitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah .

Semoga Reviu Renstra Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2015-2019 ini dapat dijadikan panduan, acuan dan pedoman pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDMP Perhubungan untuk pengembangan SDM transportasi secara bertahap sehingga dapat mewujudkan Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Jakarta, Desember 2017

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**



Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc.(Eng).,

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630925 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perubahan Lingkungan Strategis.....	2
C. Ruang Lingkup	4
D. Permasalahan	5
BAB II IMPLEMENTASI VISI DAN MISI PRESIDEN MELALUI VISI DAN MISI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	6
A. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.....	6
B. Visi Dan Misi Presiden.....	11
C. Visi Dan Misi Kementerian Perhubungan	12
1. Visi.....	12
2. Misi:	13
D. Tujuan	14
E. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019	14
F. Visi Dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015-2019	15
G. Tujuan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ...	17
H. Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.	17
I. Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.....	18
J. Kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	20

K. Strategi Badan Pengembangan Sdm Perhubungan	21
L. Program Dan Kegiatan BPSDM Perhubungan	24
BAB III EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2015 – 2017 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	26
A. Capaian Kinerja BPSDMP	26
1. Sasaran Strategis 1.....	27
2. Sasaran Strategis 2.....	28
3. Sasaran Strategis 3.....	29
4. Sasaran Strategis 4.....	30
5. Sasaran Strategis 5.....	32
6. Sasaran Strategis 6.....	33
7. Sasaran Strategis 7.....	33
8. Sasaran Strategis 8.....	35
9. Sasaran Strategis 9.....	38
10. Sasaran Strategis 10.....	39
11. Sasaran Strategis 11.....	40
B. Permasalahan Dan Langkah Lanjut.....	42
1. Permasalahan.....	42
2. Langkah Lanjut	48
C. Realisasi Pelaksanaan Kebijakan.....	48
BAB IV PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019	51
A. Landasan Hukum	51
B. Target Pembangunan Infrastruktur Transportasi Tahun 2015 – 2019.....	53
1. Pembangunan Transportasi Darat	53
2. Pembangunan Transportasi Perkeretaapian	53
3. Pembangunan Transportasi Laut	54
4. Pembangunan Transportasi Udara.....	54

C. Kebutuhan SDM di Bidang Transportasi.....	54
1. Estimasi Kebutuhan SDM di Bidang Transportasi untuk Penambahan Infrastruktur 2015-2019.....	54
2. Transportasi Darat dan Perkeretaapian.....	56
3. Pengembangan Sdm Perhubungan Laut	88
4. Pengembangan Sdm Perhubungan Udara.....	123
5. Pengembangan Sdm Aparatur Perhubungan.....	139
6. Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya.....	147
7. Sistem Informasi Manajemen Sdm Di Bidang Transportasi.....	156
D. Kegiatan Strategis Badan Pengembangan Sdm Perhubungan 2015-2019.....	157
BAB V PENUTUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kebutuhan SDM Perhubungan Bidang LLAJ sampai dengan tahun 2019	57
Tabel 4. 2 Asumsi Jumlah SDM LLAJ yang Membutuhkan Diklat s.d Tahun 2019.....	57
Tabel 4. 3 Kebutuhan SDM Perhubungan Darat Bidang LLASDP s.d Tahun 2019	58
Tabel 4. 4 Jumlah SDM LLASDP yang Membutuhkan Diklat s.d Tahun 2019.....	58
Tabel 4. 5 Target Lulusan Diklat Pembentukan SDM Perhubungan Darat	60
Tabel 4. 6 Rencana Pendirian Organisasi dan Kelembagaan UPT Diklat Baru	61
Tabel 4. 7 Persiapan Pengembangan Kelembagaan dan Program Studi STTD.....	63
Tabel 4. 8 Pengembangan Program Studi BPPTD Bali.....	65
Tabel 4. 9 Kurikulum dan Silabi Sekolah Tinggi Transportasi Darat	65
Tabel 4. 10 Kurikulum dan Silabi Balai Diklat Transportasi Darat Bali	66
Tabel 4. 11 Kurikulum dan Silabi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	66
Tabel 4. 12 Kebutuhan Kurikulum, Silabi dan Bahan Ajar Diklat Teknis Di Sekolah Tinggi Transportasi Darat	67
Tabel 4. 13 Kebutuhan Kurikulum, Silabi dan Bahan Ajar Diklat Teknis Di BPPTD Bali ...	67
Tabel 4. 14 Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana STTD Bekasi	71
Tabel 4. 15 Rencana Pengembangan Sarana Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	73
Tabel 4. 16 Rencana Pengembangan Sarana Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	73
Tabel 4. 17 Rencana Pengembangan Sarana BPPTD Palembang.....	74
Tabel 4. 18 Rencana Pengembangan Prasarana BPPTD Palembang	75
Tabel 4. 19 Daftar Prasarana BPPTD Bali	76
Tabel 4. 20 Daftar Sarana BPPTD Bali	77
Tabel 4. 21 Rencana Pengembangan Prasarana Diklat BPPTD Bali	78
Tabel 4. 22 Tabel Analisa Efektivitas dan Efisiensi Kebutuhan Ruang Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Kampus II BPPTD Tabanan, Bali (Rencana Pengembangan).....	78
Tabel 4. 23 Rencana Pengembangan Sarana Akademi Perkeretaapian.....	79
Tabel 4. 24 Rencana Pengembangan Prasarana Akademi Perkeretaapian.....	82
Tabel 4. 25 Rencana Pengembangan Sarana BBPTD Mempawah	83
Tabel 4. 26 Rencana Pengembangan Prasarana BPPTD Mempawah	83
Tabel 4. 27 Kondisi Eksisting Tenaga Pendidik di STTD Tahun 2017	84

Tabel 4. 28 Kondisi Eksisting Tenaga Kependidikan di STTD 2017	85
Tabel 4. 29 Rencana Pengembangan Tenaga Pendidik Melalui Alih Fungsi.....	85
Tabel 4. 30 Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Tenaga Pendidika di BPPTD Palembang.....	86
Tabel 4. 31 Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Tenaga Kependidikan di BPPTD Palembang	87
Tabel 4. 32 Kebutuhan Tenaga Pendidik di BPPTD Bali.....	87
Tabel 4. 33 Kebutuhan Tenaga Kependidikan di BPPTD Bali	87
Tabel 4. 34 Jumlah Eksisting Tenaga Pendidik dan Kependidikan di PKTJ Tegal	87
Tabel 4. 35 Rencana Pengembangan Tenaga Pendidik di API Madiun	88
Tabel 4. 36 Rencana Pengembangan Tenaga Kependidikan di API Madiun	88
Tabel 4. 37 Target Lulusan Diklat Teknis Fungsional Pendidik	94
Tabel 4. 38 Target Lulusan Diklat Teknis Fungsional Tenaga Kependidikan	94
Tabel 4. 39 Target Lulusan Diklat Teknis Fungsional.....	95
Tabel 4. 40 Target Lulusan Diklat Keahlian STIP	96
Tabel 4. 41 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran STIP.....	96
Tabel 4. 42 Target Lulusan Diklat Penyegaran STIP	96
Tabel 4. 43 Target Lulusan Diklat Teknis STIP	97
Tabel 4. 44 Target Lulusan Diklat Peningkatan BP3IP	98
Tabel 4. 45 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP3IP	99
Tabel 4. 46 Target Lulusan Diklat Teknis BP3IP	99
Tabel 4. 47 Target Lulusan Diklat Keahlian PIP Semarang.....	100
Tabel 4. 48 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran PIP Semarang.....	101
Tabel 4. 49 Target Lulusan Diklat Teknis PIP Semarang	101
Tabel 4. 50 Target Lulusan Diklat Keahlian PIP Makassar.....	103
Tabel 4. 51 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran PIP Makassar.....	103
Tabel 4. 52 Target Lulusan Diklat Teknis PIP Makassar	104
Tabel 4. 53 Target Lulusan Diklat Keahlian PP Surabaya.....	106
Tabel 4. 54 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran PP Surabaya.....	107
Tabel 4. 55 Target Lulusan Diklat Teknis PP Surabaya	107
Tabel 4. 56 Target Lulusan Diklat Keahlian BP2IP Tangerang.....	108
Tabel 4. 57 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP2IP Tangerang.....	109
Tabel 4. 58 Target Lulusan Diklat Teknis BP2IP Tangerang	109
Tabel 4. 59 Target Lulusan Diklat Keahlian BP2IP Barombong	111

Tabel 4. 60 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP2IP Barombong	111
Tabel 4. 61 Target Lulusan Diklat Teknis BP2IP Barombong	112
Tabel 4. 62 Target Lulusan Diklat Keahlian BP2IP Sorong	113
Tabel 4. 63 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP2IP Sorong	113
Tabel 4. 64 Target Lulusan Diklat Teknis BP2IP Sorong.....	113
Tabel 4. 65 Target Lulusan Diklat Keahlian BP2IP MAB	114
Tabel 4. 66 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP2IP MAB	115
Tabel 4. 67 Target Lulusan Diklat Teknis BP2IP MAB	115
Tabel 4. 68 Target Lulusan Diklat Fungsional BPPTL	116
Tabel 4. 69 Target Lulusan Diklat Teknis BPPTL	117
Tabel 4. 70 Peraturan Tentang Kurikulum dan Pelaksanaan Diklat.....	119
Tabel 4. 71 Silabus Diklat Pelayaran	120
Tabel 4. 72 Bahan Ajar Diklat Pelayaran.....	121
Tabel 4. 73 Sarana Prasarana Diklat Pelayaran	122
Tabel 4. 74 Target Lulusan Diklat PPSPDM Phb. Udara	126
Tabel 4. 75 Target Lulusan Diklat STPI.....	127
Tabel 4. 76 Target Lulusan Diklat ATKP Medan	128
Tabel 4. 77 Target Lulusan Diklat ATKP Surabaya	130
Tabel 4. 78 Target Lulusan Diklat ATKP Makassar	130
Tabel 4. 79 Target Lulusan Diklat BPPP Palembang	131
Tabel 4. 80 Target Lulusan Diklat BPPP Jayapura	134
Tabel 4. 81 Target Lulusan Diklat BP3 Banyuwangi.....	135
Tabel 4. 82 Rencana Pengembangan Kelembagaan	136
Tabel 4. 83 Kebutuhan Kurikulum Diklat Penerbangan	137
Tabel 4. 84 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	138
Tabel 4. 85 Pengembangan SDM Pendidik dan Kependidikan	138
Tabel 4. 86 Kebutuhan SDM Aparatur Perhubungan	140
Tabel 4. 87 Target Lulusan Diklat Aparatur Perhubungan.....	140
Tabel 4. 88 Pembangunan dan Pengembangan UPT Diklat Aparatur Perhubungan	145
Tabel 4. 89 Kebutuhan SDM Aparatur Perhubungan untuk Tenaga Pengejar	146
Tabel 4. 90 Kebutuhan Sdm Aparatur Perhubungan Untuk Tenaga Administrasi	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pendekatan Kebutuhan SDM Perhubungan Darat	57
Gambar 4. 2 Kebutuhan SDM Perkeretaapian	59
Gambar 4. 3 Rencana Pengembangan dan Pembangunan Kampus Baru BPSDMP Tahun 2015 – 2019	160

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah di ubah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Dalam pelaksanaannya, Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Dalam konteks penganggaran, RKA K/L ditransformasikan ke dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Kesenambungan antar dokumen harus selalu dijaga sehingga dapat memberikan rujukan dalam penetapan/perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan. Dalam rangkaian kegiatan perencanaan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 783 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 maka perlu dilakukan evaluasi/*reviu* terhadap Renstra BPSDM Perhubungan sebagai alat pengendalian atau kontrol dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan selama jangka waktu 2015 - 2019.

Dalam rangka ikut meningkatkan kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui pengembangan SDM sektor perhubungan mempunyai tugas utama melaksanakan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang didukung suatu sistem informasi manajemen SDM guna mempersiapkan dan

meningkatkan SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional perhubungan.

Pada tahun 2017 ini dilakukan Reviu Renstra tahun 2015-2017 sebagai *Midterm Reviu* Renstra tahun 2015–2019 guna mengevaluasi terhadap hasil pencapaian target Rencana Strategis dan reposisi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra tahun 2015–2019, khususnya untuk tahun 2017 (*Rolling plan*) untuk selanjutnya dilakukan penajaman kembali atas target sekaligus menyempurnakan materi/muatan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

B. Perubahan Lingkungan Strategis

Dalam Kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dalam Phase III RPJMN 2015 – 2019, perjalanan Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah mengalami berbagai perkembangan kebijakan yang dipengaruhi berbagai perubahan lingkungan strategis, dimana hal ini telah mendorong adanya kebutuhan untuk melakukan penajaman/ penyempurnaan maupun evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang guna mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

1. Hasil capaian Badan Pengembangan SDM Perhubungan periode tahun 2015-2017 sebagai bagian RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2015-2019 merupakan gambaran kinerja yang telah dicapai dan telah dievaluasi setiap tahun dan dilakukan penyesuaian yang berkelanjutan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap BPSDMP pada tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga untuk meningkatkan penilaian kinerja tersebut dibutuhkan beberapa perbaikan pada Rencana Strategis BPSDMP dengan melakukan Reviu Renstra BPSDMP 2015-2019 serta Reviu IKU/IKK BPSDMP pada tahun 2017.

3. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dari tahun ke tahun selalu berkembang dengan kompleksitas yang semakin meningkat, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan usaha untuk mentransformasikan tantangan (*Threats*) menjadi peluang (*Opportunities*).
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Badan pengembangan SDM Perhubungan sebagai salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, dengan adanya percepatan pelaksanaan proses reformasi birokrasi diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah - kaidah *good governance*.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dilaksanakan secara bertahap dalam rangka tercapainya tujuan BPSDM Perhubungan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga program ini harus menjadi *backbone* pengendalian intern yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
6. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dijelaskan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Sehubungan dengan hal tersebut, BPSDM Perhubungan yang semula hanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan menyesuaikan kegiatannya menjadi pendidikan dan pelatihan yang didukung dengan adanya sistem informasi SDM di bidang transportasi yang memadai.
7. Anggaran BPSDMP semula masuk dalam dua fungsi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi non pendidikan. Fungsi pendidikan meliputi anggaran Unit Kerja yang melaksanakan pendidikan pembentukan, sedangkan fungsi non pendidikan meliputi anggaran unit kerja yang tidak melaksanakan pendidikan pembentukan. Namun, mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan menindaklanjuti hasil Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Implementasi atas SAKIP Eselon I Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2016 bertempat Ruang Rapat Sesltjen Kemenhub serta dalam rangka persiapan penyusunan reviu/ tinjau ulang Renstra Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Anggaran BPSDMP yang semula masuk dalam dua fungsi berubah menjadi hanya satu fungsi, yaitu Fungsi pendidikan dan satu Program yaitu “Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan” serta dengan 8 (delapan) Kegiatan yaitu:

- a) Pendidikan Kedinasan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
 - b) Pendidikan Kedinasan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
 - c) Pendidikan Kedinasan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
 - d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
 - e) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan;
 - f) Pendidikan Tinggi SDM Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
 - g) Pendidikan Tinggi SDM Perhubungan Laut;
 - h) Pendidikan Tinggi SDM Perhubungan Udara.
8. Dalam rangka bentuk perwujudan dari amanat “nawacita” ketiga yaitu *Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan* dan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tertentu sebagai afirmasi pembangunan asimetris Badan Pengembangan SDM Perhubungan menyelenggarakan diklat gratis untuk masyarakat kurang mampu dan daerah tertinggal melalui program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis kompetensi sektor transportasi guna mendorong Percepatan Pembangunan Sektor Transportasi dan menekan angka Pengangguran Usia Produktif guna meningkatkan daya saing Tenaga Kerja Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan tersebut maka ruang lingkup penyusunan Evaluasi Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2015-2019 meliputi:

1. Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan
2. Tujuan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
3. Kebijakan dan strategi

4. Sasaran strategis
5. Indikator Kinerja Utama
6. Program dan kegiatan strategis meliputi :
 - a. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembangan SDM Perhubungan;
 - b. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Perhubungan bagi lembaga pendidikan swasta;
 - c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana diklat;
 - d. Pengembangan kursil/modul/bahan ajar pembelajaran dan bahan penyuluhan;
 - e. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar (dosen/instruktur/widyaiswara), SDM Aparatur Perhubungan dan penyuluh perhubungan.

D. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Badan Pengembangan SDM Perhubungan antara lain:

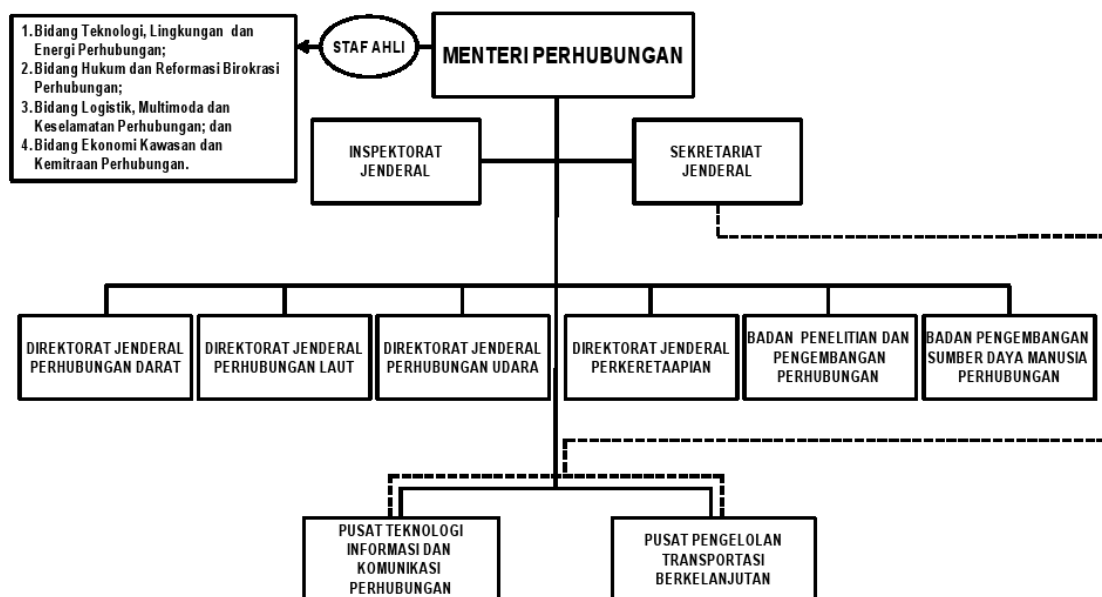
1. Kuantitas dan kualitas tenaga pengajar (dosen, instruktur, widyaiswara) dan tenaga penyuluh belum dapat memenuhi kebutuhan;
2. Kapasitas Sarana dan Prasarana Diklat terbatas dan sebagian sudah *out of date*;
3. Kurikulum silabi, bahan ajar dan metode diklat belum sepenuhnya sesuai dengan pemenuhan kompetensi (*knowledge, skill, and attitude*);
4. Belum sepenuhnya menerapkan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan dan pelatihan SDM perhubungan;
5. Penyebaran UPT Diklat transportasi belum sepenuhnya berasaskan pada pemerataan di seluruh wilayah NKRI.
6. Lulusan pendidikan dan pelatihan UPT di lingkungan BPSDMP belum dapat memenuhi kebutuhan, di lain pihak lulusan dan kualitas lembaga diklat transportasi masih terbatas;
7. Masih terdapat ketertinggalan dalam kompetensi SDM di bidang transportasi baik di pusat maupun daerah untuk aparatur dan operator.

BAB II

IMPLEMENTASI VISI DAN MISI PRESIDEN MELALUI VISI DAN MISI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dalam Bab X pasal 780 menyatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.



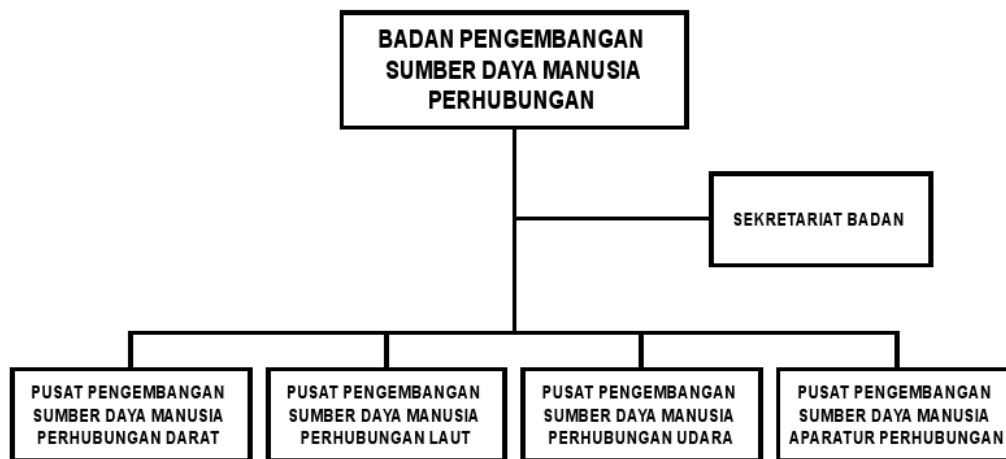
Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

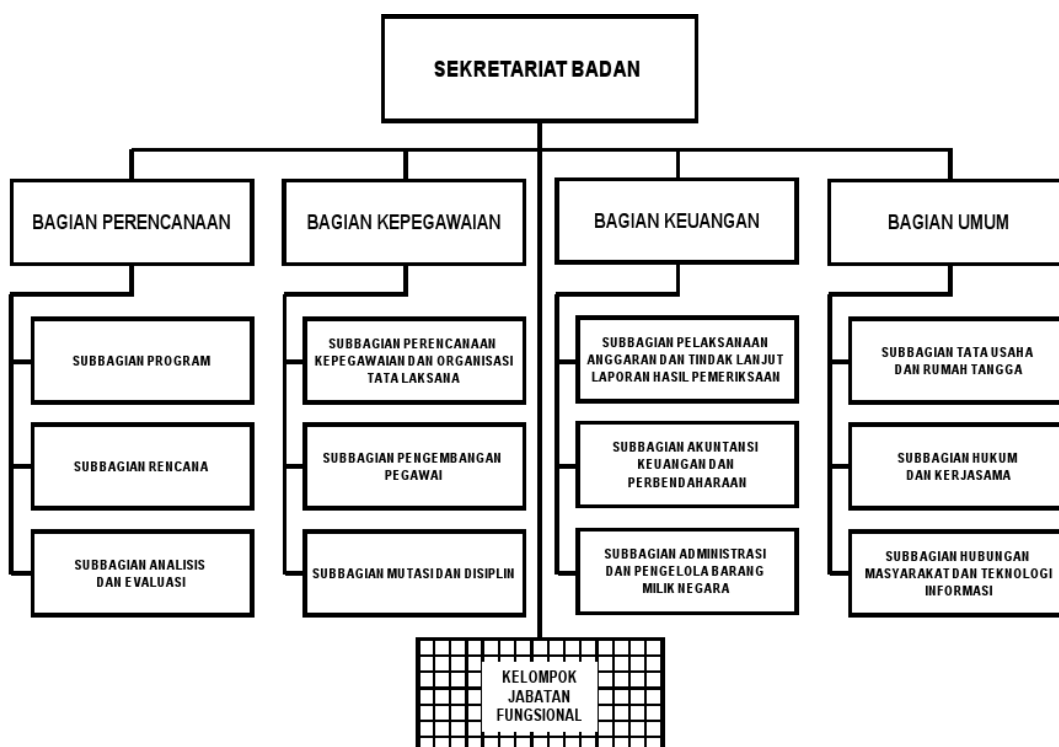
1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
2. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; dan
4. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas:

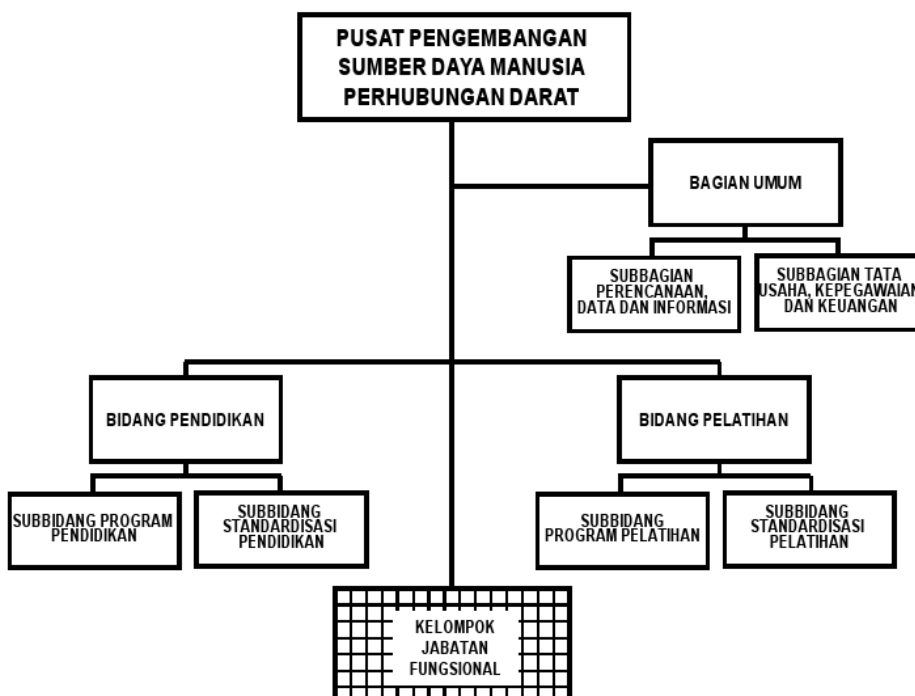
1. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.



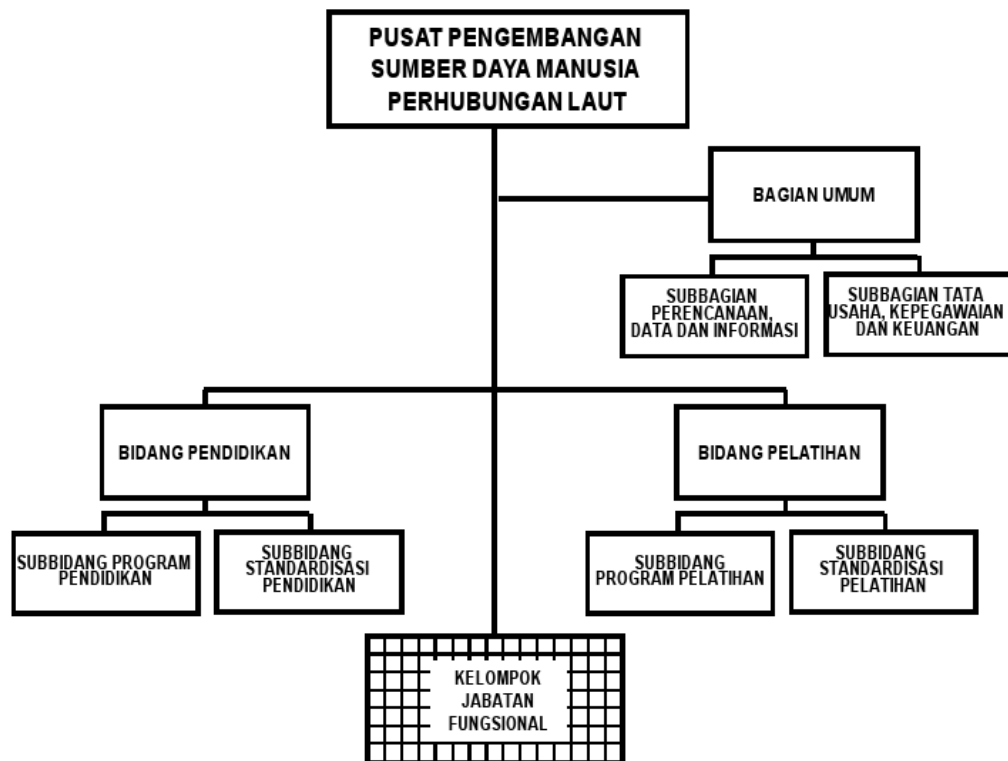
Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan



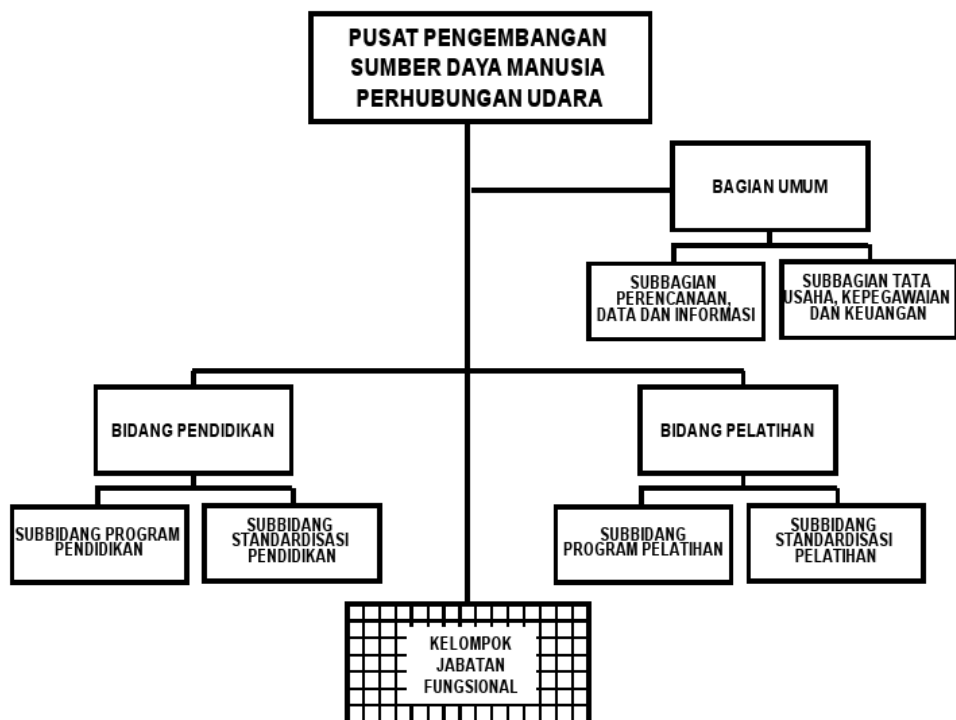
Gambar 2. 3 Susunan Organisasi Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan



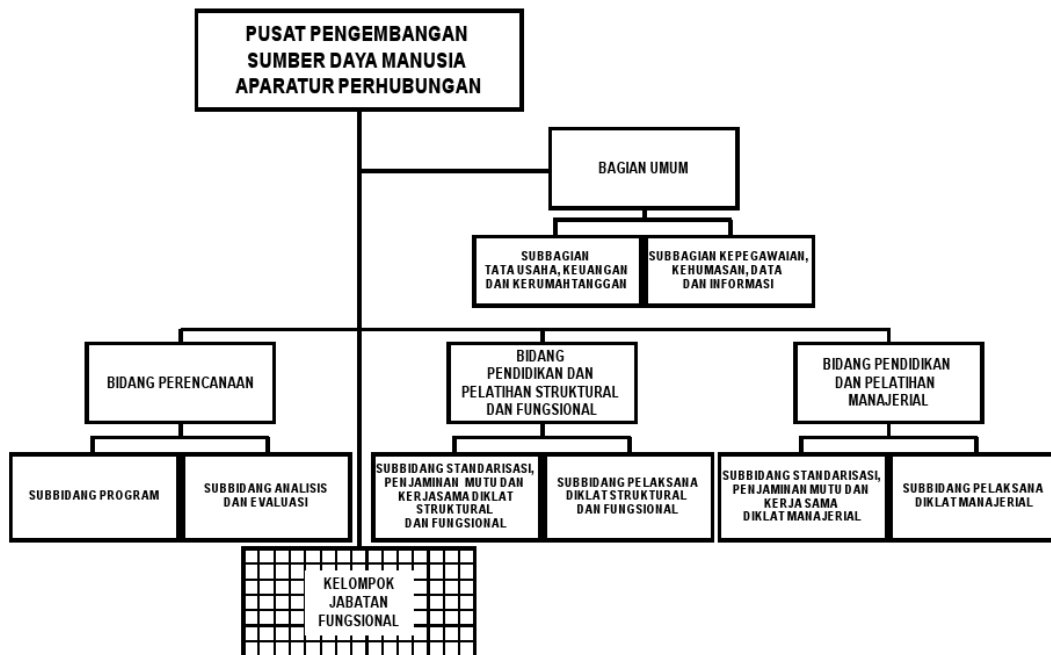
Gambar 2. 4 Susunan Organisasi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat



Gambar 2. 5 Susunan Organisasi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut



Gambar 2. 6 Susunan Organisasi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara



Gambar 2. 7 Susunan Organisasi Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan. Adapun pembinaannya, untuk aspek teknis dilimpahkan kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sesuai matranya dan untuk administratif dilimpahkan kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah:

1. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD);
2. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI);
3. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
4. Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Sunter Jakarta;
5. Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan;
6. Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar;
7. Politeknik Penerbangan Surabaya;
8. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;
10. Politeknik Pelayaran Surabaya;

11. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
12. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Bali;
13. Balai Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Palembang;
14. Balai Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah;
15. Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun;
16. Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong;
17. Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong
18. Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Mauk-Tangerang;
19. Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati-Aceh Besar;
20. Balai Diklat Pelayaran (BP2P) Minahasa Selatan;
21. Balai Diklat Pelayaran (BP2P) Padang Pariaman;
22. Balai Diklat Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta;
23. Balai Diklat Penerbangan (BP3) Palembang;
24. Balai Diklat Penerbangan (BP3) Jayapura;
25. Balai Diklat Penerbangan (BP3) Curug;
26. Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi – Bandung;
27. Balai Diklat Penerbang (BP3) Banyuwangi Jawa Timur.

B. Visi Dan Misi Presiden

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

C. Visi Dan Misi Kementerian Perhubungan

1. Visi

Perwujudan Visi Presiden (Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong) dalam sektor transportasi yaitu dengan **“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian

Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

- **Konektivitas Nasional** adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;
- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

2. Misi:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi
5. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;

7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

D. Tujuan

Untuk Menjabarkan visi Kementerian Perhubungan, maka tujuan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan;
3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

E. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran strategis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 783 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		SATUAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1	Rasio Konektivitas antar wilayah	Rasio
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional	Rasio
		IK3	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi	Rasio
SS3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IK4	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	%
		IK5	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%
		IK6	Prosentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi	%
		IK7	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam
		IK8	Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	%
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK9	Persentase Peningkatan kapasitas sarana transportasi	%
		IK10	Persentase Peningkatan kapasitas prasarana transportasi	%
		IK11	<i>Modal Share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK12	Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil	Rasio
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%
SS8	Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	IK15	Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan	%
SS9	Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IK16	Tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan	%
LEARN AND GROWTH				
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat	%
SS11	Terwujudnya <i>Good Governance & Clean Government</i> di Kementerian Perhubungan	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%
		IK19	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat
		IK22	Persentase Keandalan Sistem Informasi	%
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level
		IK24	Persentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%

F. Visi Dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015-2019

Penyusunan Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perubungan, selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta penjabaran dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia serta Visi dan Misi Kementerian Perhubungan, juga menindaklanjuti amanat Undang-Undang di Bidang Transportasi dan Undang-Undang pendukung yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
7. Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

Dalam keempat Undang-Undang di Bidang Transportasi tersebut diatas, mengamanatkan bahwa Pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab,dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional”



Gambar 2. 8 Dasar Hukum Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Visi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Perhubungan adalah:

“Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka telah dirumuskan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dan kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

G. Tujuan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, maka tujuan strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan SDM Transportasi yang prima profesional, beretika dan berdaya saing internasional dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, memberikan nilai tambah
2. Peningkatan kinerja organisasi serta kehandalan sistem informasi manajemen SDM transportasi
3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban dan keselamatan transportasi

H. Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Berdasarkan pemetaan strategi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dapat diperoleh sasaran strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peserta diklat di bidang transportasi yang berpotensi tinggi yang didukung fisik dan jasmani yang prima

2. Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat
3. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi
4. Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan IPTEK
5. Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi yang Dipublikasikan pada jurnal Nasional dan Internasional
6. Terwujudnya Pengabdian Masyarakat yang Mempunyai Manfaat bagi Masyarakat di Sekitar Lembaga Diklat terhadap Total kegiatan Masyarakat yang Dilaksanakan
7. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, *international recognition* serta *Public Private Partnership*
8. Meningkatnya optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP
9. Terwujudnya peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM transportasi yang memenuhi ketentuan nasional dan/atau internasional
10. Terwujudnya sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi tinggi/mutakhir yang memenuhi standar diklat Transportasi
11. Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang kompeten

I. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Dari Sasaran Strategis tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan penajaman Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tabel. 2.1.

Ditetapkan bahwa IKU BPSDMP yang telah tertuang dalam Reviu Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian perhubungan sebagaimana berikut :

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	Prosentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi

Adapun SS dan IKU lainnya merupakan indikator kinerja internal BPSDM Perhubungan untuk mengetahui *cause-and-effect relationship* antar SS dan IKU dalam rangka meningkatkan kualitas aplikasi manajemen kinerja di lingkungan BPSDM Perhubungan.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan SDM Perhubungan

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Satuan
a	Terwujudnya peserta diklat SDM transportasi berpotensi tinggi yang didukung fisik dan rohani yang prima	1	Jumlah peserta Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar penyelenggaraan diklat BPSDM Perhubungan.	Orang
b	Terwujudnya Lulusan Diklat SDM Transportasi Yang Bersertifikat	2	Jumlah lulusan Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun sesuai standar kompetensi	Orang
c	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	3	Prosentase Penyerapan Lulusan Diklat SDM Transportasi	%
d	Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan IPTEK	4	Jumlah kurikulum, silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen
		5	Jumlah Modul/Bahan Ajar Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	
e	Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi yang Dipublikasikan pada jurnal Nasional dan Internasional	6	Jumlah penelitian oleh tenaga pengajar yang Dipublikasikan pada jurnal Nasional dan Internasional	Dokumen
f	Terwujudnya Pengabdian Masyarakat yang Mempunyai Manfaat bagi Masyarakat di Sekitar Lembaga Diklat terhadap Total kegiatan Masyarakat yang Dilaksanakan	7	Jumlah kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga Diklat SDM transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan	Kegiatan

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		Satuan
g	Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>Public Private Partnership</i>	8	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>Public Private Partnership</i>	Dokumen
h	Meningkatnya optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP	9	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan	Nilai
		10	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan	%
		11	Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP	Level
i	Terwujudnya peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM transportasi yang memenuhi ketentuan nasional dan/atau internasional	12	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang dihasilkan	draft peraturan
j	Tersedianya sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi tinggi/mutakhir yang memenuhi standar diklat SDM Transportasi	13	Jumlah sarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	unit
		14	Jumlah prasarana baru Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang dibangun.	m2
k	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat SDM Transportasi Yang kompeten.	15	Jumlah Pendidik Diklat SDM Transportasi bersertifikat yang memiliki kompetensi dibidangnya.	orang
		16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang memiliki kompetensi dibidangnya.	orang

J. Kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Kebijakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

1. Pemerataan kesempatan, keikutsertaan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang transportasi;
2. Mendorong peran swasta untuk ikut meningkatkan kontribusi dalam pengembangan SDM transportasi;
3. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta kinerja lembaga pendidikan dan pelatihan melalui penyempurnaan kelembagaan dan pembentukan PK BLU

4. Penyediaan pendidik bersertifikat dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan
5. Pengembangan kurikulum silabi sesuai dengan pengembangan IPTEK
6. Pemanfaatan sistem informasi manajemen SDM transportasi dalam mendukung pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
7. Pembiayaan kreatif melalui kerjasama pemerintah dan swasta dan inovasi pembiayaan lainnya

K. Strategi Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Dalam rangka visi dan misi, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disusun strategi Badan Pengembangan SDM Perhubungan dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyusun *Man Power Planning* SDM Transportasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan;
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) SDM Transportasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan;
Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Perhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan *Training Needs Analysis*
3. Mengembangkan Kualitas dan kapasitas diklat SDM Transportasi;
Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan,

modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, strategi lain perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi di bidang transportasi yaitu :

- a) Perbaikan Kurikulum pada sekolah-sekolah dibawah BPSDMP dengan prosentase pendidikan : 70% praktek dan 30% teori.
- b) Perbaikan kualitas dosen (pemagangan dan beasiswa S3/S3);
- c) Mengubah metode pendidikan dengan mengedepankan system pendidikan e-learning, pemanfaatan teknologi informasi, serta membentuk LSP-1;
- d) Peningkatan kerjasama pendidikan antara BPSDMP dengan Universitas dan lembaga lain;
- e) Menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat.

4. Menata Regulasi penyelenggaraan diklat SDM Transportasi;

Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi.

5. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan;

Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.

6. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan *database* lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan *stakeholder*, baik dalam skala Nasional maupun Internasional

perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

7. Pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan SDM transportasi.

Dalam Penyelenggaraan pengembangan SDM transportasi masih terdapat kendala keterbatasan baik secara kualitas dan kuantitas SDM juga dari segi finansial, karena itu diperlukan solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organisation* (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu mengingat tidak semua aktivitas pengembangan SDM mampu dikerjakan sendiri terutama dalam hal ketersediaan kuantitas, *skill* SDM dan finansial.

L. Program Dan Kegiatan BPSDM Perhubungan

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan PM. Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dijelaskan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Sehubungan dengan hal tersebut, BPSDM Perhubungan yang semula hanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan menyesuaikan kegiatannya menjadi pendidikan, pelatihan yang didukung dengan adanya sistem informasi SDM di bidang transportasi yang memadai.

BPSDMP semula masuk dalam dua fungsi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi non kependidikan. Fungsi pendidikan meliputi anggaran Unit Kerja yang melaksanakan pendidikan pembentukan, sedangkan fungsi ekonomi meliputi anggaran unit kerja yang tidak melaksanakan pendidikan pembentukan.

Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah “Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan”, yang mempunyai 8 (delapan) Kegiatan yaitu:

1. Fungsi Non Kependidikan

a) Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;

- b) Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
 - c) Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
 - d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
 - e) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan;
2. Fungsi Pendidikan
- a) Pendidikan Perhubungan Darat;
 - b) Pendidikan Perhubungan Laut;
 - c) Pendidikan Perhubungan Udara.

Namun, mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan menindaklanjuti hasil Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi atas SAKIP Eselon I Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2016 bertempat Ruang Rapat Sesltjen Kemenhub serta dalam rangka persiapan penyusunan reviu/ tinjau ulang Renstra Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Anggaran BPSDMP yang semula masuk dalam dua fungsi berubah menjadi hanya satu fungsi, yaitu Fungsi pendidikan dan satu Program yaitu “Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan” serta dengan 8 (delapan) Kegiatan yaitu:

- a) Pendidikan Kedinasan SDM Perhubungan Darat;
- b) Pendidikan Kedinasan SDM Perhubungan Laut;
- c) Pendidikan Kedinasan SDM Perhubungan Udara;
- d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
- e) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan;
- f) Pendidikan Tinggi SDM Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- g) Pendidikan Tinggi SDM Perhubungan Laut;
- h) Pendidikan Tinggi SDM Perhubungan Udara.

BAB III

EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2015 – 2017 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

A. Capaian Kinerja BPSDMP

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dijelaskan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPSDM Perhubungan yang semula hanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan menyesuaikan kegiatannya menjadi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang didukung dengan adanya sistem informasi yang memadai.

Agar dapat mencapai sasaran-sasaran dari BPSDM Perhubungan khususnya yang menitikberatkan pada terwujudnya lulusan diklat di bidang transportasi yang mempunyai kompetensi tinggi dan berstandar internasional, professional serta terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan transportasi, BPSDM Perhubungan perlu menyusun target sasaran dalam melaksanakan TUPOKSI Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Mengingat tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga periode RENSTRA tahun 2015-2019, maka dalam BAB ini merupakan Capaian Kinerja dari Target Sasaran Strategis Tahun 2015-2016 dimana capaian tahun 2017 baru dapat diakumulasi sampai dengan trimester 2 (sampai akhir Juli 2017) sehingga belum dapat dicantumkan realisasi akhirnya dan Sasaran Strategis yang dimaksud merupakan Sasaran Strategis yang terdapat pada hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peserta diklat SDM transportasi berpotensi tinggi yang didukung fisik dan rohani yang prima.

Indikator Kinerja Utama (IKU 1) :

Jumlah peserta Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar penyelenggaraan diklat BPSDM Perhubungan.

Tabel 3. 1 Target Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi

No	PROGRAM: Pengembangan SDM Perhubungan	2015		2016		2017		2018	2019
	Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat:	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	DARAT	9.729	6.930	10.951	7.033	8.801	3.916	8.911	9.056
2	LAUT	234.096	433.248	429.856	594.732	255.545	319.498	260.542	265.322
3	UDARA	10.054	10.572	11.508	9.374	10.951	9.567	10.988	11.257
4	APARATUR	13.588	12.437	13.112	11.059	15.020	7.347	15.040	15.040
	JUMLAH	267.467	463.187	465.427	622.198	290.315	340.328*	295.481	300.675

* Lulusan sampai dengan bulan November 2017

Pada Tabel 3.1 dapat diketahui pada tahun 2015 dan 2016 jumlah peserta total peserta diklat SDM Transportasi melebihi target peserta diklat yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2015 – 2019. Jumlah peserta diklat terbesar adalah berasal dari matra Laut disebabkan oleh adanya ketentuan dari *Standards of Training, Certification and Watchkeeping* (STCW) Amandemen Manila 2010 yang mengharuskan seluruh pelaut melaksanakan *updating* sertifikat keterampilan pelaut dengan batas waktu maksimal 1 januari 2017 dan bagi pelaut yang belum melaksanakan *updating* tersebut maka sertifikat keterampilan pelautnya dianggap tidak berlaku. Realisasi jumlah peserta diklat SDM Transportasi tahun 2017 hingga boleh November 2017 adalah sebesar 340.328 peserta diklat dan angka tersebut sudah melebihi target peserta diklat yang ditetapkan pada Renstra 2015 – 2019. Jumlah peserta diklat tersebut turun dibandingkan dengan peserta diklat tahun 2015 dan 2016

dikarenakan batas waktu updating sertifikat pelaut yang disyaratkan oleh STCW yaitu pada tanggal 1 januari 2017.

2. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Lulusan Diklat SDM Transportasi Yang Bersertifikat

Indikator Kinerja Utama (IKU 2) :

Jumlah lulusan Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun sesuai standar kompetensi

Tabel 3. 2 Target dan Capaian Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan

No	PROGRAM: Pengembangan SDM Perhubungan Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat:	2015		2016		2017		2018	2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	DARAT	9.106	5.493	8.662	4.775	8.628	1.730	8.736	8.878
2	LAUT	234.096	423.338	250.544	579.276	250.534	309.942	255.433	260.120
3	UDARA	10.054	8.018	10.334	6.834	10.736	6.690	10.773	11.036
4	APARATUR	13.588	12.052	14.765	10.658	14.725	6.872	14.745	14.745
	JUMLAH	266.844	448.901	284.305	601.543	284.623	325.234*	289.687	294.779

Pencapaian IKU Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat secara keseluruhan telah melebihi target, untuk matra laut meningkat dua kali lipat namun untuk matra darat, udara dan aparatur menurun. Hal ini dikarenakan:

- a. Pencapaian target IKU Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat SDM Darat, Udara dan Aparatur Kemenhub menurun. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan:
 - Adanya *Self Blocking* dan pemotongan anggaran perjalanan dinas oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, sehingga beberapa kegiatan diklat tidak dapat diselenggarakan dikarenakan anggaran perjalanan dinas untuk peserta tidak mencukupi;

- Adanya beberapa jenis diklat yang sama yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Kementerian lainnya sehingga para peserta diklat lebih memilih lokasi terdekat;
 - Adanya beberapa peserta diklat yang tidak mendapatkan ijin/rekomendasi dari pimpinan terkait untuk mengikuti diklat dimaksud dikarenakan adanya pekerjaan di kantor yang lebih mendesak;
 - Adanya beberapa diklat yang tidak terlaksana karena adanya kendala teknis, misalnya Diklat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa tidak dilaksanakan karena sebagian besar calon peserta yang diusulkan ke LKPP tidak memenuhi persyaratan diklat fungsional pengadaan barang/jasa sehingga tidak memenuhi kuota dari jumlah peserta yang direncanakan.
- b. Peningkatan pencapaian target secara signifikan ini terjadi pada SDM Transportasi Laut. Tingginya permintaan diklat dari masyarakat untuk diklat di bidang Transportasi Laut dikarenakan adanya peraturan yang termuat dalam STCW 2010 Manila, bahwa setiap pelaut pemegang sertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 dari tingkat dasar sampai dengan tingkat I, serta Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) harus menyesuaikan sertifikatnya sehingga memperoleh sertifikat yang sesuai dengan konvensi internasional IMO-SCTW 1978 Amandemen 2010, selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2017.

3. Sasaran Strategis 3

Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi

Indikator Kinerja Utama (IKU 3) :

Persentase Penyerapan Lulusan Diklat SDM Transportasi

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi

Kegiatan	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat SDM Transportasi							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	-	-	-	-	80		82.5	85

Persentase penyerapan lulusan diklat adalah indikator kinerja utama Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang baru untuk mengukur jumlah penyerapan lulusan diklat SDM Transportasi yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun berjalan. Persentase penyerapan lulusan perlu dijadikan indikator keberhasilan bagi Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai alat evaluasi

4. Sasaran Strategis 4

Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan IPTEK

Indikator Kinerja Utama (IKU 4) :

Jumlah kurikulum, silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Jumlah Kurikulum dan Silabi

Kegiatan	Jumlah Kurikulum							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Jumlah kurikulum Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	76	83	71	28	72	2	68	70
Jumlah silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	76	81	71	26	72	1	68	70

Pada table 3.4 dapat diketahui bahwa capaian jumlah kurikulum dan silabi yang disusun pada tahun 2015 melebihi target masing-masing 109.21 % dan 106,6 %, capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada renstra 2015 – 2019 dikarenakan pada tahun 2015 Badan Pengembangan SDM Perhubungan melaksanakan perubahan kurikulum diseluruh Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh industri dan meningkatkan *link and match* antara kompetensi yang diberikan di Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan kebutuhan kompetensi di industri. Realisasi capaian jumlah kurikulum dan silabi

yang disusun oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2016 sebesar 28 dan 26 kurikulum dan silabi, capaian tersebut hanya sebesar 39,43% dan 36,62%. Terdapat penurunan jumlah kurikulum dan silabi yang disusun oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan penyesuaian kurikulum dan silabi diawali pada tahun 2015 dan diselesaikan pada tahun dimaksud adapun di tahun 2016 kurikulum dan silabi yang disusun merupakan tindak lanjut dari penyesuaian kurikulum dan silabi yang dimulai pada tahun 2015. Pada tahun 2017 hingga bulan November kurikulum yang disusun hanya sebanyak 2 dokumen dan silabi yang disusun sebanyak 1 dokumen. Hal ini menurun jauh dibandingkan capaian penyusunan kurikulum dan silabi di tahun 2015 dan 2016.

Indikator Kinerja Utama (IKU 5) :

Jumlah Modul/Bahan Ajar Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Jumlah Modul/Bahan Ajar

Kegiatan	Jumlah Silabi							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Jumlah Modul/Bahan Ajar Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi	141	514	160	243	133	75	139	136

Seiring dengan penyesuaian kurikulum dan silabi yang diawali pada tahun 2015 capaian jumlah modul dan bahan ajar diklat yang disusun pada tahun 2015 adalah sebesar 514 jumlah modul dan bahan ajar, capaian tersebut adalah sebesar 364,54 persen atau lebih dari 3 (tiga) kali lipat target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 141 modul/bahan ajar. Pada tahun 2016 capaian penyusunan jumlah modul/bahan ajar adalah sebanyak 243 modul/bahan ajar, angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dalam renstra 2015 -2019 pada tahun 2016 yaitu sebanyak 160 modul/bahan ajar. Pada tahun 2017 hingga bulan November 2017 capaian penyusunan modul/bahan ajar adalah sebanyak 75 modul/bahan ajar atau 56,4 % dari target jumlah modul/bahan yang ajar yang disusun ditahun 2017 yaitu sebanyak 133 dokumen.

5. Sasaran Strategis 5

Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi yang Dipublikasikan pada jurnal Nasional dan Internasional

Indikator Kinerja Utama (IKU 6)

Jumlah penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal Nasional dan Internasional

Tabel 3. 6 Target dan Realisasi Jumlah Penelitian Oleh Tenaga Pengajar yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional dan Internasional

Kegiatan	Jumlah Penelitian							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Jumlah penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal Nasional dan Internasional	-	-	-	-	51		53	55

Badan Pengembangan SDM Perhubungan memiliki beberapa unit pelaksana teknis yang berstatus perguruan tinggi yang terdiri dari Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan tridarma perguruan tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pencapaian tridarma perguruan tinggi merupakan kewajiban seluruh unsur yang ada didalam perguruan tinggi tersebut antara lain tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, oleh sebab itu dalam rangka turut serta dalam mencapai tridarma perguruan tinggi dan juga meningkatkan kualitas tenaga pendidik Badan Pengembangan SDM Perhubungan juga mendorong tenaga pendidik untuk melakukan penelitian baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Adapun target jumlah penelitian oleh tenaga pengajar pada tahun 2017 adalah sebanyak 51 penelitian.

6. Sasaran Strategis 6

Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Oleh Lembaga Diklat

Indikator Kinerja Utama (IKU 7)

Jumlah kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga Diklat SDM transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Jumlah Jumlah kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Jumlah kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga Diklat SDM transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan	-	-	-	-	40		45	50

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh civitas perguruan tinggi yang ada di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai salah satu pencapaian dari Tridarma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian masyarakat diarahkan pada kegiatan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, hal ini dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas baik dosen maupun taruna dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nyata yang diterapkan di lingkungan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Jumlah target kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2017 adalah sebanyak 40 kegiatan.

7. Sasaran Strategis 7

Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, *international recognition* serta *Public Private Partnership*.

Indikator Kinerja Utama (IKU 8)

Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, *international recognition* serta *Public Private Partnership*

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta, nasional atau internasional

Kegiatan	Jumlah Dokumen							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>Public Private Partnership</i>	76	105	83	228	90	198	94	100

Pada tabel 3.8 dapat diketahui bahwa capaian Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau internasional yang disusun pada tahun 2015 mencapai 138.16 % dari target yang telah ditetapkan dalam renstra 2015 – 2019 sebesar 76 dokumen pada akhir tahun dapat tersusun sebanyak 105 dokumen kerjasama. Pada tahun 2016 jumlah dokumen kerjasama yang disusun sebanyak 228 dokumen kerjasama dan jumlah tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada dokumen renstra 2015 - 2019 yaitu sebanyak 83 dokumen kerjasama dan pada tahun 2017. Badan Pengembangan SDM Perhubungan dalam mendukung nawa cita Presiden Republik Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan pemerintah/swasta baik nasional dan internasional dalam rangka mencetak SDM transportasi yang berkompeten dalam jumlah dan kompetensi yang diperlukan. Badan Pengembangan SDM Perhubungan melaksanakan kerjasama dibidang pendidikan dan juga kerjasama dalam rangka penyerapan lulusan pendidikan SDM transportasi. Selain itu Kementerian Perhubungan juga mendorong Badan Pengembangan SDM Perhubungan melaksanakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan/pengoperasian simulator yang telah diawali oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

8. Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDM Perhubungan.

Indikator Kinerja Utama (IKU 9)

Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.

Tabel 3. 9 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan

Kegiatan	NILAI AKIP							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	86	90.46	87	77.74	88		89	90

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Target nilai AKIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2015 adalah sebesar 86,00 sedangkan capaian nilai AKIP pada tahun tersebut adalah sebesar 90.46 dengan kategori AA. Pada tahun 2016 terdapat penurunan nilai capaian nilai AKIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan, capaian nilai AKIP pada tahun 2016 adalah 77.74 dengan kategori BB dan lebih kecil dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87. Penurunan tersebut disebabkan terdapat beberapa faktor antara lain :

- Indikator kinerja sasaran dalam RENSTRA belum menggambarkan outcome;
- Belum adanya SOP internal terkait mekanisme pengumpulan data kinerja sesuai IKU;
- Laporan kinerja disarankan agar dapat menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*.

Indikator Kinerja Utama (IKU 10)

Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.

Tabel 3. 10 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan

Kegiatan	TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN (%)							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	88	83,19	90	89,43	92	75,43	93	94

Tingkat penyerapan anggaran Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2015 adalah sebesar 83,19% dan angka tersebut lebih rendah dari target tingkat penyerapan pada tahun dimaksud yaitu sebesar 88 %. Nilai anggaran Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.532.882.248.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.770.739.390.647,-. Nilai penyerapan anggaran pada tahun 2016 meningkat dari penyerapan tahun sebelumnya yaitu sebesar 89,43% namun lebih kecil dari target yang telah ditetapkan pada renstra Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu sebesar 90%. Nilai anggaran Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.978.291.905.000,- dengan penyerapan senilai Rp. 4.452.171.427.764,-.

Indikator Kinerja Utama (IKU 11)

Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP.

Tabel 3. 11 Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP

Kegiatan	Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP	-	-	-	-	2		2	3

Nilai pencapaian tingkat maturitas SPIP merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru dimasukkan kedalam target kinerja kegiatan sesuai dengan Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang telah disahkan melalui KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan. Dasar pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :

- a) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
- b) Keandalan Laporan Keuangan
- c) Pengamanan aset negara
- d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian tingkat maturitas SPIP dihitung berdasarkan level maturitas 1 – 5 dengan penjelasan sebagaimana tabel dibawah ini.

Level Maturitas SPIP

Level	Karakteristik SPIP
0	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Adapun target level maturitas SPIP Sekretariat Badan Pengembangan pada tahun 2017,2018 dan 2019 masing-masing adalah 2, 2 dan 3.

9. Sasaran Strategis 9

Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU 12)

Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang dihasilkan.

Tabel 3. 12 Jumlah Draft Peraturan Perundangan Dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya Di Bidang SDM Transportasi Yang Dihasilkan

Kegiatan	Jumlah Peraturan							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang dihasilkan.	4	35	4	12	4	9	4	4

Pada tabel 3.12 dapat diketahui bahwa jumlah draft peraturan perundangan yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah sebesar 35 peraturan perundangan melebihi target renstra sebesar 8 (delapan) kali lipat dari target jumlah draft peraturan yang ditetapkan pada renstra 2015 - 2019 yaitu sebesar 4 (empat) peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan antara lain terdiri dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Peraturan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Capaian peraturan perundangan yang dihasilkan pada tahun 2016 adalah sebesar 12 (dua belas) peraturan perundangan dan melebihi target yang telah ditetapkan pada renstra 2015 – 2019 tahun 2016 yaitu sebesar 4 (empat) peraturan perundangan. Capaian pada tahun 2017 hingga bulan november adalah sebanyak 9 (sembilan) peraturan perundangan dan telah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra 2015 – 2019 tahun 2017 yaitu sebesar 4 (empat) draft peraturan perundangan.

10. Sasaran Strategis 10

Tersedianya Sarana dan Prasarana Diklat Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Diklat SDM Transportasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU 13)

Jumlah sarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.

Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Sarana Pengembangan SDM Perhubungan

Kegiatan	JUMLAH SARANA DIKLAT							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T		T	T
Jumlah sarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	2.664	1.113	8.686	1.886	2.692	301	1.996	1.908

Pada tabel 3.13 dapat diketahui capaian jumlah sarana diklat SDM Transportasi yang tersedia di Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2015 adalah sebanyak 1.113 Unit lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada Renstra 2015 – 2019 tahun 2015 yaitu sebanyak 2.664 Unit. Capaian jumlah sarana diklat SDM Transportasi yang tersedia di Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2016 adalah sebanyak 1.886 unit lebih besar dari capaian jumlah sarana diklat pada tahun 2015 namun masih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada renstra 2015 – 2019 tahun 2016 yaitu sejumlah 8.686 unit sarana diklat. Capaian tahun 2015 dan 2016 tidak melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019 disebabkan oleh adanya penghematan dan self blocking yang dilaksanakan pada tahun dimaksud serta adanya pembatasan belanja modal. Capaian jumlah sarana diklat yang tersedia pada tahun 2017 hingga bulan November 2017 adalah sebesar 301 unit sarana diklat dan angka tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 yaitu sebesar 2.692 Unit.

Indikator Kinerja Utama (IKU 14)

Jumlah prasarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang dibangun.

Tabel 3. 14 Target dan Realisasi Prasarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang dibangun

Kegiatan	JUMLAH PRASARANA DIKLAT (m ²)							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Jumlah prasarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang dibangun..	1.219.522	254.521,22	685.256	435.915,20	455.662	6.905	519.448	278.615

Jumlah prasarana diklat yang tersedia pada tahun 2015 dan 2016 secara umum tidak melebihi target prasarana yang tersedia pada tahun tersebut. Pada tahun 2015 dari target yang telah ditetapkan dalam renstra 2015 – 2019 tahun 2015 adalah sebesar 1.219.522 m² dan capaian pada tahun tersebut adalah sebesar 254.521,22 m² dengan persentase sebesar 20.87% dan pada tahun 2016 dari target 685.256 m² yang telah ditargetkan dalam renstra 2015 – 2019 tercapai sebesar 435.915,20 m² dengan persentase sebesar 63.61%. Capaian jumlah prasarana diklat SDM transportasi yang tersedia tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan adanya kebijakan tidak melakukan pembangunan kampus baru dan diarahkan untuk melengkapi perlengkapan diklat serta adanya pemotongan dan self blocking anggaran serta pembatasan belanja modal.

11. Sasaran Strategis 11

Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat SDM Transportasi Yang kompeten.

Indikator Kinerja Utama (IKU 15)

Jumlah Pendidik Diklat SDM Transportasi bersertifikat yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Tabel 3. 15 Jumlah Pendidik Diklat SDM Transportasi bersertifikat yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Kegiatan	JUMLAH TENAGA PENDIDIK							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Jumlah Pendidik Diklat SDM Transportasi bersertifikat yang memiliki kompetensi dibidangnya..	-	-	-	-	1.459		1505	1515

Indikator Kinerja Utama (IKU 16)

Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Tabel 3. 16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Kegiatan	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN							
	2015		2016		2017		2018	2019
	T	R	T	R	T	R	T	T
Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang memiliki kompetensi dibidangnya.	3.509	2.568	3.899	3.158	4.289	2.070	4.679	5.069

Salah satu faktor yang mendukung pencapaian tujuan meningkatnya kualitas lulusan adalah tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dibidangnya. Badan pengembangan SDM Perhubungan sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan adalah salah satu prioritas demi kemajuan organisasi diklat dan juga demi mencapai target lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar/industri. Target jumlah tenaga pendidik yang tersedia pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.459 orang, jumlah tersebut untuk mengisi tenaga pendidik diseluruh Unit Pelaksana Teknis eksisting dan Unit Pelaksana Teknis yang baru yang berada dibawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Kebutuhan

tenaga pendidik akan terus meningkat seiring dengan peningkatan bentuk organisasi menjadi Politeknik atau Akademi. Tenaga kependidikan juga merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam tercapainya tujuan peningkatan jumlah dan kualitas lulusan diklat SDM transportasi. Target tersedianya jumlah tenaga kependidikan pada tahun 2015 adalah sebesar 3.509 orang dengan realisasi capaian pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.568 orang. Capaian tersebut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya dikarenakan tidak adanya pembukaan formasi pegawai dan adanya mutasi pegawai. Pada tahun 2016 capaian target jumlah tenaga kependidikan adalah sebesar 3.158 orang dengan target renstra 2015 – 2019 pada tahun 2016 adalah sebesar 3.899 tenaga kependidikan. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan lebih dari 50% Unit Pelaksana Teknis telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berstatus Badan Layanan Umum sehingga menyebabkan kebutuhan akan tenaga kependidikan menjadi meningkat.

B. Permasalahan Dan Langkah Lanjut

1. Permasalahan

Dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program sampai dengan tahun 2017 BPSDM Perhubungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Secara umum beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a) Tidak tersedianya SDM yang mencukupi untuk tenaga pendidik (dosen, instruktur, dan widyaiswara) dan tenaga kependidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas.
- b) Sarana dan prasarana yang sebagian sudah out of date dan belum mencukupi untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c) Sistem diklat yang belum terintegrasi melalui sistem informasi yang terkomputerisasi.
- d) Belum ada rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia transportasi untuk merencanakan dan mensinergiskan program pengembangan SDM transportasi dalam jangka panjang.

- e) Manajemen penyelenggaraan pengembangan SDM masih perlu disempurnakan agar koordinasi kegiatan bisa berjalan dengan lebih baik, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang strategis.

Rincian berbagai permasalahan tersebut untuk tiap matra sumber daya manusia perhubungan antara lain:

- a) Pendidikan dan pelatihan transportasi darat

Permasalahan yang dihadapi oleh Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat dalam rangka pengembangan SDM di bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian. adalah sebagai berikut:

- 1) Lulusan Diklat Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

Mekanisme promosi, rotasi, dan mutasi jabatan belum berjalan optimal sehingga banyak lulusan diklat yang belum mendapatkan posisi sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, terutama untuk Diklat Teknis dan belum adanya aturan kualifikasi kompetensi yang jelas yang harus dipenuhi untuk menunjang tugas dan fungsi, menyebabkan jumlah SDM aparatur daerah yang memiliki kompetensi transportasi darat masih sangat kecil.

- 2) Diklat-Diklat Teknis Belum Seluruhnya Aplikatif

Dari keseluruhan pendidikan dan pelatihan teknis dilingkungan Pusdiklat Perhubungan Darat terdapat beberapa diklat yang tidak sepenuhnya aplikatif. Beberapa sebab yang diidentifikasi menyebabkan hal ini adalah sebagai berikut:

- a) Perbedaan yang cukup besar antara kondisi yang digunakan sebagai bahan ajaran dalam pendidikan dan pelatihan teknis dengan yang ada di daerah peserta diklat.
 - b) Perbedaan kemampuan peserta yang mengikuti diklat dengan kemampuan dasar yang diharapkan dalam mengikuti suatu diklat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya : pegawai terlalu lama tidak mengikuti diklat sehingga tidak mampu mengikuti diklat dengan baik.

- c) Materi diklat akan membutuhkan dana yang cukup besar bagi daerah untuk mengimplementasikan di lapangan. Misalnya diklat *Area Traffic Control System (ATCS)*.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan Diklat Teknis yang berada di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat masih belum menunjukkan kondisi yang optimal. Beberapa indikasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

- a) Belum tersusunnya seluruh kompetensi tenaga teknis sub sektor Perhubungan Darat sehingga pola diklat yang dibuat masih banyak yang berorientasi kepada *knowledge* belum dilengkapi dengan materi *skill* yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas.
 - b) Belum adanya sinkronisasi pola antara pola Diklat Teknis yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dengan pola pembinaan pegawai yang berada di daerah. Perbedaan struktur organisasi pada beberapa daerah otonom menyebabkan kompetensi yang dibutuhkan beberapa penyesuaian yang diperlukan.
 - c) Kapasitas dan kualitas prasarana, sarana, bahan ajaran, widyaiswara, serta dana yang ada belum berjalan secara optimal. Masing-masing unsur membutuhkan peningkatan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasi perubahan yang semakin cepat terutama dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, informasi, serta kebutuhan pasar.
 - d) Penyelenggaraan diklat masih banyak mengandalkan pembiayaan dan program dari organisasi induk masing-masing. Dampaknya adalah bahwa perubahan cepat yang terjadi pada tingkat daerah tidak dapat dengan segera disesuaikan.
- 3) Bahan dan Alat Pengajaran yang Belum Memadai
- Bahan dan alat pengajaran merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan diklat. Untuk mencapai hasil diklat sesuai dengan tujuan instruksional yang ditetapkan, maka bahan dan alat pelajaran diperlukan untuk memenuhi dan membantu proses pendidikan dan pelatihan antara pengajar dengan peserta diklat. Secara umum

kurikulum dan silabi diklat. baik diklat awal maupun penataran perlu ditinjau ulang menyesuaikan perkembangan kelembagaan. teknologi dan globalisasi.

- 4) Belum Tersusunnya Program Unggulan Setiap UPT Diklat
Pembangunan dan penyediaan sarana diklat pada UPT Balai Diklat Transportasi Darat Bali dan Tegal selama ini dalam pengadaan sarana diklat selalu mempunyai jenis yang sama sehingga masing-masing UPT tidak mempunyai karakteristik. ciri khas dan kelebihanannya masing-masing. Alangkah baiknya jika Sarana yang dimiliki UPT saling melengkapi dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
- 5) Kurang Optimalnya Peran dan Fungsi Tenaga Pengajar
Mengingat bahwa sebagian besar para pengajar adalah para pejabat dan tenaga profesional dari berbagai instansi dan organisasi yang mempunyai tugas utama sebagai tenaga birokrasi internal. praktisi dan akademisi lembaga eksternal. maka tenaga pengajar/pendidik yang khusus mengembangkan bahan ajar. mengembangkan praktek/simulasi alat peraga dan alat peraktek diklat belum tersedia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka harus dilakukan beberapa perubahan untuk dapat meningkatkan minat para peserta dalam mengikuti diklat yang akan diselenggarakan UPT Darat, diantaranya dengan:

- 1) Sosialisasi lebih awal kepada dinas-dinas perhubungan dan instansi terkait mengenai program diklat yang akan dilaksanakan.
- 2) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik antara Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat maupun Badan Pengembangan SDM Perhubungan selaku pembina diklat, disamping dengan instansi-instansi terkait serta institusi-institusi asal peserta diklat guna memenuhi jumlah peserta diklat yang direncanakan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar/dosen pada setiap tahunnya.

b) Pendidikan dan pelatihan transportasi Laut

Pemetaan permasalahan Pusdiklat Perhubungan Laut dalam rangka pengembangan diklat kepelautan sesuai amanat UU No. 17 / 2008 tentang Pelayaran. meliputi:

- 1) Kelembagaan;
- 2) Jalur. Jenis dan Jenjang Diklat;
- 3) Kurikulum dan Metode Diklat;
- 4) Sarana dan Prasarana Diklat;
- 5) Tenaga Pendidik dan Pelatih;
- 6) Peserta Diklat;
- 7) Standarisasi Diklat;
- 8) Pembiayaan Diklat;
- 9) Pengendalian dan Pengawasan Diklat;
- 10) Hak dan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Diklat.

c) Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Udara

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Diklat Pembentukan/ awal dan Diklat Teknis/Fungsional pada beberapa UPT Perhubungan Udara adalah:

- 1) Kurangnya lahan untuk pengembangan fasilitas guna menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Kekurangan tenaga ahli yang berkompetensi di bidang penerbangan dikarenakan sebagian besar lulusan diklat pembentukan dari UPT tersebut memilih untuk bekerja di perusahaan asing.
- 3) Kurangnya dosen tetap di instansi masing-masing. Banyaknya tenaga pengajar yang tidak memiliki status instruktur tetap karena belum adanya Surat Keputusan atau jabatan fungsional instruktur.

d) Pusdiklat Aparatur Perhubungan

Permasalahan pelaksanaan program/kegiatan yang dananya bersumber dari DIPA Pusdiklat Aparatur Perhubungan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah calon peserta prajabatan lebih banyak dari yang direncanakan sehingga di perlukan Revisi DIPA Pusdiklat Aparatur Perhubungan Th 2009, yaitu dari beberapa Diklat Teknis menjadi Diklat Prajabatan.
- 2) Revisi Diklat Perencanaan menjadi Diklat prajabatan dan Diklat Barang dan Jasa.
- 3) Peserta Diklat Khususnya diklat teknis & fungsional banyak quota peserta tidak terisi. Sehingga menyebabkan anggaran tidak terserap seluruhnya.
- 4) Jumlah Peserta Diklat prajabatan yang tidak konsisten.
- 5) Jumlah peserta diklat teknis & fungsional yang tidak terpenuhi.
- 6) Kekurangan Tenaga Widyaiswara yang tetap Pada Pusdiklat Aparatur Perhubungan.

e) Sekretariat Badan Diklat Perhubungan

Keberadaan Sekretariat Badan Diklat Perhubungan sebagai motor penggerak bagi unit kerja Diklat Perhubungan dan sebagai unit kerja yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan tugas pembinaan secara teknis administratif di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, maka Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan pembinaan administratif terhadap semua unit kerja serta melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan aparatur guna mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional bidang Perhubungan.

Banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Diklat Perhubungan serta masih kurangnya peralatan kerja mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga capaian sasaran kegiatan selama kurun waktu 5 tahun masih dirasakan belum maksimal, hal ini disebabkan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan komposisi pegawai yang belum ideal yang ada pada Sekretariat Badan Diklat Perhubungan baik dari segi kualitas dan

kuantitas serta masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi yang mengakibatkan pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi terkendala dan mempengaruhi kegiatan lainnya. Belum optimalnya kinerja tersebut juga disebabkan beberapa faktor luar seperti masih lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan UPT dan pihak lain yang juga menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

2. Langkah Lanjut

Dalam menyingkapi berbagai permasalahan selama melaksanakan berbagai program dan kebijakan di BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan tindak lanjut penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi.

- Penambahan SDM tenaga pendidik (dosen, instruktur, dan widyaiswara) dan kependidikan yang sesuai dengan jumlah dan standar kompetensi yang diharapkan.
- Penambahan dan pembaharuan sarana dan prasarana untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pembuatan sistem informasi kepegawaian dan diklat yang terpusat dan terintegrasi antar UPT di bawah BPSDM Perhubungan untuk memudahkan koordinasi antar UPT dan antar bagian.
- Pembuatan rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia transportasi untuk merencanakan dan mensinergiskan program pengembangan SDM transportasi dalam jangka panjang melalui Grand Design BPSDM Perhubungan Tahun 2015-2034.

C. Realisasi Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan-kebijakan di BPSDM Perhubungan untuk pengembangan transportasi nasional telah dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan yang ada pada rencana strategis BPSDM Perhubungan 2015-2019. Sampai dengan tahun 2017 BPSDM Perhubungan telah merealisasikan berbagai program terkait kebijakannya, antara lain:

1. Untuk pemerataan kesempatan, keikutsertaan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang Transportasi BPSDM Perhubungan telah membangun beberapa UPT baru dan Pengembangan beberapa kampus sampai dengan tahun 2017, UPT yang telah dibangun dan telah dikembangkan antara lain:
 - a. Balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran (BP2IP) Padang Pariaman.
 - b. Balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran (BP2IP) Minahasa Selatan.
 - c. Balai pendidikan dan pelatihan transportasi Darat (BP2TD) Mempawah.
 - d. Akademi perkeretaapian Indonesia (API) Madiun.
 - e. Politeknik keselamatan dan Transportasi jalan (PKTJ) Tegal.
 - f. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug.
 - g. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Curug.
 - h. Balai pendidikan dan pelatihan transportasi Darat (BP2TD) Bali.
 - i. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Pasir Jambu-Ciwidey.
2. Untuk lebih mendorong peran swasta dalam rangka meningkatkan kontribusi dalam pendidikan dan pelatihan SDM bidang Transportasi, BPSDM Perhubungan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan swasta melalui bantuan penggunaan alat praktek diklat untuk meningkatkan target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi di masa yang akan datang.
3. BPSDM Perhubungan mendukung pembangunan transportasi melalui penyediaan SDM bidang Transportasi yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas serta menggunakan teknologi tinggi melalui penyelenggaraan diklat dan penyediaan sarana prasarana diklat yang berteknologi tinggi.
4. Pelaksanaan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka bentuk perwujudan dari amanat "nawacita" ketiga yaitu *Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan* dan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tertentu sebagai afirmasi pembangunan asimetris Badan Pengembangan SDM Perhubungan,

diklat yang berbasis kompetensi sektor transportasi ini diberikan secara gratis untuk masyarakat kurang mampu dan daerah tertinggal guna mendorong Percepatan Pembangunan Sektor Transportasi dan menekan angka Pengangguran Usia Produktif guna meningkatkan daya saing Tenaga Kerja Indonesia.

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

A. Landasan Hukum

Secara umum regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
10. Undang Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. Undang Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

20. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
23. Peraturan Pemerintah Nomor.7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
25. Pelatihan Jabatan PNS;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
27. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
30. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
32. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang tenaga jabatan fungsional instruktur;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2009 tentang jabatan fungsional widyaiswara;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 ttg. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;

37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Diklat Transportasi;
38. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 43 Tahun 2008 tentang Pendidikan, Pengujian dan Sertifikasi Kepelautan;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM. 38 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 di lingkungan Kementerian Perhubungan.
41. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
42. Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kab/Kotakebutuhan SDM Di Bidang Transportasi;
43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
44. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 430 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019;
45. Peraturan Menteri Perhubungan No PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

B. Target Pembangunan Infrastruktur Transportasi Tahun 2015 – 2019

1. Pembangunan Transportasi Darat

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat meliputi :

- a) Pembangunan BRT di 34 kota dengan pengadaan bus 3.170 bus
- b) Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan kota metropolitan
- c) Pembangunan/ Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A pada 41 Lokasi
- d) Penerapan teknologi ATCS di seluruh ibu Kota Provinsi

2. Pembangunan Transportasi Perkeretaapian

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian meliputi :

- a) Pembangunan Jalur sepanjang KA 3.258 km'sp di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua
- b) Penyelenggaraan kereta api perintis pada 10 lintas

- c) Pembangunan LRT dan MRT serta Kereta Api Cepat

3. Pembangunan Transportasi Laut

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut meliputi :

- a) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 65 lokasi
- b) Pembangunan/pengembangan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi
- c) Pengadaan kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit
- d) Pengembangan 100 Pelabuhan Non Komersial
- e) Pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan pada 65 lokasi
- f) Pembangunan 103 kapal perintis
- g) Terlayannya 193 lintas angkutan laut perintis
- h) Penyelenggaraan rute angkutan laut tetap dan teratur untuk mendukung tol laut pada 13 rute
- i) Penyelesaian dan pembangunan kapal negara kenavigasian 41 unit
- j) Penyelesaian dan pembangunan kapal patroli 282 unit

4. Pembangunan Transportasi Udara

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara meliputi :

- a) Pembangunan 15 Bandara baru
- b) Pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di 9 lokasi
- c) Pembangunan/pengembangan bandara di 100 lokasi
- d) Pembangunan/pengembangan terminal penumpang di 26 bandara

C. Kebutuhan SDM di Bidang Transportasi

1. Estimasi Kebutuhan SDM di Bidang Transportasi untuk Penambahan Infrastruktur 2015-2019

NO	INFRASTRUKTUR		JENIS PENDIDIKAN	ASUMSI KEBUTUHAN SDM	
	JENIS	UNIT			
1	Bus Rapid Transit	34 Kota	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Pengemudi	6.034
				Pembantu Pengemudi	12.680
		3170 unit Bus		Teknisi	634
				Supervisi	160
2	Terminal	41 Terminal Tipe A	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Manaiemen	2.460

NO	INFRASTRUKTUR		JENIS PENDIDIKAN	ASUMSI KEBUTUHAN SDM	
	JENIS	UNIT			
				Tenaga Operasional	
				Tenaga Pengawas	
3	ATCS	77 Unit (34 Prov)	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Manajemen	2.310
				Tenaga Operasional	
				Tenaga Pengawas	
4	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	65 Pelabuhan Penyeberangan	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Manajemen	9.750
				Tenaga Operasional	
				Tenaga Pengawas	
5	Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau	120 Lokasi	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Manajemen	3.600
				Tenaga Operasional	
				Tenaga Pengawas	
6	Pengadaan Kapal Penyeberangan	50 Unit	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Awak Kapal Penyeberangan	1.250
7	Pembangunan Jalur Kereta Api	3.258 km (Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua)	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Pelaksana	94.396
				Penguji Prasarana	65
				Pengawas	65
8	Penyelenggaraan Kereta Api Perintis	10 Lintas	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Pelaksana	500
				Pengawas	20
7	Pembangunan dan Pengembangan Kampus Baru	27 Lokasi	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Kependidikan	620
				Tenaga Pendidik	972
				Pengawas	108
8	Pengembangan Pelabuhan Non Komersil	100 Pelabuhan	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Manajemen	7.500
				Tenaga Operasional	15.000
				Tenaga Pengawas	500
9	Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan	65 Lokasi	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Pelaksana	3.250
				Pengawas	325
10	Pembangunan Kapal Perintis	103 Kapal Perintis	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Awak Kapal	5.150
11		193 Lintas		Pelaksana	9.650

NO	INFRASTRUKTUR		JENIS PENDIDIKAN	ASUMSI KEBUTUHAN SDM	
	JENIS	UNIT			
	Terlayannya Lintas Angkutan Perintis		Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Pengawas	386
12	Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian	41 Unit	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Awak Kapal	2.050
13	Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Patroli	282 Unit	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Awak Kapal	11.280
14	Pembangunan Bandara Baru	15 Bandara	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Manajemen	375
				Tenaga Operasional	1.125
				Tenaga Pengawas	75
16	Pengembangan Bandara untuk Pelayanan Kargo Udara	9 Lokasi	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Manajemen	225
				Tenaga Operasional	675
				Tenaga Pengawas	45
17	Pembangunan/ Pengembangan Bandara	100 Lokasi	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Manajemen	2.500
				Tenaga Operasional	15000
				Tenaga Pengawas	500
18	Pembangunan/ Pengembangan Terminal Penumpang	26 Bandara	Akademik/ Non Akademik (Short Course)	Tenaga Operasional	1.950
				Tenaga Pengawas	130
TOTAL					213.621

2. Transportasi Darat dan Perkeretaapian

a) Kebutuhan SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian

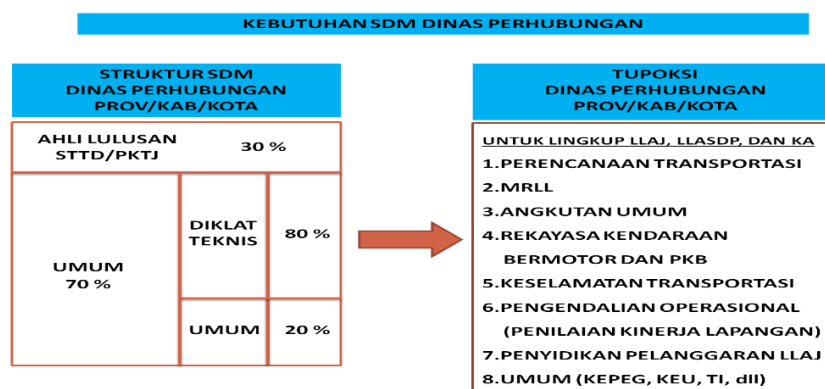
Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dan Perkeretaapian meliputi :

- 1) SDM Aparatur Pusat dan Daerah,
- 2) SDM Operator Angkutan Umum, dan
- 3) Masyarakat Transportasi

Untuk menghitung kebutuhan SDM dibidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, pendekatan yang digunakan adalah SDM yang melaksanakan kegiatan di bidang perhubungan darat sebagai aparatur, operator angkutan umum

barang dan penumpang untuk moda LLAJ, LLASDP, dan Kereta Api serta masyarakat sebagai pengguna jasa sistem transportasi darat, seperti gambar dibawah ini:

Adapun pendekatan yang dilakukan untuk menghitung jumlah kebutuhan (demand) SDM Perhubungan Darat yang memerlukan pendidikan dan pelatihan, adalah sebagaimana terdapat dibawah ini.



Gambar 4. 1 Pendekatan Kebutuhan SDM Perhubungan Darat

SDM Aparatur Perhubungan Darat adalah SDM Aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan untuk moda LLAJ, LLASDP dan Kereta Api adalah sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan SDM Perhubungan Darat Bidang LLAJ sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kebutuhan SDM Perhubungan Bidang LLAJ sampai dengan tahun 2019

NO	LOKASI	ASUMSI JUMLAH SDM	ASUMSI TOTAL SDM
1	PROVINSI = 34	105 ORANG	34 x 105 = 3.570 ORANG
2	KAB/KOTA = 510	60 ORANG	510 x 60 = 30 600 ORANG
TOTAL SDM LLAJ PROV/KAB/KOTA SELURUH INDONESIA			34.170 ORANG

Tabel 4. 2 Asumsi Jumlah SDM LLAJ yang Membutuhkan Diklat s.d Tahun 2019

NO	LOKASI	STRUKTUR SDM DISHUB PROV/KAB/KOTA	PERSENTASE	JUMLAH	JUMLAH SDM YANG MEMBUTUHKAN DIKLAT
1	PROVINSI	LULUSAN STTD/PKTJ	30 %	$30 \% \times 3.570 = 1.071$	-
		DIKLAT TEKNIS	56 %	$56 \% \times 3.570 = 1.999$	3.070 ORANG
2	KAB/KOTA	LULUSAN STTD/PKTJ	30 %	$30 \% \times 30.600 = 9.180$	-
		DIKLAT TEKNIS	56 %	$56 \% \times 30.600 = 17.136$	26.316 ORANG
TOTAL SDM LLAJ PROV/KAB/KOTA SELURUH INDONESIA					34.170 ORANG

Kebutuhan SDM Aparatur Daerah bidang LLAJ pada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai dengan tahun 2019 yaitu :

- a. SDM Teknis Bidang LLAJ yang berasal dari lulusan diklat awal (lulusan STTD Bekasi dan PKTJ Tegal), adalah sebesar : 10.251 pegawai.
- b. SDM Teknis Bidang LLAJ yang berasal dari lulusan diklat teknis perhubungan darat, adalah sebesar : 19.135 pegawai.

2) Kebutuhan SDM Perhubungan Darat Bidang LLASDP

Tabel 4. 3 Kebutuhan SDM Perhubungan Darat Bidang LLASDP s.d Tahun 2019

NO	LOKASI	ASUMSI JUMLAH SDM	ASUMSI TOTAL SDM
1	PROVINSI/KAB/KOTA=125	125 X 6 ORANG	750 ORANG
2	DIT/UPT ASDP=20	400 ORANG	400 ORANG
TOTAL SDM LLAJ PROV/KAB/KOTA SELURUH INDONESIA			1.150ORANG

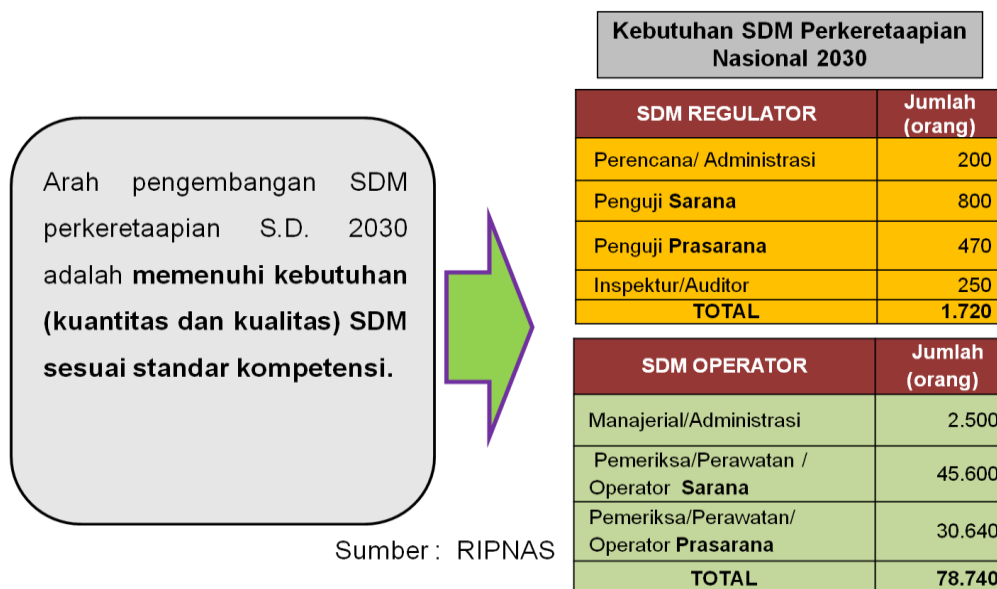
Tabel 4. 4 Jumlah SDM LLASDP yang Membutuhkan Diklat s.d Tahun 2019

NO	LOKASI	STRUKTUR SDM DISHUB PROV/KAB/KOTA	PERSENTASE	JUMLAH	JUMLAH SDM YANG MEMBUTUHKAN DIKLAT
1	PROVINSI/KAB/KOTA	LULUSAN STTD/PPSDP PLB	30 %	30 % x 750 = 225	-
		DIKLAT TEKNIS	56 %	56 % x 750 = 420	645 ORANG
2	DIT/UPT ASDP	LULUSAN STTD/ PPSDP PLB	30 %	30 % x 400 = 120	-
		DIKLAT TEKNIS	56 %	56 % x 400 = 224	344 ORANG
TOTAL SDM LLASD DIT/UPT/PROV/KAB/KOTA SELURUH INDONESIA					1.150 ORANG

Kebutuhan SDM Aparatur bidang LLASDP pada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota, yaitu :

- a. SDM Teknis Bidang LLASDP yang berasal dari lulusan diklat awal (lulusan STTD Bekasi atau Politeknik Pelayaran SDP Palembang) perhubungan darat, adalah sebesar : 345 pegawai.
- b. SDM Teknis Bidang LLASDP yang berasal dari lulusan diklat teknis perhubungan darat, adalah sebesar : 644 pegawai
- c. Jumlah SDM LLAJ dan LLASD di Indonesia adalah sebesar 35.320 pegawai, dan Jumlah SDM LLAJ dan LLASDP yang membutuhkan diklat teknis adalah sebesar 30.375 pegawai.

3) Kebutuhan SDM Perhubungan Darat Bidang Perkeretaapian

**Gambar 4. 2 Kebutuhan SDM Perkeretaapian**

Jumlah SDM Perkeretaapian yang membutuhkan diklat teknis baik Operator dan Regulator sampai dengan tahun 2030 adalah sebesar 80.460 pegawai, dengan kebutuhan SDM Regulator adalah sejumlah 1.720 pegawai dan SDM Operator dengan jumlah sebanyak 78.740 pegawai. SDM teknis dibidang perkeretaapian baik untuk aparatur maupun operator berasal dari Akademi Perkeretaapian Madiun dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi.

Jumlah SDM Perkeretaapian yang membutuhkan diklat teknis baik Operator dan Regulator sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 40.574 pegawai, dengan kebutuhan SDM Regulator adalah sejumlah 805 pegawai dan SDM Operator dengan jumlah sebanyak 39.769 pegawai. SDM teknis dibidang perkeretaapian baik untuk aparatur maupun operator berasal dari Akademi Perkeretaapian Madiun dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi.

b) Target Lulusan SDM Perhubungan Darat dan Perkeretaapian

Target Lulusan untuk diklat perhubungan darat, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Target Lulusan Diklat Pembentukan SDM Perhubungan Darat

SASARAN/ TARGET PRODUKSI	KOMPONEN	TAHUN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
A1. DIKLAT AWAL	Program Studi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
STTD	D IV TRANSDAR	60	66	55	55	60	54	84	-	57	-
	D III LLAJ	52	52	58	58	60	54	161	-	60	-
	D III PERKERETAAPIAN	29	58	46	46	64	56	47	-	145	-
	D III PKB	-	-	-	-	57	53	52	-	30	-
	D IV TRANSDAR (EXTENSION)	-	-	-	-	20	-	-	-	30	-
	DII PKB (BPPTD BALI)	60	58	-	-	60	56	60	-	60	-
PKTJ TEGAL	D IV MKTJ	90	77	90	77	90	77	90	-	90	-
	D III TKO	30	25	30	27	60	54	90	-	90	-
	D III PKB	90	77	90	77	90	77	90	-	90	-
BPPTD PALEMBANG	D III LLASDP	54	54	57	55	57	55	56	-	56	-
	D III TEKNIKA	-	-	57	55	57	55	56	-	56	-
	D III NAUTIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKADEMI KA MADIUN	D III SARANA KA	30	27	30	27	60	54	60	-	60	-
	D III JALUR DAN BANGUNAN KA	30	27	30	27	60	54	60	-	60	-
	D III LALU LINTAS ANGKUTAN KA	30	27	30	27	60	54	60	-	60	-
	D III SINTELIS KA	30	27	30	27	60	54	60	-	60	-
A2. PELATIHAN											
PUSBANG		2600	2600	2600	2600	2080	2080	1664	1664	1331	1331
STTD		336	494	312	540	264	300	1.794		1.818	
PKTJ TEGAL		1050	1050	1050	1050	1110	1110	1170	1170	1230	1230
BPPTD PALEMBANG		336	-	1416	-	1.566	-	2.472	-	7.212	-
BPPTD BALI		1.371	1.117	1.2893	842	1.117	489	7.221	-	5.762	-
AKADEMI KA MADIUN		480	480	540	540	570	570	600	600	630	630

1) Kelembagaan

Dalam rangka pemenuhan tuntutan kebutuhan SDM transportasi darat dan untuk menjawab kemajuan teknologi serta semakin meningkatnya tuntutan akan kompetensi SDM perhubungan darat yang lebih profesional, maka diusulkan untuk dilakukan pengajuan kelembagaan baru dan peningkatan kelembagaan dan program studi diklat di lingkungan diklat pembentukan transportasi darat periode Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

a) Pembentukan UPT Diklat Baru

Tabel 4. 6 Rencana Pendirian Organisasi dan Kelembagaan UPT Diklat Baru

KELEMBAGAAN DAN ASPEK LEGAL		2015	2016	2017	2018	2019
1	BPPTD MEMPAWAH	V				
2	BPPTD BALI (KAMPUS II)	V				
3	API MADIUN	V				
4	PKTJ TEGAL (KAMPUS II)	V				
5	BPPTD SUMATERA UTARA (FS)					V

b) Kelembagaan Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Fungsi dan tugas pokok masing-masing personil serta mekanisme kerja pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) sudah ada dalam Statuta. Sebagai acuan pelaksanaan kerja di lingkungan STTD. Namun demikian secara berkala, pejabat struktural selalu mengevaluasi fungsi pokok dan mekanisme kerja yang berlaku dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian seperlunya.

Tipe kepemimpinan yang diterapkan adalah kepemimpinan partisipatif, yang mengutamakan peran aktif semua individu dan unit kerja berdasarkan fungsi dan tugasnya dalam kerangka pencapaian tujuan. Pengorganisasian kerja diarahkan pada pencapaian sasaran/target yang dijabarkan dalam tujuan. Dalam rangka ketepatan pencapaian sasaran, proses penyeliaan, evaluasi dan pengukuran dilakukan secara tertib dan menyeluruh, secara teknis dan administratif, serta secara langsung dan tidak langsung.

Struktur Organisasi pimpinan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Program Studi adalah Ketua dan dibantu oleh Pembantu Ketua I Bidang

Akademik, Pembantu Ketua II di Bidang Keuangan dan Administrasi Umum serta Pembantu Ketua III di Bidang Ketarunaan. Ketua STTD juga dibantu oleh dua Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (KBAU), serta Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan (KBAAK).

Bagian Administrasi Umum (BAU) memiliki empat Sub-Bagian yang terdiri dari Sub-Bagian Keuangan, Sub-Bagian Program dan Pelaporan, Sub-Bagian Rumah Tangga dan Humas, dan Sub-Bagian TU dan Kepegawaian. Sementara, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan (BAAK) juga memiliki empat Sub-Bagian, yaitu Sub-Bagian Administrasi Tenaga Kependidikan, Sub-Bagian Administrasi Alumni dan Ketarunaan, Sub-Bagian Administrasi PKN dan Kerjasama, Sub-Bagian Administrasi Pendidikan.

Sedangkan unsur pendidikan yang menunjang bagian akademik yaitu terdiri dari program studi. Unsur Pimpinan Program Studi yaitu Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, serta Unsur Pelaksana dan Dosen. Ketua Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Unsur Pelaksana yaitu Dosen yang didukung oleh Unit Kerja meliputi Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Bagian Administrasi Umum, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Unit Laboratorium dan Teknologi Informasi, Unit Perpustakaan, Pusat Bimbingan dan Ketarunaan.

Mekanisme koordinasi antara institusi Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Program Studi berjalan dua arah. Dan mekanisme pengambilan keputusan bersifat desentralisasi di mana Program Studi diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan selama sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta disosialisasikan kepada seluruh bagian terkait.

Tabel 4. 7 Persiapan Pengembangan Kelembagaan dan Program Studi STTD

Strategi Renana		Rencana Program	Rancangan Aktifitas		Tolok Ukur
Persiapan Pengembangan Kelembagaan dan Program Studi	1.1.	Pengembangan Program Studi Baru	1.1.1	Penyusunan Studi Kelayakan	Berdirinya Program Studi yang dapat mengakomodir Kebutuhan Pasar
			1.1.2	Penyusunan Kurikulum dan SAP	
			1.1.3	Penyusunan Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang	
			1.1.4	Pengurusan Ijin	
			1.1.5	Perekrutan SDM	
	1.2.	Pembentukan Penjaminan Mutu	1.2.1	Pengembangan Lembaga Penjaminan Mutu	Terjaminnya Kualitas Layanan Pendidikan
			1.2.2	Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu	
			1.2.3	Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu	
			1.2.4	Implementasi Sistem Penjaminan Mutu	
			1.2.5	Pengembangan Sistem Audit Mutu Internal	
			1.2.6	Pengembangan Sistem Evaluasi Diri	
	1.3.	Pembentukan Lembaga Riset	1.3.1	Pengembangan Budaya Penelitian	Jumlah Penelitian dan Kualitas Penelitian Dosen

c) Kelembagaan Balai Diklat Transportasi Darat Palembang

Dalam rangka pemenuhan tuntutan kebutuhan SDM transportasi darat dan untuk menjawab kemajuan teknologi serta semakin meningkatnya tuntutan akan kompetensi SDM perhubungan darat yang lebih profesional, maka diusulkan untuk dilakukan pengajuan kelembagaan baru dan peningkatan kelembagaan dan program studi diklat di lingkungan diklat pembentukan transportasi darat periode Tahun 2015-2019 dan untuk Rencana Pendirian Kelembagaan Baru di BPPTTD Palembang pada tahun 2017 dengan perubahan kelembagaan adalah Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.

Balai Diklat Transportasi Darat Palembang pada renstra 2015 – 2019 akan mengembangkan akan mengembangkan program studi dan pada tahun 2017 telah disahkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 429/KPT/I 2017 Tentang Izin Pembukaan Studi Dalam Rangka Pendirian Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan

Penyeberangan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Perhubungan maka Peningkatan Kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang Menjadi Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang dengan program studi yang akan dikembangkan :

- 1) Studi Nautika Program Diploma Tiga
- 2) Teknologi Nautika Program Diploma Tiga
- 3) Pengelolaan Pelabuhan Program Diploma Tiga

d) Kelembagaan Balai Diklat Transportasi Darat Bali

Rencana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di BPPTD Bali mengacu pada konsep manajemen ISO. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan akan diklat kompetensi transportasi akhir-akhir ini BPPTD Bali akan meningkatkan status kelembagaan menjadi spesialisasi fungsi Politeknik Transportasi Darat Bali. Dalam rangka reformasi birokrasi dan upaya peningkatan kinerja pelayanan lembaga maka BPPTD Bali berubah menjadi lembaga Badan Layanan Umum dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem pendidikan yang berbasis iptek, peningkatan kualitas pelayanan penyelenggara pendidikan kepada masyarakat serta pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.

Balai Diklat Transportasi Darat Bali akan mengembangkan program studi guna pengembangan pembelajaran untuk mendukung pengembangan kampus II BPPTD Bali. Apek kebutuhan pengembangan pembelajaran merupakan hasil analisis dari dokumen SID tahun 2012 yang dibandingkan dengan hasil kajian literature, kebijakan transportasi darat, serta melihat kebutuhan transportasi darat dan hasil survey mengacu pada dokumen FS pendirian Politeknik Transportasi Darat Bali pada tahun 2015. Dari hasil tersebut didapatkan beberapa program studi yang akan dikembangkan antara lain :

Tabel 4. 8 Pengembangan Program Studi BPPTD Bali

No	Program Studi	Keterangan
1	Pengujian Kendaraan bermotor (D3)	Bersumber dari SID 2012
2	Teknik Metrologi Transportasi Darat (D4)	Bersumber dari SID 2012
3	Telematika Transportasi Darat (D4)	Bersumber dari SID 2012
4	Manajemen Pengelolaan Angkutan Umum (D3)	Diacu dari FS Poltek Transdar Bali

e) Kelembagaan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal

Perubahan kelembagaan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal yang semula berbentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal melalui Keputusan Menteri Perhubungan PM Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal dan sejalan dengan hal tersebut PKTJ Tegal juga menjadi Badan Layanan Umum yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Jalan.

f) Kelembagaan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun

API Madiun dalam 5 (Lima) tahun kedepan akan berusaha menyempurnakan dan menjalankan fungsi organisasi dengan sebaik-baiknya yang berorientasi pada mutu. Dalam rangka itu, API Madiun merencanakan untuk menjadi organisasi Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2016.

2) Kurikulum Silabi dan Modul

Kurikulum, Silabi dan Bahan Ajar/Modul Diklat Pembentukan bidang Perhubungan Darat meliputi :

a) Kurikulum, Silabi Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Tabel 4. 9 Kurikulum dan Silabi Sekolah Tinggi Transportasi Darat

No	Program Studi	Total SKS		
		T	P	Total
1.	Diploma IV Transportasi Darat	60	90	150
2.	Diploma III Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	51	65	116

No	Program Studi	Total SKS		
		T	P	Total
3.	Diploma III LLAJ Konsentrasi Khusus Angkutan Umum	45	65	110
4.	Diploma III Perkeretaapian	48	69	117
5	Diploma II Pengujian Kendaraan bermotor	35	47	82

b) Kurikulum, Silabi Balai Diklat Transportasi Darat Palembang

Kurikulum, Silabi dan Bahan Ajar/Modul Diklat Balai Diklat Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.08/BPSDMP-2016 Tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan di Bidang Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

c) Kurikulum, Silabi Balai Diklat Transportasi Darat Bali

Tabel 4. 10 Kurikulum dan Silabi Balai Diklat Transportasi Darat Bali

No	Program Studi	Total SKS		
		T	P	Total
1.	Diploma II Pengujian Kendaraan bermotor	35	47	82

d) Kurikulum, Silabi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal

Tabel 4. 11 Kurikulum dan Silabi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal

No	Program Studi	Total SKS		
		T	P	Total
1.	Diploma IV Keselamatan Transportasi Jalan	65	81	146
2.	Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif	64	82	146
3.	Diploma III Pengujian kendaraan bermotor	51	65	116

e) Kurikulum, Silabi Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun

Kurikulum yang digunakan di API Madiun telah disetujui dan mendapat izin pendirian Prodi dari Kementerian Pendidikan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 110/E/O/2014.

Adapun setiap 2 (Dua) tahun sekali dilaksanakan pembakuan Kurikulum, GBPP, SRP dan SAP.

Dalam rangka pelaksanaan Kurikulum tersebut, setiap Prodi menyusun bahan ajar, referensi serta job sheet praktikum sebagai dasar proses pembelajaran di API Madiun.

- f) Kurikulum, Silabi dan bahan ajar untuk pelatihan teknis di Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Tabel 4. 12 Kebutuhan Kurikulum, Silabi dan Bahan Ajar Diklat Teknis Di Sekolah Tinggi Transportasi Darat

No	Jenis Diklat	Total JP		
		T	P	Total
1.	Diklat Pakerti	50	50	100
2.	Instruktur Rambu dan Marka	30	70	100
3.	Manajemen Transportasi Perkotaan	92	58	150
4.	Diklat Instruktur Pengemudi	46	54	100
5.	Manajemen Perlengkapan Jalan	48	52	100
6.	Instruktur Laboratorium KA	90	60	150
7.	Diklat Calon Instruktur	50	100	150
8.	Diklat Asesor	50	50	100
9.	Pelatihan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor	40	60	100
10.	Pelatihan Pengemudi Profesional	82	168	200
11.	Metodologi Penelitian	34	46	80
12.	Pengaturan Traffic Light	38	62	100

- g) Kurikulum, Silabi dan bahan ajar untuk pelatihan teknis di Balai Diklat Transportasi Darat Bali

Tabel 4. 13 Kebutuhan Kurikulum, Silabi dan Bahan Ajar Diklat Teknis Di BPPTD Bali

No	Jenis Diklat	Total JP		
		T	P	Total
1.	Diklat Teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	60	90	150
2.	Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas	24	48	72
3.	Diklat Manajer Angkutan Umum	30	20	50
4.	Diklat Penyusun Analisis Dampak Lalin	27	43	70

No	Jenis Diklat	Total JP		
		T	P	Total
5.	Diklat Pengemudi B3	21	11	33
6.	Diklat Operator Alat Berat	21	11	33
7.	Diklat Penilai Andalalin	35	55	90
8.	Diklat Pengelola Terminal	164	36	200
9.	Diklat Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan	104	96	200
10.	Diklat Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Umum	106	54	160
11.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Dasar	50	100	150
12.	Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Lanjutan I	44	106	150
13.	Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Lanjutan II	40	90	130
14.	Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Lanjutan III	40	80	120
15.	Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan	104	96	200
16.	Diklat Keselamatan Dasar	15	15	30
17.	Diklat Intelegent transport System	84	16	100
18.	Diklat Diklat Pemantau Keselamatan Jalan	78	122	200
19.	Diklat Manajemen dan Survey LLAJ	84	116	200
20.	Diklat Pengemudi barang Beracun dan Berbahaya (B3)	15	25	40
21.	Diklat Orientasi LLAJ	94	106	200
22.	Diklat Aplikasi Komputer Perencanaan Transportasi	15	35	50
23.	Diklat Aplikasi Komputer Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	15	35	50
24.	Diklat Aplikasi Komputer Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	40	60	100
25.	Diklat Pengelola Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas	60	90	150
26.	Diklat Perencanaan dan Pemodelan Transport	84	16	100
27.	Diklat Pengelolaan Parkir	84	16	100
28.	Diklat audit Keselamatan jalan	54	46	100
29.	Diklat audit Inspeksi Keselamatan jalan	54	46	100
30.	Diklat Dasar Transportasi Darat	32	16	48
30.	Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	134	66	200
31.	Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan	48	52	100

No	Jenis Diklat	Total JP		
		T	P	Total
32.	Diklat Manajemen Operasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor	44	56	100
33.	Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan Angkatan I	94	106	200
34.	Operator Jembatan Timbang	48	52	100
35.	Traffic Light	50	50	100
36.	Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor			250
37.	Diklat Emisi Gas Buang			150
38.	Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan			200
39.	Diklat Mekanika Otomotif Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan			200
40.	Diklat Dasar Penguji Kendaraan Bermotor			250
41.	Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan II			360
42.	Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan III			160
43.	Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan I			360

3) Sarana dan Prasarana

Semakin meningkatnya kebutuhan diklat dibidang transportasi darat maka dibutuhkan Sarana dan Prasarana pada UPT Diklat dibidang Perhubungan Darat sebagai berikut :

a) Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Transportasi Darat;

1) Gedung Rektorat

Gedung Rektorat merupakan pusat administrasi perkantoran Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Gedung Rektorat ini dibangun pada tanggal 25 Januari 2005 yang digunakan oleh para pimpinan dan staf dalam melaksanakan kegiatan perkantoran sehari-hari berupa kegiatan administrasi umum dan akademik.

2) Asrama

Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) mempunyai 2 (dua) buah asrama eksekutif yang digunakan untuk para peserta diklat teknis dan 6 (enam) buah asrama yang digunakan untuk para taruna. Akan tetapi 1 (satu) buah asrama eksekutif dialihfungsikan menjadi asrama taruna. Hal

ini terjadi karena kapasitas asrama taruna tidak cukup untuk menampung jumlah taruna yang semakin banyak. Pada tahun 2016, terdapat pembangunan asrama baru untuk peserta diklat teknis.

3) Kelas

Ruang kelas yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) pada saat ini terdiri dari 4 (empat) jurusan dan 1 (satu) gedung diklat Sriti. Pada tahun 2016, terdapat pembangunan kelas pada asrama baru untuk diklat teknis. Adapun sarana ruang kelas Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dilengkapi dengan *whiteboard*, *glass board*, *smartboard*, *LCD Infocus*, *Screen*, *AC*.

4) Perpustakaan

Kondisi Perpustakaan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) saat ini cukup bagus, dimana gedung perpustakaan ini termasuk gedung baru yang dibuat pada tahun 2006. Kumpulan buku-buku yang ada di perpustakaan berjumlah kurang lebih 2000 buku mengajar.

5) Laboratorium Pengujian Kendaraan Bermotor

Ruang alat uji Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai satu gedung khusus yang saat ini sudah digunakan dengan baik oleh Taruna/I maupun peserta kursus Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor.

6) Laboratorium ITS (Intelligent Transport System)

Laboratorium ITS merupakan laboratorium yang high tech yang berfungsi sebagai pusat kontrol data lalu lintas.

7) Laboratorium APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)

Pada laboratorium ini terdapat APILL dengan ukuran full scale, yang berfungsi sebagai media pembelajaran taruna/i untuk pengaturan APILL di simpang.

8) Laboratorium LLAJ

Pada laboratorium ini terdapat macam-macam sarana LLAJ yang ada dilapangan mulai dari traffic cone, guard rail, road hump, rubber strip dll yang berfungsi sebagai bahan pengetahuan taruna/i sebelum survei ke jalan.

9) Laboratorium Komputer dan Teknologi Informatika

Laboratorium Komputer dan Teknologi Informatika mempunyai kapasitas 36 unit komputer lengkap dan digunakan untuk belajar teori dan praktek

computer para taruna, saat ini dalam kondisi baik.

10) Laboratorium Bahasa

Laboratorium bahasa yang dimiliki oleh STTD sudah berbasis jaringan dengan teknologi yang tinggi sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran Bahasa Asing

11) Laboratorium kereta api

Pada laboratorium Kereta Api terdapat Bogie, Rel, gerbong yang dibuat ukuran full scale sehingga taruna/l dapat mendapat pengetahuan dasar tentang sarana dan prasarana Kereta Api sebelum terjun ke lapangan. Pada laboratorium ini juga terdapat sistem kelistrikan yang digunakan pada Kereta Api sebagai bahan pembelajaran taruna tentang kelistrikan kereta api dan terdapat sistem operasi kereta api yang dibuat dengan skala kecil.

12) Aula dan Auditorium

Aula Garuda digunakan sebagai gedung pertemuan dan ruang rekreasi taruna, dengan kapasitas 300 orang. Auditorium dibangun pada tahun 2011 dengan kapasitas kurang lebih 2000 orang. Saat ini aula dan auditorium mempunyai fasilitas yang layak untuk digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu memiliki: LCD projector, Screen, Pendingin Ruangan/AC, Sound System, dan lain-lain.

13) Ruang Makan

Ruang makan diperuntukkan sebagai ruang makan taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang dapat menampung 700 taruna.

Tabel 4. 14 Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana STTD Bekasi

NO	KEGIATAN	RENCANA (UNIT)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kendaraan praktek mengemudi jenis truck, sedan, motor		3	3		
2	Penyediaan driving (bridge) simulator (heavy truck, bus dan taxi)			3	3	
3	Penyediaan peralatan survey dan praktek lapangan		100			
4	Penyediaan alat peraga kendaraan bermotor			1		
5	Up dating peragaan uji kendaraan bermotor		1			
6	Peralatan gambar kerja			1		
7	Peralatan bengkel kerja (workshop untuk beton dan kayu)				1	
8	Peralatan laboratorium bahasa berbasis IT					1
9	Pengembangan peralatan laboratorium komputer					1

NO	KEGIATAN	RENCANA (UNIT)				
		2015	2016	2017	2018	2019
10	Laboratorium sistem transportasi dan logistic				1	1
11	Laboratorium keselamatan transportasi					1
12	Laboratorium perlengkapan jalan				1	1
13	Laboratorium Rekayasa transportasi			1	1	
15	Road safety park dan live lab			1		
16	Taman Lalu Lintas		1			
17	Laboratorium Outdoor Transportasi	1				
19	Lab. ITS		1	1		
20	Lab. Driving Simulator				1	
21	Lab. Software Transport	1				
22	Lab. Uji Bahan		1			
23	Lab. Ilmu Ukur Tanah		1			
24	Lab. Teknik Telekomunikasi Perkeretaapian		1			
25	Lab. Kontrol Propulsi sarana KA			1		
26	Lab. Pengukuran Listrik					1
27	Lab. Elektronika Lanjutan					1
28	Lab. Elektronika digital					1
29	Lab. Teknik Kendali Otomatis					1
30	Alat peraga dan perlengkapan kendaraan rel berupa jalur/ trek, emplasemen dan stasiun, loko dan kereta/gerbong				5	
31	Penyediaan peralatan dan perlengkapan laboratorium kereta api			1		
32	Peralatan bengkel kerja (workshop untuk besi, beton dan kayu)					1
33	Outdoor Laboratorium perkeretaapian					1
34	Student Center					1
35	Land Transport Galery					1
36	Pembangunan Kantin	1				
37	Renovasi Gedung Aula Garuda	1				
38	Renovasi Mess Sriti		1			
39	Renovasi Gedung Poliklinik		1			
40	Renovasi Asrama Taruna	1				
41	Renovasi Gd Rektorat					1
42	Asrama/Barak Taruna/i		1			
43	Jembatan penghubung				1	
44	Asrama Diklat				1	
45	Garasi Tertutup Mobil Dinas		1			
47	Pengolahan Limbah/Insenerator		1			

NO	KEGIATAN	RENCANA (UNIT)				
		2015	2016	2017	2018	2019
48	Komunikasi antar Instruktur dengan Taruna/ Asrama		1			
53	Pengembangan Website		1			
54	Kaji Ulang Rencana Induk/Masterplan STTD	1				
55	Program Penghijauan			1	1	1
56	Sepeda Listrik/Kampus				1	1

b) Sarana dan Prasarana Politeknik Keselamatan Program Transportasi Jalan;

Tabel 4. 15 Rencana Pengembangan Sarana Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

NO	URAIAN	RENCANA (UNIT)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Simulator pengemudi mobile	1			1	
2	Alat Uji PKB mobile	1				
3	Pengadaan LCD Projector + screen					4
4	Pengadaan kendaraan praktek	35				1
5	Pengadaan peralatan praktek ototronik	1	1			
6	Simulator Car Roll Over	1			1	
7	Seat belt simulator	2		2		
8	Alat Uji Kekesatan jalan	2				
9	Variabel message sign	2		2		
10	Speed camera with display		2			2
11	Perlengkapan ITS		1			
12	Software keselamatan transportasi	10	2	2	2	2
13	Alat praktek ototronik	1		1		

Tabel 4. 16 Rencana Pengembangan Sarana Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembangunan Arama tahap IV	v				
2	Pembangunan lab keselamatan	v				
3	Pembangunan lab otomotif	v				
4	Pembangunan lab PKB	v				
5	Penataan lansekap jalan	v				
6	Pembangunan kelas lanjutan	v				
7	Pembangunan track test & crash test	v	v	v		
8	Pembangunan gedung pertemuan	v				
9	Pembangunan gudang lanjutan		v			
10	Pembangunan mess dosen	v	v	v		

- c) Sarana dan Prasarana Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang;

Tabel 4. 17 Rencana Pengembangan Sarana BPPTD Palembang

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA SARANA (UNIT)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Smart Board	6	-	-	-	-
2	Laboratorium Bahasa	1	-	-	-	-
3	peralatan distress unit for attachment to breathing apparatus	-	25	-	-	-
4	peralatan fire suit	-	30	-	-	-
5	peralatan diklat BST, SCRB, AFF, MFA	-	1	-	-	-
6	LCD HDMI dan wireless presentation gateway	-	5	-	-	-
7	River Dredging Simulator	-	-	1	-	-
8	Minitur movable Bridge	-	-	1	-	-
9	River vessel Prototype	-	-	2	-	-
10	GPS Geodetic	-	-	2	-	-
11	trimble TSC3	-	-	1	-	-
12	Lux meter	-	-	-	1	-
13	Sound Level meter	-	-	-	1	-
14	Termometer	-	-	-	1	-
15	trimble R2 GNSS Recevier	-	-	1	-	-
16	Maket Miniatur Pelabuhan	-	-	1	-	-
17	Maket Miniatur Terminal Jalan	-	-	1	-	-
18	Self Contained Breathing Apparatus	-	-	30	-	-
19	Peralatan QSS Lab untuk teknika	-	-	-	1	-
20	Peralatan QSS Lab untuk Nautika				1	
20	CBT (computer base training)	-	-	-	1	-
21	Anatomycal navigated lamp system	-	-	-	1	-
22	able deck /engine	-	-	-	-	1
23	Engine Hall	-	-	-	-	1
24	Laboratorium Fisika	-	-	-	1	-
25	Laboratorium Kimia	-	-	-	1	-
26	Video pembelajaran kepelautan	-	-	-	-	1
27	steering gear simulator	-	-	-	-	1
28	Steam dangan turbin simulator	-	-	-	-	1
29	Laboratorium elektronika	-	-	-	-	1
30	Engine room simulator	-	-	-	-	1
31	Radar simulator/ radar ARPA	-	-	-	-	1

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA SARANA (UNIT)				
		2015	2016	2017	2018	2019
32	GMDSS	-	-	-	-	1
33	ECDIS simulator	-	-	-	-	1
34	Full Mission Ship Handling Simulator	-	-	-	-	1
35	Full mission Engine room simulator	-	-	-	-	1
36	Jembatan Bergerak	-	-	-	-	1
37	Peralatan B3	-	-	-	-	1
38	Miniatur Lock Dam	-	-	-	-	1
39	Alat Peraga Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan	-	-	-	-	1
40	Audio Visual Bahan Ajar	-	-	-	-	4
41	Pembangunan Kapal Latih Ro-Ro	-	-	-	-	1
42	Kendaraan Ambulance	-	-	-	-	1
Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.		7	61	40	9	22

Tabel 4. 18 Rencana Pengembangan Prasarana BPPTD Palembang

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA PRASARANA (Unit)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembangunan Garasi Kapal Latih	3	-	-	-	-
2	Pembangunan Asrama Taruna (Barak)	2	1	1	-	1
3	Pembangunan gedung laboratorium nautika dan teknik	-	2	-	-	-
4	Pembangunan Gedung Pusat Pembinaan Taruna	-	1	-	-	-
5	Pembangunan Ruang Makan Taruna	-	1	-	-	-
6	Pembangunan Fasilitas Akses Lingkungan BST	-	1	-	-	-
7	Rehabilitasi Gedung Adminitrasi Pendidikan	-	1	-	-	-
8	Renovasi Fasilitas Olah Raga Kolam Renang	-	1	-	-	-
9	Renovasi Fasilitas Olah Raga Lapangan Tenis	-	1	-	-	-
10	Pembangunan Gudang Barang	-	1	-	-	-
11	Pembangunan Garasi Kendaraan Operasiona	-	1	-	-	-
12	Pembangunan Gedung Sarana Sikap dan Mental	-	1		-	-

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA PRASARANA (Unit)				
		2015	2016	2017	2018	2019
13	Pembangunan Rumah Dinas/Rumah Dosen	-	-	4	-	-
14	Pembangunan Gedung Pengolahan Air Bersih	-	-	1	-	-
15	Rekondisi IPAL	-	-	1	-	-
16	Pembangunan Dermaga	-	-	-	-	1
17	Relokasi Bangunan Genset	-	-	1	-	-
18	Pembangunan Gedung Binatu	-	-	1	-	-
19	Gedung Laboratorium ASDP	-	-	-	-	1
20	Asrama Taruna	-	-	-	-	1
21	Pembangunan Guest House	-	-	-	-	1
22	Pembangunan Gedung Perpustakaan	-	-	-	-	1
23	Pembangunan Ampli Theater	-	-	-	-	1
24	Pembangunan Gedung IT	-	-	-	-	1
25	Pembangunan Auditorium Serbaguna	-	-	-	-	1
26	Pembangunan Gedung Waralaba	-	-	-	-	1
27	Pembangunan Dapur/Pantry	-	-	-	-	1
28	Pembangunan Gedung Pusat Rekreasi Taruna	-	-	-	-	1
29	Pembangunan Flat Pegawai	-	-	-	-	1
30	Lapangan Parkir	-	-	-	-	1
31	Gedung Jurusan	-	-	-	-	1
32	Pembangunan Kelas Taruna	-	-	1	-	1
33	Pembangunan Dermaga	-	-	-	-	1
34	Perencanaan Pembangunan Dermaga	-	-	-	1	-
35	Reviu Masterplan 2015-2019	-	-	-	1	-
36	Perencanaan Pembangunan Kapal Roro	-	-	-	1	-

d) Sarana dan Prasarana BPPTD Bali;

Tabel 4. 19 Daftar Prasarana BPPTD Bali

NO.	JENIS	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	Tanah	M2	15.898	Kampus Lama
			87.719	Kampus II
2	Bangunan Kantor	M2	200	
3	Ruang Kelas	Paket	1	2 Lantai 6 ruang
4	Bangunan Asrama	M2	1.679	4 Bangunan
5	Mess Dosen	M2	280	4 Bangunan
6	Rumah Dinas Kepala Balai	M2	120	

NO.	JENIS	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
7	Gedung Uji	M2	720	
8	Pos Jaga	M2	20	
9	Ruang Aula	M2	270	
10	Ruang Makan	M2	250	
11	Ruang Dapur	M2	108	
12	Poliklinik / Mushola	M2	140	
13	Lab. Computer Based Training (CBT)	Paket	1	
14	Lab Bahasa	Paket	1	
				Untuk 30 orang taruna

Tabel 4. 20 Daftar Sarana BPPTD Bali

NO.	JENIS	Satuan	Volume	Keterangan
1	Meja	Unit	715	Baik
2	Kursi	Unit	715	Baik
3	Papan Tulis	Unit	15	Baik
4	Lemari	Unit	236	Baik
5	AC	Unit	79	Baik
6	Werelles	Unit	12	Baik
7	OHP	Unit	12	Baik
8	Note Book	Unit	14	Baik
9	Mobil Chasis	Unit	2	Baik
10	Engine Stand	Unit	2	Baik
11	Alat Uji	Paket	1	Baik
12	Otomotif	Paket	1	Baik
13	Alat Peraga	Paket	1	Baik
14	Bus	Unit	4	Baik
15	Mobil Uji	Unit	1	Baik
16	Mobil Ambulans	Unit	1	Baik
17	Mobil Sedan Patwal	Unit	1	Baik
18	Mobil Operasional	Unit	2	Baik
19	Motor Patroli/Patwal	Unit	1	Baik
20	Motor Tiger	Unit	1	Baik
21	Motor Supra	Unit	4	Baik
22	Motor Satria	Unit	2	Baik

Tabel 4. 21 Rencana Pengembangan Prasarana Diklat BPPTD Bali

NO	Jenis Prasarana
1	Alat uji kendaraan non konvensional (High Tech Vehicle)
2	Metrologi kendaraan non konvensional (High Tech Vehicle)
3	Intelligent Transportation System (ITS)
4	Simulator moda transportasi umum modern.

Tabel 4. 22 Tabel Analisa Efektivitas dan Efisiensi Kebutuhan Ruang Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Kampus II BPPTD Tabanan, Bali (Rencana Pengembangan)

No	Kebutuhan Ruang	Kebutuhan Luas Lahan (m2)
1.	Kantor Pusat	1260
2.	Gedung PPM (penelitian dan pengabdian pada masyarakat)	560,3
3.	Gedung badan penjaminan mutu	412.1
4.	Sarana peribadatan	379,5 dan 225
5.	Konseling	283.4
6.	Ruang kesehatan	301.74
7.	Gudang	280
8.	Kantin	600
9.	Tempat parkir	3424
10.	Lapangan Olahraga	2296
11.	asrama	2502
12.	Lapangan Upacara	2375
13.	Garasi bus dan mobil	487,5
14.	Pos jaga	25
15.	Gedung serbaguna	1446,25
16.	Guest house	500
17.	Apartemen dinas	834
18.	Asrama short couse	465
19.	Power house	199,5
20.	Dapur	142,5
21.	Laundry	283,4
22.	Gedung prodi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) (D3)	1386
23.	Gedung prodi Teknik Metrologi Transportasi Darat (D4)	1386

24.	Gedung prodi Telematika Transportasi Darat (D4)	1386
25.	Workshop prodi Pengujian Kendaraan Bermotor (D3)	225
26.	Workshop / lab prodi Teknik Metrologi Transportasi Darat (D4)	225
27.	Workshop / lab (simulasi) prodi Manajemen Pengelolaan Angkutan Umum (D3)	225
28.	Perpustakaan umum	468
29.	Kelas short couse	462
30.	gedung uji coba	75

e) Sarana dan Prasarana Akademi Perkeretaapian Indonesia;

Tabel 4. 23 Rencana Pengembangan Sarana Akademi Perkeretaapian

NO	PERALATAN DIKLAT	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengadaan Alat Perawatan Sarana Kereta api	Unit	1				
2	Alat Praktek Komponen Sarana KA	Unit	1				
3	Peralatan Perbengkelan Akademi Perkeretaapian	Unit	1				
4	Peralatan Pengujian Jalan Rel	Paket		50			
5	Peralatan Las Thermit	Paket		1			
6	Peralatan Praktek Ilmu Ukur Tanah	Paket		23			
7	Pengadaan Alat peraga gardu kelistrikan kereta api	Unit		1			
8	Pengadaan Simulator Sarana Perkeretaapian	Unit		2			
9	Pengadaan Compresor Workshop	Unit		1			
10	Pengujian Pengereman Kereta Api	Paket		1			
11	Forklift	Unit		2			
12	Alat Inspeksi Keselamatan	Paket		1			
13	Peralatan Marching Band, Seragam dan Aksesoris	Paket		1			
14	Peralatan Olahraga	Unit		1			
15	Peralatan Seni	Unit		1			
16	Peralatan Pengangkut Alat Praktek	Unit		1			
17	Pengelasan Plat, jalan rel dan material penunjang lainnya	Paket			1	1	1

NO	PERALATAN DIKLAT	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
18	Peralatan Peraga Jembatan dan Terowongan	Paket			1		
19	Alat Peraga Wesel Normal	Paket			1		
20	Alat Peraga Box Beton	Paket			1		
21	Alat Praktek Mekanika Tanah (CBR, konsolidasi, klasifikasi, atterberg)	Paket			1		
22	Peralatan Pengujian Material Batu Ballast	Paket			1		
23	Peralatan Praktek Data Logger	Paket			1		
24	Peralatan Pengujian Pembebanan Beton	Paket			1		
25	Pengadaan alat peraga sinyal perkeretaapian	Unit			1		
26	Pengadaan alat peraga elektronika dasar (modul rangkaian, modul control, pengukuran listrik arus lemah)	Unit			1		
27	Peralatan Persinyalan Mekanik	Paket			1		
28	Peralatan Persinyalan Elektrik	Paket			1		
29	Perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO)	Unit			1		
30	Peralatan Sarana Penggerak (TMC)	Unit			1		
31	Pengadaan Peralatan Workshop	Unit			1		
32	Pengadaan Excavator	Unit			1		
33	Pengadaan Bulldozer	Unitt			1		
34	Peralatan Pemeriksaan Sarana KA	Paket			1		
35	Pengadaan alat peraga AC	Paket			1		
36	Simulator Operasi Kereta Api	Paket			1		
37	Peralatan Praktek Pengelasan Elektrode	Paket				1	
38	Peralatan Kerja Bengkel (toolkit)	Paket				1	
39	Peralatan Pengujian Material Baja	Paket				1	
40	Peralatan Pemeriksaan Jalur dan Jembatan KA	Paket				1	
41	Pengadaan Peralatan Pengujian Listrik Aliran Atas	Paket				1	
42	Pengadaan alat peraga telekomunikasi perkeretaapian	Unit				1	
43	Pengadaan alat peraga elektronika daya	Unit				1	

NO	PERALATAN DIKLAT	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
44	Peralatan Pengujian Sintel Perkeretaapian	Paket				1	
45	Peralatan Peraga Rute Relay Interlocking RRI	Unit				1	
46	Peralatan Peraga Meja Mistar Handel Aspek Semboyan dan Lemari Blok	Unit				1	
47	Alat Peraga Penangan PLH Perkeretaapian (Termasuk Simulasi Keselamatan Perjalanan Kereta Api)	Unit				1	
48	Pengadaan alat Praktek Komponen Sarana Kereta api	Unit				1	
49	Alat Peraga Kontrol Lokomotif	Paket				1	
50	Alat Peraga Kontrol KRD	Paket				1	
51	Alat Peraga Kontrol KRL	Paket				1	
52	Display body dan Rangka Sarana	Paket				1	
53	Pengadaan Peralatan Dasar Mekanik	Paket				1	
54	Perawatan sarana kereta api (Overhoul, Pembersihan, Pengukuran & Penanalisaan Sarana)	Paket				1	
55	Lokomotif Tenaga Diesel	Unit				1	
56	Pengadaan Peralatan Las Flash Butt	Unit				1	
57	Perlengkapan Pengecatan Sarana	Paket				1	
58	Gerbong					1	
59	Upgrading Simulator Persinyalan Elektrik Mekanik (1 arah ke 2 Arah)					1	
60	Panel Pelayanan Perlindungan Manual dan Otomatis	Paket				1	
61	Software di Bidang Perkeretaapian	Paket				1	1
62	Peraga Pintu Perlindungan Mekanik	Paket				1	
63	Peraga Pintu Perlindungan Listrik dengan AWS (Solar Cell, PLN, Otomatis dan Genset)	Paket				1	
64	Peralatan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Paket					1
65	Peralatan Kerja Jalan Rel	Paket					1

NO	PERALATAN DIKLAT	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
66	Alat Pengujian Sarana Perkeretaapian (Pertama dan Berkala)	Paket					2
67	Kereta Listrik/ KRL	Unit					1
68	Kereta Perawatan Jalur KA (MTT)	Unit					1
69	Trem	Unit					1
70	Sarana dan Prasarana Monorail	Paket					1
71	Alat Simulator KRL	Unit					1
	JUMLAH		3	86	20	28	11

Tabel 4. 24 Rencana Pengembangan Prasarana Akademi Perkeretaapian

NO	Bangunan Diklat Perhubungan Darat	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pembangunan Tahap V					
1	Asrama Eksekutif					
2	Sport Hall					
3	Drainase					
4	Peningkatan Pagar Keliling					
5	Landscape Kawasan					
	Pembangunan Tahap Lanjutan					
1	Guest House		4.830			
2	Workshop Besar		3.628			
3	Perpustakaan		5.157			
4	Asrama (2 Unit)		1.311	1311		
5	Track dan Sintelis		2.500			
6	Stasiun				750	
7	Laboratorium Bangunan dan Jalur KA I			1.584		
8	Laboratorium Bangunan dan Jalur KA II			1.584		
9	Laboratorium Elektronika KA			1.584		
10	Laboratorium Lalu Lintas KA			1.584		
11	Jaringan Listrik dan Jalan Lingkungan				5.000	
12	Selasar			2.000		
13	Sirkulasi Kawasan dan Parkir (Bus, Mobil, Motor, Sepeda)			1.000		
14	Lapangan Olahraga Outdoor				4.000	
15	Lapangan Upacara				6.000	
16	Rumah Dinas				1.940	
17	Utilitas Kawasan				1	
18	Garasi				450	

NO	Bangunan Diklat Perhubungan Darat	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
19	RTH Kawasan				36.000	
20	Kantin				200	
21	Kolam Renang				1.250	
22	Laundry				150	
23	Pengelolaan Limbah (IPAL)				100	
24	Ruang Display dan Museum				1.584	
25	Gudang (Warehause)				1.000	
26	Laboratorium Outdoor track				300	
27	Pembangunan Trase Penghubung ke Jalur Utama				18.000	
28	Workshop Kecil				955	
29	Asrama				2.622	
30	Ruang Kelas Tambahan				1.800	
31	Pusat Pembinaan Ketarunaan				400	
32	Overlay Jalan Lingkungan				450	
	Jumlah Total	0	17.426	10.647	82.952	0

f) Sarana dan Prasarana BPPTD Mempawah;

Tabel 4. 25 Rencana Pengembangan Sarana BBPTD Mempawah

NO	KEGIATAN	Rencana Sarana (Unit)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peralatan Praktek dan Peraga Laboratorium Kelaikan Kapal			1		
2	Peralatan Praktek dan Peraga Laboratorium Keselamatan Pelayaran ASDP			1		
3	Peralatan Praktek dan Peraga Laboratorium Hidrologi			1		
4	Peralatan Praktek dan Peraga Bengkel Terpadu				1	
5	Simulator Kapal Sungai				1	
6	Pengadaan kapal latih				1	

Tabel 4. 26 Rencana Pengembangan Prasarana BPPTD Mempawah

NO	KEGIATAN	Rencana Prasarana (Unit)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembangunan Asrama tahap 1	1				
2	Pembangunan Kelas tahap II	1				
3	Pembangunan Asrama tahap II	1				
4	Pembangunan Gedung Tower	1				
5	Gedung Pengelolaan air bersih	1				
6	Ruang Makan	1				
7	Pembangunan Pos Jaga		1			
8	Pembangunan Drainase		1			
9	Ruang Loundry		1			
10	Gedung Genset	1				
11	Gedung Bengkel Terpadu Kapal ASD		1			
12	Pembangunan Laboratorium Hidrologi		1			

NO	KEGIATAN	Rencana Prasarana (Unit)				
		2015	2016	2017	2018	2019
13	Pengadaan Fasilitas Bengkel Terpadu		1			
14	Landscape				1	1
15	Pembangunan Selasar				1	
16	Gedung BIMTAR			1		
17	Gedung Laboratorium Perkapalan ASDP			1		
18	Gedung Laboratorium Keselamatan Pelayaran ASDP			1		
19	Pengadaan Fasilitas Laboratorium Hidrologi			1		
20	Auditorium			1		
21	Sport Hall Indoor			1		
22	Fasilitas Olah Raga			1		
23	Rumah Dinas				1	
24	Guest House				1	
25	Dermaga Sungai Latih				1	
26	Pelabuhan Penyeberangan Simulasi				1	
27	Movable Bridge				1	
28	Prasarana BST				1	
29	Kolam renang				1	
30	Utilitas Kawasan				1	
31	Gedung Perpustakaan				1	
32	Lapangan Upacara					1
33	Masjid					1
34	Garasi					1
35	Sirkulasi Kawasan dan Parkir					1
36	RTH Kawasan					1
37	Gedung Instalansi Perbaikan Sarpras					1

4) Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Jumlah Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik yang ada saat ini dan yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan diklat teknis transportasi darat, baik untuk diklat awal dan diklat teknis adalah sebagai berikut :

a) Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Tabel 4. 27 Kondisi Eksisting Tenaga Pendidik di STTD Tahun 2017

NO	TENAGA PENGAJAR DENGAN JENJANG PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH PENGAJAR TAHUN 2016											
		Dosen Tetap		Dosen Tidak Tetap		Instruktur Tetap		Instruktur Tidak Tetap		Widyaiswara Tetap		Widyaiswara Tidak Tetap	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	D-II/D-III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S-1/D-IV	2	1	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	S-2	37	10	32	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4	S-3	6	1	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		45	12	42	6	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. 28 Kondisi Eksisting Tenaga Kependidikan di STTD 2017

NO	JENIS TENAGA KEPENDIDIKAN	JENJANG PENDIDIKAN													
		< D III		D III		D IV		S 1		S 2		S 3		Profesi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tenaga Administrasi	15	3	5	4	2	4	19	22	15	14	0	0	0	3
2	Tenaga Teknisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tenaga Laboran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tenaga Pustakawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tenaga Peneliti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		15	3	5	4	2	4	19	22	15	14	0	0	0	3

b) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang

Tabel 4. 29 Rencana Pengembangan Tenaga Pendidik Melalui Alih Fungsi di BPPTD Palembang

NO	NAMA JABATAN	SRATEGI PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK					REKRTUMEN NON PNS				
		KUALIFIKASI PENDIDIKAN		KEBU- TUHAN	Alih Fungsi						
		Jenjang	Jurusan		2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dosen	S2	Transportasi	2	1	1	-	-	-	-	-
		S2	Perkapalan	1	-	-	-	1	-	-	-
		S2	Bahasa Inggris	2	1	-	-	-	-	-	-
		S2	MIPA	1	-	-	-	-	-	1	-
		S2	Bahasa Indonesia	1	-	-	-	-	-	1	-
		S2	Teknik Sipil	1	-	1	-	-	-	-	-
		S2	Ekonomi	1	-	1	-	-	-	-	-
		S2	Semua jurusan + ANT II	4	1	2	-	-	1	-	-
		S2	Semua jurusan + ANT I	2	-	1	-	-	1	-	-
		S2	Semua jurusan + ATT I	2	-	1	-	-	1	-	-
SUB TOTAL				17	3	7	0	1	3	2	0
2	Widyaiswara	DIV/S1	Transportasi	9	3	4	-	-	-	-	2
		S1	Hukum	1	1	-	-	-	-	-	-
		S1	Teknik Elektro	1	-	-	-	1	-	-	-
		S1	Teknik Sipil	1	-	1	-	-	-	-	-
		S1	Teknik Mesin	1	-	-	-	-	-	-	-
		S1	Teknik Perkapalan	1	-	-	-	-	-	-	1
		D IV / S1	Nautika ANT III	2	-	-	-	1	1	-	-
		D IV / S1	Teknika ATT III	2	-	-	-	1	1	-	-
		S1	Kedokteran Umum	1	-	-	-	-	-	-	1
SUB TOTAL				19	4	5	0	3	2	0	4
3	Instruktur	D III	Teknik Perkapalan	1	-	-				1	
		D III	Elektronika	1	-	-			1		

	D III	Teknik Mesin	1	-	-			1		
	D III	Pemetaan	1	-	-					1
	D III	Komputer	1	1	-					1
	D III	ANT III	5	-	-		1			
	D III	ATT III	5	-	-		1			
	SMK	ANT Dasar	1	-	-		1			
SUB TOTAL			16	1	0	0	3	2	1	2
TOTAL			52	8	12	0	7	7	3	6

Tabel 4. 30 Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Tenaga Pendidika di BPPTD Palembang

NO	NAMA JABATAN	SRATEGI PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK			REKRTUMEN NON PNS					BIAYA
		KUALIFIKASI PENDIDIKAN		KEBU- TUHAN						
		Jenjang	Jurusan		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dosen	S2	Transportasi	2	-	-	-	-	-	
		S2	Perkapalan	1	-	1	-	-	-	APBN BSDMP
		S2	Bahasa Inggris	2	-	-	-	-	-	-
		S2	MIPA	1	-	-	-	1	-	APBN BSDMP
		S2	Bahasa Indonesia	1	-	-	-	1	-	APBN BSDMP
		S2	Teknik Sipil	1	-	-	-	-	-	-
		S2	Ekonomi	1	-	-	-	-	-	-
		S2	Semua jurusan + ANT II	4	-	-	1	-	-	APBN BSDMP
		S2	Semua jurusan + ANT I	2	-	-	1	-	-	APBN BSDMP
		S2	Semua jurusan + ATT I	2	-	-	1	-	-	APBN BSDMP
SUB TOTAL				17	0	1	3	2	0	
2	Widyaiswara	DIV/S1	Transportasi	9	-	-	-	-	2	APBN BSDMP
		S1	Hukum	1	-	-	-	-	-	-
		S1	Teknik Elektro	1	-	1	-	-	-	APBN BSDMP
		S1	Teknik Sipil	1	-	-	-	-	-	-
		S1	Teknik Mesin	1	-	-	-	-	-	-
		S1	Teknik Perkapalan	1	-	-	-	-	1	APBN BSDMP
		D IV / S1	Nautika ANT III	2	-	1	1	-	-	APBN BSDMP
		D IV / S1	Teknika ATT III	2	-	1	1	-	-	APBN BSDMP
		S1	Kedokteran Umum	1	-	-	-	-	1	APBN BSDMP
SUB TOTAL				19	0	3	2	0	4	
3	Instruktur	D III	Teknik Perkapalan	1	-	-	-	1	-	APBN BSDMP
		D III	Elektronika	1	-	-	1	-	-	APBN BSDMP
		D III	Teknik Mesin	1	-	-	1	-	-	APBN BSDMP
		D III	Pemetaan	1	-	-	-	-	1	APBN BSDMP
		D III	Komputer	1	-	-	-	-	1	APBN BSDMP
		D III	ANT III	5	-	1	-	-	-	APBN BSDMP
		D III	ATT III	5	-	1	-	-	-	APBN BSDMP
		SMK	ANT Dasar	1	-	1	-	-	-	APBN BSDMP
SUB TOTAL				16	0	3	2	1	2	
TOTAL				52	0	7	7	3	6	

Tabel 4. 31 Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Tenaga Kependidikan di BPPTD Palembang

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN		KEBU- TUHAN	EKSIS- TING	KEKURANGAN	REKRUTMEN NON PNS				
		Jenjang	Jurusan				2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengemudi Kendaraan operasional	SMU/Sederajat	-	4	3	1				1	
2	Petugas Keamanan	SMU/Sederajat	-	10	10	0					
3	Teknisi Listrik	SMK	Listrik	2	1	1			1		
4	Teknisi Mesin dan Bengkel	SMK	Mesin	3	1	2			1		
5	Pustakawan	D III	Umum	2	1	1				1	
6	Pengelola Program Belajar Mengajar	D III	Umum	2	1	1				1	
7	Perawat Kesehatan	D III	Keperawatan	1	1	0					
8	Pengelola Fasilitas Laboratorium Multimedia	D III	Teknik Komputer	1	0	1				1	
9	Pengelola Fasilitas Laboratorium Nautika	D III	Nautika	1	0	1			1		
10	Pengelola Fasilitas Laboratorium Teknik	D III	Teknik	1	0	1			1		
11	Pengelola Fasilitas Laboratorium Bangunan Ka	D III	Perkapalan	1	0	1			1		
12	Pengelola Fasilitas Laboratorium Bahasa	D III	Bahasa Inggris	1	0	1					1
13	Pengelola Fasilitas Laboratorium Hidrolika	D III	Teknik Sipil	1	0	1					1
14	Teknisi Mesin Kapal	SMK	Mesin	2	0	2			1		
TOTAL				32	18	14	0	0	6	4	2

c) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali

Tabel 4. 32 Kebutuhan Tenaga Pendidik di BPPTD Bali

A.	TENAGA PENDIDIK	2015	2016	2017	2018	2019
1	POLITRADA BALI	15	24	30	30	25

Tabel 4. 33 Kebutuhan Tenaga Kependidikan di BPPTD Bali

UPT DIKLAT	TENAGA PENDIDIK	2015	2016	2017	2018	2019
POLITRADA BALI	S3	-	-	2	4	6
	S2	5	10	15	20	25
	DIKLAT TEKNIS	10	15	20	25	30

d) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal

Tabel 4. 34 Jumlah Eksisting Tenaga Pendidik dan Kependidikan di PKTJ Tegal

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	S3	1
2.	S2	25
3.	S1	44
4.	D4	14
5.	D3	34
6.	D2	24
7.	SMA/Sederajat	25
8.	SMP/Sederajat	1

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
9.	SD/Sederajat	3
Total		171

e) Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Tabel 4. 35 Rencana Pengembangan Tenaga Pendidik di API Madiun

NO	UNIT ORGANISASI	RENCANA				
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Dosen Tetap	17	18	20	22	24
2	Dosen Tidak tetap	13	15	15	15	15
	Jumlah	30	33	35	37	39

Tabel 4. 36 Rencana Pengembangan Tenaga Kependidikan di API Madiun

NO	UNIT ORGANISASI	RENCANA				
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Tenaga Administrasi	9	11	71	15	17
2	Tenaga Laboran	1	5	10	15	20
3	Tenaga Teknisi	1	3	5	7	10
4	Tenaga Pustakawan	1	3	4	5	6
	Jumlah	12	22	90	43	53

3. Pengembangan Sdm Perhubungan Laut

Bahwa SDM bidang Pelayaran adalah SDM yang kompetensinya diatur dalam standar yang berlaku secara nasional dan internasional. Dalam hal ini Peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Transportasi Laut adalah *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Convention* dan *Code*.

Pada awalnya Konvensi STCW ini pertama kalinya diadopsi pada tahun 1978, dan terakhir kali diamandemen pada tahun 2010. Amandemen 2010 atau biasa dikenal dengan sebutan amandemen Manila 2010 ini memberikan konsekuensi signifikan

kepada pendidikan kepelautan di lembaga diklat kepelautan seluruh anggota IMO, tidak terkecuali Indonesia. Kita memiliki waktu sampai dengan Januari 2017 untuk sepenuhnya memenuhi ketentuan STCW amandemen 2010. Banyak kompetensi baru dan juga program baru yang ditambahkan di dalam amandemen 2010 ini. Hal ini jelas akan sangat mempengaruhi regulasi nasional yang mengatur pendidikan kepelautan di Indonesia.

Selain Konvensi STCW, Konvensi *Safety of Life at Sea* (SOLAS) juga merupakan dasar pendidikan dan pelatihan SDM aparatur transportasi laut. Konvensi SOLAS merupakan Konvensi payung dari konvensi-konvensi internasional lainnya di bidang maritim seperti *Load Line Convention*, *Tonnage Measurement of Ship*, MARPOL dan lain lain. Implementasi dari Konvensi SOLAS menuntut pemenuhan tenaga-tenaga teknis aparatur transportasi laut sebagai SDM yang berfungsi sebagai regulator transportasi laut, sebagai SDM penyedia jasa transportasi laut dan sebagai SDM tenaga kerja di bidang transportasi laut.

Sebagai tambahan, *Maritime Labour Convention* (MLC) juga merupakan konvensi yang menuntut pemenuhan kompetensi SDM tenaga kerja di bidang transportasi laut.

A. Kebutuhan SDM Transportasi Laut

Kebutuhan SDM Perhubungan laut didasarkan pada *job profile* SDM perhubungan laut yang terdiri dari 7 fungsi yaitu:

- Fungsi 1 - *Coordination dan Negotiation*;
- Fungsi 2 - *Shipping*;
- Fungsi 3 - *Seafaring*;
- Fungsi 4 - *Sea Traffic and Shipment*;
- Fungsi 5 - *Port and Dredging*;
- Fungsi 6 - *Navigation*;
- Fungsi 7 - *Sea and Coast Guard*.

Kebutuhan SDM perhubungan laut tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tenaga negosiator dan koordinator kemaritiman (Fungsi 1 - *Coordination dan Negotiation*)

Sebagaimana diketahui, sebagai anggota IMO *council*, Indonesia memerlukan personel DELRI yang profesional. Selain itu seringkali para pelaut kita mengalami sengketa hubungan industrial yang sangat menyesakkan. Terkadang bahkan berurusan dengan keselamatan jiwa pelaut, seperti yang terjadi pada MV Sinar Kudus yang dibajak di perairan Somalia beberapa tahun yang lalu. Untuk keperluan seperti itu, diperlukan program diklat yang dapat mempersiapkan aparatur yang memiliki kemampuan bernegosiasi dengan berbagai pihak guna membela kepentingan/posisi Indonesia dan pelaut Indonesia.

b. Tenaga *shipping*/operator perusahaan angkutan laut (Fungsi 2 - *Shipping*)

Apabila kita lihat lebih dekat, perusahaan-perusahaan angkutan laut nasional baik yang merupakan BUMN maupun swasta seperti Djakarta Lloyd dan Bahtera Adhiguna dan beberapa perusahaan yang besar pada masanya akhirnya kolaps. Saat sekarang, banyak perusahaan yang mampu berdiri dengan tegak (dengan profit) biasanya memiliki manajemen berkewarganegaraan asing, atau bahkan perusahaan dengan modal asing yang didirikan di Indonesia dengan manajemen asing.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini, masih ada perusahaan angkutan laut yang hidup dari subsidi (BUMN), atau bila itu perusahaan nasional hidup dengan manajemen keluarga/tradisional yang kurang sehat, baik dari sisi profitabilitas maupun operasional keselamatan pelayaran.

Faktanya tidak ada satupun perguruan tinggi di negeri ini yang menyediakan program yang dapat mencetak para manajer handal di bidang pelayaran. Kebanyakan tenaga manager di perusahaan pelayaran adalah mereka yang berangkat dari pengalaman, atau mereka yang mengenyam pendidikan di luar negeri.

Tentunya Pusbang Perhubungan Laut juga memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengembangkan program studi/diklat yang dapat menjembatani gap ini. Baik itu membangun UPT baru maupun

mengoptimalkan UPT yang ada dengan memberikan mereka program baru dengan bobot shipping management yang lebih besar.

c. Tenaga Pelaut (Fungsi 3 - *Seafaring*)

Tenaga Pelaut ini yang selama ini menjadi fokus terbesar oleh lembaga diklat di bawah Pusbang Perhubungan Laut. Hingga saat ini ada 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepelautan, dan baru ada satu UPT yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perhubungan laut yaitu BP2TL Jakarta. Sungguhpun ada beberapa sekolah pelayaran yang dikelola oleh masyarakat swasta, namun pemenuhan standar diklat yang mereka laksanakan masih jauh dari harapan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan.

Menurut prediksi berdasarkan usia tenaga pelaut, pada 20 tahun yang akan datang (2034) terdapat 42.464 pelaut Indonesia berusia antara 59 sd 68 thn dan 23.029 pelaut berusia antara 69 sd 89 thn (melewati usia harapan hidup nasional). Artinya bahwa pelaut Indonesia dengan asumsi pertumbuhan 0 persen, akan mengakibatkan kekurangan hingga sekitar 40.000 orang dari yang ada sekarang. Padahal pada saat yang sama kebutuhan pelaut saat ini masih sangat tinggi, baik di tingkat nasional maupun Internasional (Sumber: BIMCO 2010).

Kenyataan menarik yang penting untuk disampaikan adalah bahwa diklat kepelautan di Indonesia saat ini baru menyentuh tingkat Kompetensi standar bagi pelaut sesuai jabatan tertentu untuk kapal dengan ukuran tertentu. Padahal dengan perkembangan IPTEK yang luar biasa pesatnya, jenis-jenis kapal dan teknologi yang dipergunakan dalam operasional kapal berkembang sangat pesat.

Selain itu, kemajuan teknologi yang menghasilkan kapal dengan ukuran yang lebih besar dengan muatan tertentu belum sepenuhnya dimasukan dalam program diklat kita. Untuk itu Pusbang SDM Perhubungan Laut perlu memproyeksikan pertumbuhan pelaut regular dan juga pelaut yang memiliki keahlian yang spesifik untuk jenis kapal tertentu yang dapat bersaing di pelayaran global. Pelatihan untuk tenaga pelaut lepas pantai,

pelaut-pelaut pada tingkat manajemen untuk kapal-kapal berukuran besar dan muatan yang khusus akan terus ditambah.

- d. Tenaga pengatur lalu lintas dan angkutan laut (Fungsi 4 - *Sea Traffic and Shipment*)

Saat ini di dunia pelayaran menerapkan pelayanan pengaturan lalu lintas pelayaran, *Vessel Traffic Service*. Di daerah-daerah dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi dibuat *Vessel Traffic Scheme*. Bahkan di selat Malaka sekarang diperlengkapi dengan *Maritime Electronic Highway* (MEH) dan Indonesia salah satu *host*-nya.

Untuk merancang, mengoperasikan dan mengawasi kapal-kapal di alur pelayaran tersebut dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang mampu secara presisi mengawal pergerakan setiap kapal di area tersebut.

Dengan demikian, diperlukan juga pendidikan dan pelatihan bagi tenaga-tenaga yang dipersiapkan untuk menangani tugas tersebut. Sebuah training centre di Pulau Batam atau di Jakarta akan sangat membantu menangani kebutuhan ini.

- e. Tenaga kepelabuhanan dan pengerukan (Fungsi 5-Port and Dredging)

Aparatur yang menangani manajemen pelabuhan dari sisi kesyahbandaran saat ini adalah syahbandar/otoritas pelabuhan, sedangkan dari sisi bisnis adalah operator pelabuhan. Untuk memenuhi SDM yang mampu mengisi kebutuhan ini, diperlukan banyak sekali kompetensi. Seperti kesyahbandaran (menyesuaikan kelas pelabuhan), inspektur maritim, ahli ukur kapal, dan lain-lain.

Sedangkan pemeliharaan pelabuhan dari sisi engineering dermaga dan pemeliharaan alur/kedalaman kolam pelabuhan saat ini masih berharap pada sarjana teknik sipil, yang pada tataran tertentu masih memerlukan tambahan kompetensi untuk mampu menangani pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan dan lingkungan sekitarnya.

Saat ini terdapat lebih dari 2.300 pelabuhan di seluruh wilayah NKRI dan akan terus bertambah seiring dengan pembangunan yang semakin merata, namun hal ini belum diimbangi dengan pertumbuhan tenaga yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan pelabuhan.

Program-program diklat baru seperti port management, ship management, dan kompetensi di bidang pemeliharaan lingkungan pelabuhan termasuk pengerukan (dredging), dan penanggulangan polusi pelabuhan, perlu untuk dibuka dan dikembangkan.

f. Tenaga bagi aparaturnavigasi (Fungsi 6 - *Navigation*)

Saat ini, masih banyak kekurangan tenaga pengawas dan penjaga suar di daerah terpencil, di pulau-pulau terluar dan di wilayah Alur Laut Indonesia. Namun, apabila sarana bantu navigasi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini tidak dirancang, dibangun, dioperasikan dan diawasi oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya, maka Indonesia dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota UNCLOS dalam menyediakan *Sea Lane*.

Banyak sarana bantu navigasi tidak sesuai antara spesifikasi teknis yang terdapat di dalam publikasi navigasi dengan yang ada di lapangan. Lampu suar dengan jarak tampak lebih lemah/dekat dari yang ada di peta, atau pelampung/buoy yang hanyut dan bergeser dari posisi yang telah diplot di peta tentu akan menyesatkan pelaut yang menavigasikan kapal dan membahayakan pelayaran.

SDM yang mumpuni dalam bidang ini masih sangat sedikit jumlahnya karena diklat yang terstruktur untuk ahli-ahli bidang ini belum dilembagakan secara optimal. Oleh karena itu Pusbang Laut merasa perlu untuk merancang program diklat semacam ini di BP2TL (Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut) yang akan disebar di wilayah Indonesia. Sehingga Aparatur Navigasi dapat ditingkatkan kompetensinya. Pengembangan/penambahan organisasi BP2TL (Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut) merupakan rencana jangka menengah Pusbang Laut.

g. Tenaga Penjaga Laut dan Pantai (Fungsi 7 - *Sea and Coast Guard*)

Semenjak UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran diterbitkan, ada amanat yang belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, yaitu pembentukan *Sea and Coast Guard*. Untuk mempersiapkan

pembentukan *Sea and Coast Guard* tersebut tentu tidak serta merta dibentuk tanpa mempersiapkan SDM yang kompeten.

Apabila dipandang perlu, Kementerian Perhubungan melalui BPSDMP dapat membangun lembaga khusus yang mendidik dan melatih personil *Sea and Coast Guard* dengan melibatkan tenaga dari semua pihak yang menangani keamanan pantai dan pelabuhan untuk menjadi tenaga pengajar/instrukturnya. Hal ini sangat strategis mengingat *Sea and Coast Guard* butuh banyak tenaga.

B. Target Lulusan

a. PPSDM Perhubungan Laut

1) Diklat Pengembangan SDM Pendidik

Tabel 4. 37 Target Lulusan Diklat Teknis Fungsional Pendidik

NO	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL PENDIDIK	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	TOT for Assessor and Examiner (IMO Model Course 3.12)	90	90	90	90	90
2	TOT Penyuluh Penyelenggaraan Diklat Transportasi	60	60	60	60	60
3	TOT Auditor Quality Standards System	60	60	60	60	60
4	TOT Penyuluh Operator Sarana Transportasi Laut	60	60	60	60	60
5	Pelatihan Penyusunan Kurikulum, Silabus dan RPP	60	60	60	60	60
6	Pelatihan Penyusunan bahan ajar	60	60	60	60	60
7	Pelatihan Penilaian Pembelajaran	60	60	60	60	60
8	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian	60	60	60	60	60
9	Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah Terapan	60	60	60	60	60
10	Pelatihan Penilaian Kompetensi Berbasis Simulator	30	30	30	30	30
TOTAL		690	690	690	690	690

2) Diklat Pengembangan SDM Tenaga Kependidikan

Tabel 4. 38 Target Lulusan Diklat Teknis Fungsional Tenaga Kependidikan

NO	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelatihan Pengelola Simulator Kepelautan	30	30	30	30	30
2	Pelatihan Pengelola Laboratorium Kepelautan	30	30	30	30	30
3	Pelatihan Pengelola Kapal Latih	30	30	30	30	30
4	Pelatihan Penerbitan Sertifikat DKKP	30	30	30	30	30
5	Pelatihan Pengelola IMO Publications	30	30	30	30	30
6	Pelatihan Teknisi Simulator Kepelautan	30	30	30	30	30

NO	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
7	Pelatihan Teknisi Laboratorium Kepelautan	30	30	30	30	30
8	Pelatihan Manajemen Diklat Keterampilan Khusus Pelaut	60	60	60	60	60
9	Pelatihan Manajemen Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	60	60	60	60	60
10	Pelatihan Manajemen Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	60	60	60	60	60
TOTAL		390	390	390	390	390

3) TOT Pengajar Diklat ASN Transportasi Laut

Tabel 4. 39 Target Lulusan Diklat Teknis Fungsional

NO	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Marine Inspector Type A	30	30	30	30	30
2	Marine Inspector Type B	30	30	30	30	30
3	Kesyahbandaran Klas A	30	30	30	30	30
4	Kesyahbandaran Klas B	30	30	30	30	30
5	TTPL Tingkat Madya	30	30	30	30	30
6	TTPL Tingkat Pratama	30	30	30	30	30
7	Kepelabuhanan	30	30	30	30	30
8	Ketatalaksanaan Angkutan Laut	30	30	30	30	30
9	SBNP Tingkat Terampil	30	30	30	30	30
10	Dasar Bintara KPLP	30	30	30	30	30
11	Dasar Perwira KPLP	30	30	30	30	30
12	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	30	30	30	30	30
13	Penceg. & Penangg. Pencemaran	30	30	30	30	30
14	Pengukuran Kapal	30	30	30	30	30
15	Marine Inspector Radio	30	30	30	30	30
16	Penilikan Gambar Rancang Bangun Kapal	30	30	30	30	30
17	Dasar-Dasar Kesyahbandaran	30	30	30	30	30
18	Pengukuran Kapal Dibawah 7 GT	30	30	30	30	30
19	Kesyahbandaran Perikanan Untuk Pelabuhan Perikanan	30	30	30	30	30
20	Kenavigasian Untuk Auditor	30	30	30	30	30
21	Kesyahbandaran Untuk Auditor	30	30	30	30	30
22	Kepelabuhanan Untuk Auditor	30	30	30	30	30
23	Ketatalaksanaan Agk. Laut Untuk Auditor	30	30	30	30	30
24	Auditor ISM Code	30	30	30	30	30
25	Pengawas Pemanduan	30	30	30	30	30
26	VTS Operator	30	30	30	30	30
27	Maritime English	30	30	30	30	30
28	Compass Eren	30	30	30	30	30
29	Port Agency	30	30	30	30	30
30	Penyelenggara Pelabuhan	30	30	30	30	30

NO	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
31	Sertifikasi radio Elektronika (SRE-II)	30	30	30	30	30
32	Sea and Coast guard	30	30	30	30	30
TOTAL		960	960	960	960	960

b. STIP Jakarta

1) Keahlian

Tabel 4. 40 Target Lulusan Diklat Keahlian STIP

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	DIKLAT PEMBENTUKAN KOMPETENSI PELAYARAN	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
1	Pendidikan Diploma - IV Pelayaran	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
a	Program Studi Keahlian Nautika	800	800	800	800	800
b	Program Studi Keahlian Teknika	540	540	540	540	540
c	Program Studi Keahlian Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	270	270	270	270	270
II	DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	780	780	900	900	900
1	Bidang Keahlian Nautika	480	480	540	540	540
a	Diklat Pelaut - I (DP - I / ANT - I)	150	150	180	180	180
b	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	180	180	180	180	180
c	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	150	150	180	180	180
2	Bidang keahlian Teknika	300	300	360	360	360
a	Diklat Pelaut - I (DP - I / ATT - I)	90	90	120	120	120
b	Diklat Pelaut - II (DP - II / ATT - II)	90	90	120	120	120
c	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	120	120	120	120	120
TOTAL		2.390	2.390	2.510	2.510	2.510

2) Pemutakhiran

Tabel 4. 41 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran STIP

NO	JENIS DIKLAT PEMUTAKHIRAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	7.500	8.750	10.000	7.250	4.000
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ANT - I)	2.000	2.500	3.000	2.000	1.000
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	2.500	3.000	3.500	2.500	1.500
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	3.000	3.250	3.500	2.750	1.500
2	Bidang Keahlian Teknika	7.250	8.750	10.000	7.250	4.000
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ATT - I)	2.000	2.500	3.000	2.000	1.000
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ATT - II)	2.500	3.000	3.500	2.500	1.500
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	2.750	3.250	3.500	2.750	1.500
TOTAL		14.750	17.500	20.000	14.500	8.000

Tabel 4. 42 Target Lulusan Diklat Penyegaran STIP

NO	JENIS DIKLAT PENYERAGARAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	500	550	600	650	700
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	500	550	600	650	700
2	Bidang Keahlian Teknika	2.500	3.000	3.500	2.500	1.500
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ATT - II)	2.500	3.000	3.500	2.500	1.500
TOTAL		3.000	3.550	4.100	3.150	2.200

3) Teknis

Tabel 4. 43 Target Lulusan Diklat Teknis STIP

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training/ BST)	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
2	Diklat Keterampilan Penggunaan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong selain Sekoci Penolong Cepat. Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats other than Fast Rescue Boat / PSCRB)	3.500	3.675	3.859	4.052	4.254
3	Diklat Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Fast Rescue Boat /PFRB)	125	131	138	145	152
4	Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (Advanced Fire Fighting / AFF)	5.100	5.355	5.623	5.904	6.199
5	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid / MFA)	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
6	Diklat Perawatan Medis (Medical Care / MC)	500	525	551	579	608
7	Diklat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer / SSO)	375	394	413	434	456
8	Diklat Manajemen Pengendali Massa (Crowd Management Training / CMT)	375	394	413	434	456
9	Diklat Manajemen Krisis dan Perilaku Manusia (Crisis Management and Human Behaviour Training / CMHBT)	375	394	413	434	456
10	Diklat Keselamatan Penumpang, Muatan dan Kekedapan Lambung (Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training / PS, CS and HIT)	30	32	33	35	36
11	Diklat Kepedulian Keamanan (Security Awareness Training / SAT)	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431
12	Diklat Kepedulian Keamanan untuk Pelaut dengan Tugas Jaga Keamanan (Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties / SATSDSD)	1.250	1.313	1.378	1.447	1.519
13	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (Electronic Chart Display and Information System / ECDIS)	1.200	1.260	1.323	1.389	1.459
14	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (Bridge Resource Management / BRM)	1.200	1.260	1.323	1.389	1.459
15	Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (Engine Room Resource Management / ERM)	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
16	Diklat Kapal Tangki : (Tanker Proficiency Training) :					
	a. Diklat Dasar Kapal Tangki Minyak dan Kimia (Basic Oil and Chemical Tanker /BOCT)	1.500	1.575	1.654	1.736	1.823
	b. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations /AOTCO)	1.020	1.071	1.125	1.181	1.240
	c. Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair (Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation / LGTCO)	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
	d. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operation /ACTCO)	500	525	551	579	608
18	e. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair Tingkat Lanjutan (Advance Liquefied Gas Tanker Cargo Operations/ALGTCO)	450	473	496	521	547
	Diklat Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis (Dynamic Positioning System Training) :					
	a. Diklat Personil Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis Tingkat Dasar	0	0	0	0	0

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	(Personel Operating Basic Dynamic Positioning System Training/POBDPST)					
	b. Diklat Personil Pengoperasian Sistim Posisi Dinamis Tingkat Lanjutan (Personel Operating Advanced Dynamic Positioning System Training/ POADPSDT)	0	0	0	0	0
19	Diklat Pengoperasian Kapal pada Daerah Kutub : (Ship Operating in Polar Water Training)					
	a. Diklat Pengoperasian Kapal Pada Daerah Kutub untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi (Training for Masters and Officers in Charge of a Navigational Watch of Ships Operating in Polar Water)	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
	b. Diklat Pengoperasian Kapal Pada Daerah Kutub untuk Kepala Kamar Mesin dan Perwira Dinas Jaga Mesin Kapal (Training For Chief Engineer And Officer In Charge Of An Engineering Watchkeeping Of Ships Operating In Polar Water)	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
20	Diklat RADAR Simulator (RADAR Simulator Training / RS)	184	193	203	213	224
21	Diklat ARPA Simulator (ARPA Simulator Training / AS)	184	193	203	213	224
	a. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating (Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Packaged Form)	90	95	99	104	109
	b. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Muatan Curah Kering Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating (Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk)	90	95	99	104	109
23	GMDSS (General Maritime Distress Signal System)	50	53	55	58	61
24	CSO (Company Security Officer)	184	193	203	213	224
25	PFSO (Port Facility Security Officer)	184	193	203	213	224
26	LNG Familiarization Course	100	105	110	116	122
27	LNG Standard training course	100	105	110	116	122
28	Welding Machine	100	105	110	116	122
29	Deck Practical Skill	100	105	110	116	122
30	Engine Practical Skill	100	105	110	116	122
31	Lathe Machine Practical	100	105	110	116	122
32	FST (Familiarization Safety Training)	60	63	66	69	73
33	Marine Electricity	50	53	55	58	61
34	Lifeboat Familiarization	50	53	55	58	61
35	English Maritime	50	53	55	58	61
36	COAXWAIN	40	42	44	46	49
37	Basic Safety Survival	40	42	44	46	49
38	Praktek Taruna Swasta Jurusan Nautika	200	210	221	232	243
39	Praktek Taruna Swasta Jurusan Teknik	200	210	221	232	243
TOTAL		36.756	38.594	40.523	42.549	44.678

c. BP3IP Jakarta

1) Peningkatan

Tabel 4. 44 Target Lulusan Diklat Peningkatan BP3IP

NO	JENIS DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	3.900	3.930	3.960	4.650	4.800
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ANT - I)	360	360	360	420	420
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	270	270	270	330	390
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	270	270	270	330	390

NO	JENIS DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	360	360	360	540	540
E	Diklat Pelaut - V (DP - V / ANT - V)	1.830	1.860	1.890	2.070	2.100
F	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSD)	810	810	810	960	960
2	Bidang keahlian Teknika	2.580	2.610	2.670	2.940	3.120
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ATT - I)	360	360	360	420	450
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ATT - II)	270	270	270	360	420
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	180	180	180	210	210
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	270	270	270	300	330
E	Diklat Pelaut - V (DP - V / ATT - V)	1.080	1.110	1.140	1.170	1.200
F	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSE)	420	420	450	480	510
TOTAL		6.480	6.540	6.630	7.590	7.920

2) Pemutakhiran

Tabel 4. 45 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP3IP

NO	JENIS DIKLAT PEMUTAKHIRAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	5.000	5.000	4.270	4.120	0
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ANT - I)	840	840	350	300	0
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	840	840	600	500	0
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	840	840	840	840	0
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	840	840	840	840	0
E	Diklat Pelaut - V (DP - V / ANT - V)	840	840	840	840	0
F	Diklat Pelaut - Dasar (DP - D / ANT - D)	800	800	800	800	0
2	Bidang Keahlian Teknika	5.000	5.000	4.270	4.120	0
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ATT - I)	840	840	350	300	0
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ATT - II)	840	840	600	500	0
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	840	840	840	840	0
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	840	840	840	840	0
E	Diklat Pelaut - V (DP - V / ATT - V)	840	840	840	840	0
F	Diklat Pelaut - Dasar (DP - D / ATT - D)	800	800	800	800	0
TOTAL		10.000	10.000	8.540	8.240	0

3) Teknis

Tabel 4. 46 Target Lulusan Diklat Teknis BP3IP

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid/MFA)	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
2	Diklat Perawatan Medis (Medical Care/MC)	900	900	900	900	900
3	Diklat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer/SSO)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Diklat Manajemen Pengendali Massa (Crowd Management Training/CMT)	90	90	90	90	90
5	Diklat Manajemen Krisis dan Perilaku Manusia (Crisis Management and Human Behaviour Training/CMHBT)	90	90	90	90	90
10	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (Electronic Chart Display and Information System /ECDIS)	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
11	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (Bridge Resource Management/BRM)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
12	Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (Engine Room Resource Management/ERM)	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
13	a. Diklat Dasar Kapal Tangki Minyak dan Kimia (Basic Oil and Chemical Tanker /BOCT)	660	660	660	660	660
	b. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations/AOTCO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	c. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations/ACTCO)	60	60	60	60	60
	d. Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair (Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations/BLGTCO)	120	120	120	120	120
14	Diklat RADAR Simulator (RADAR Simulator Training/RS)	720	720	720	720	720
15	Diklat ARPA Simulator (ARPA Simulator Training/AS)	700	720	740	760	780
TOTAL		32.420	33.920	34.040	34.160	34.280

d. PIP Semarang

1) Keahlian

Tabel 4. 47 Target Lulusan Diklat Keahlian PIP Semarang

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	DIKLAT PEMBENTUKAN KOMPETENSI PELAYARAN	1.620	1.620	1.560	1.560	1.560
1	Pendidikan Diploma - IV Pelayaran	1.620	1.620	1.560	1.560	1.560
A	Program Studi Keahlian Nautika	660	660	660	660	660
B	Program Studi Keahlian Teknika	660	660	660	660	660
C	Program Studi Keahlian Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	240	240	240	240	240
D	Diklat Pelaut Non Diploma	60	60	0	0	0
II	DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	900	900	900	900	900
1	Bidang Keahlian Nautika	450	450	450	450	450
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ANT - I)	60	60	60	60	60
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	150	150	150	150	150
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT-III)	90	90	90	90	90
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT-IV)	150	150	150	150	150
2	Bidang keahlian Teknika	450	450	450	450	450
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ATT - I)	60	60	60	60	60
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ATT - II)	150	150	150	150	150
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT- III)	90	90	90	90	90
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT-IV)	150	150	150	150	150
TOTAL		2.520	2.520	2.460	2.460	2.460

2) Pemutakhiran

Tabel 4. 48 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran PIP Semarang

NO	JENIS DIKLAT PEMUTAKHIRAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ANT - I)	720	720	720	720	720
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV/ ANT - IV)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	Bidang Keahlian Teknika	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ATT - I)	720	720	720	720	720
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ATT - II)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV/ ATT - IV)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
TOTAL		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

3) Teknis

Tabel 4. 49 Target Lulusan Diklat Teknis PIP Semarang

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training/BST)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	Diklat Keterampilan Penggunaan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong selain Sekoci Penolong Cepat. Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats other than Fast Rescue Boat /PSCRB)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Diklat Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Fast Rescue Boat/PFRB)	150	150	150	150	150
4	Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (Advanced Fire Fighting/AFF)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid/MFA)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Diklat Perawatan Medis (Medical Care/MC)	480	480	480	480	480
7	Diklat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer/SSO)	360	360	360	360	360
8	Diklat Manajemen Pengendali Massa (Crowd Management Training/CMT)	150	150	150	150	150
10	Diklat Manajemen Krisis dan Perilaku Manusia (Crisis Management and Human Behaviour Training/CMHBT)	150	150	150	150	150
11	Diklat Keselamatan Penumpang, Muatan dan Kekedapan Lambung (Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training/PS, CS and HIT)	150	150	150	150	150
12	Diklat Kepedulian Keamanan (Security Awareness Training/SAT)	150	150	150	150	150
13	Diklat Kepedulian Keamanan untuk Pelaut dengan Tugas Jaga Keamanan (Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties/SATSDSD)	150	150	150	150	150

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
14	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (<i>Electronic Chart Display and Information System/ECDIS</i>)	390	390	390	390	390
15	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (<i>Bridge Resource Management/BRM</i>)	390	390	390	390	390
16	Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (<i>Engine Room Resource Management/ERM</i>)	390	390	390	390	390
17	GOC-GMDSS	150	150	150	150	150
18	ROC-GMDSS	75	75	75	75	75
19	Diklat Kapal Tangki : (<i>Tanker Proficiency Training</i>) :					
	a. Diklat Dasar Kapal Tangki Minyak dan Kimia (<i>Basic Oil and Chemical Tanker/BOCT</i>)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	b. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan (<i>Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations/AOTCO</i>)	530	530	530	530	530
	c. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan (<i>Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations/ACTCO</i>)	0	0	0	0	0
	d. Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair (<i>Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations /BLGTCO</i>)	0	0	0	0	0
	e. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair Tingkat Lanjutan (<i>Advance Liquefied Gas Tanker Cargo Operations/ALGTCO</i>)	0	0	0	0	0
20	Diklat Anjungan Lepas Pantai : (<i>Offshore Supply Vessel Training</i>)					
	a. Diklat Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai Untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi (<i>Training Of Masters And Officers In Charge Of A Navigational Watch On Board Offshore Supply Vessels</i>)	0	0	0	0	0
	b. Diklat Operasi Penanganan Jangkar Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi (<i>Offshore Supply Vessels Performing Anchor-Handling Operations for Masters and Officers in Charge of Navigational Watch</i>)	0	0	0	0	0
21	Diklat Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis (<i>Dynamic Positioning System Training</i>) :					
	a. Diklat Personil Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis Tingkat Dasar (<i>Personel Operating Basic Dynamic Positioning System Training/POBDPST</i>)	100	200	200	200	200
	b. Diklat Personil Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis Tingkat Lanjutan (<i>Personel Operating Advanced Dynamic Positioning System Training / POADPSDT</i>)	25	50	50	50	50
22	Diklat Pengoperasian Kapal pada Daerah Kutub : (<i>Ship Operating in Polar Water Training</i>)					
	a. Diklat Pengoperasian Kapal Pada Daerah Kutub untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi (<i>Training for Masters and Officers in Charge of a Navigational Watch of Ships Operating in Polar Water</i>)	0	0	0	0	0
	b. Diklat Pengoperasian Kapal Pada Daerah Kutub untuk Kepala Kamar Mesin dan Perwira Dinas Jaga Mesin Kapal (<i>Training For Chief Engineer And Officer In Charge Of An Engineering Watchkeeping Of Ships Operating In Polar Water</i>)	0	0	0	0	0
23	Diklat RADAR Simulator (<i>RADAR Simulator Training/RS</i>)	150	150	150	150	150
24	Diklat ARPA Simulator (<i>ARPA Simulator Training/AS</i>)	150	150	150	150	150
25	Diklat Penanganan Paket Muatan Berbahaya dan Beracun : (<i>Cargo Handling on Ship Ships Carrying Dangerous And Hazardous Substances In Packaged Form</i>)					

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	a. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating (Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Packaged Form)	30	30	30	30	30
	b. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Muatan Curah Kering Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating (Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk)	30	30	30	30	30
TOTAL		38.860	38.985	38.985	38.985	38.985

NO	JENIS DIKLAT PELATIHAN PRAKTEK	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelatihan Lab & simulator TK III	450	450	450	450	450
2	Pelatihan Lab & simulator TK IV	990	990	990	990	990
4	Pengurusan sign on Tingkat III	600	600	600	600	600
5	Pengurusan sign on Tingkat IV	300	300	300	300	300
TOTAL		2.340	2.340	2.340	2.340	2.340

e. PIP Makassar

1) Keahlian

Tabel 4. 50 Target Lulusan Diklat Keahlian PIP Makassar

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	DIKLAT PEMBENTUKAN KOMPETENSI PELAYARAN	2.367	2.403	2.443	2.487	2.534
1	Pendidikan Diploma - IV Pelayaran	1.430	1.573	1.730	1.903	2.094
A	Program Studi Keahlian Nautika	619	681	749	824	907
B	Program Studi Keahlian Teknika	690	759	835	918	1.010
C	Program Studi Keahlian Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	121	133	146	161	177
II	DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	704	774	852	937	1.031
1	Bidang Keahlian Nautika	352	387	426	469	515
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ANT - I)	66	73	80	88	97
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	143	157	173	190	209
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	143	157	173	190	209
2	Bidang keahlian Teknika	352	387	426	469	515
A	Diklat Pelaut - I (DP - I / ANT - I)	66	73	80	88	97
B	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	143	157	173	190	209
C	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	143	157	173	190	209
TOTAL		3.071	3.178	3.295	3.424	3.565

2) Pemutakhiran

Tabel 4. 51 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran PIP Makassar

NO	JENIS DIKLAT PEMUTAKHIRAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	435	653	979	435	479
A	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	240	360	540	240	264
B	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	195	293	439	195	215
2	Bidang Keahlian Teknika	435	653	979	435	479
A	Diklat Pelaut - II (DP - II / ATT - II)	240	360	540	240	264
B	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	195	293	439	195	215
TOTAL		870	1.305	1.958	870	957

3) Teknis

Tabel 4. 52 Target Lulusan Diklat Teknis PIP Makassar

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training/BST)	1.881	2.257	2.709	3.251	3.901
2	Diklat Keterampilan Penggunaan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong selain Sekoci Penolong Cepat. Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats other than Fast Rescue Boat/PSCRB)	1.536	1.843	2.212	2.654	3.185
3	Diklat Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Fast Rescue Boat/PFRB)	30	60	90	120	150
4	Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (Advanced Fire Fighting/AFF)	956	1.147	1.377	1.652	1.982
5	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid/MFA)	1.073	1.288	1.546	1.855	2.226
6	Diklat Perawatan Medis (Medical Care/MC)	551	661	793	952	1.142
7	Diklat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer/SSO)	389	467	560	673	807
8	Diklat Manajemen Pengendali Massa (Crowd Management Training/CMT)	30	60	90	120	150
10	Diklat Manajemen Krisis dan Perilaku Manusia (Crisis Management and Human Behaviour Training/CMHBT)	30	60	90	120	150
11	Diklat Keselamatan Penumpang, Muatan dan Kekedapan Lambung (Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training/PS, CS and HIT)	30	60	90	120	150
12	Diklat Kepedulian Keamanan (Security Awareness Training/SAT)	30	60	90	120	150
13	Diklat Kepedulian Keamanan untuk Pelaut dengan Tugas Jaga Keamanan (Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties/SATSDSD)	30	60	90	120	150
14	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (Electronic Chart Display and Information System /ECDIS)	306	367	441	529	634
15	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (Bridge Resource Management BRM)	151	181	217	260	312
16	Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (Engine Room Resource Management/ERM)	30	60	90	120	150
17	Diklat Operator Radio Umum General Operator Certificate of GMDSS/GOC - GMDSS	286	344	412	495	594
18	Diklat Operator Radio Terbatas Restricted Operator Certificate of GMDSS/ROC - GMDSS	110	132	159	190	228
19	Diklat Manajemen Keselamatan Pelayaran International Safety Code Management /ISM -Code	546	655	786	943	1.132
TOTAL		7.996	9.763	11.841	14.293	17.194

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT (REVALIDASI)	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training/BST)	1.013	1.216	1.459	1.751	2.101

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT (REVALIDASI)	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Diklat Keterampilan Penggunaan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong selain Sekoci Penolong Cepat. Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats other than Fast Rescue Boat/PSCRB)	617	740	888	1.066	1.279
4	Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (Advanced Fire Fighting/AFF)	563	676	811	973	1.167
5	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid/MFA)	528	633	760	912	1.094
6	Diklat Perawatan Medis (Medical Care/MC)	357	429	515	618	741
7	Diklat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer/SSO)	150	180	216	259	311
14	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (Electronic Chart Display and Information System/ECDIS)	30	60	60	120	250
15	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (Bridge Resource Management/BRM)	30	60	60	120	250
17	Diklat Operator Radio Umum General Operator Certificate of GMDSS/GOC - GMDSS	277	332	398	478	574
18	Diklat Operator Radio Terbatas Restricted Operator Certificate of GMDSS/ROC - GMDSS	30	30	60	60	90
19	Diklat Kapal Tangki : (Tanker Proficiency Training) :	929	1211	1525	1878	2278
	a. Diklat Dasar Kapal Tangki Minyak dan Kimia (Basic Oil and Chemical Tanker /BOCT)	809	971	1165	1398	1678
	b. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations/AOTCO)	30	60	90	120	150
	c. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations/ACTCO)	30	60	90	120	150
	d. Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair (Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations/ BLGTCO)	30	60	90	120	150
	e. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair Tingkat Lanjutan (Advance Liquefied Gas Tanker Cargo Operations/ALGTCO)	30	60	90	120	150
20	Diklat Anjungan Lepas Pantai : (Offshore Supply Vessel Training)	60	120	180	240	300
	a. Diklat Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai Untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi (Training Of Masters And Officers In Charge Of A Navigational Watch On Board Offshore Supply Vessels)	30	60	90	120	150
	b. Diklat Operasi Penanganan Jangkar Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi (Offshore Supply Vessels Performing Anchor-Handling Operations for Masters and Officers in Charge of Navigational Watch)	30	60	90	120	150
21	Diklat Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis (Dynamic Positioning System Training) :	60	120	180	240	300
	a. Diklat Personil Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis Tingkat Dasar (Personel Operating Basic Dynamic Positioning System Training /POBDPST)	30	60	90	120	150
	b. Diklat Personil Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis Tingkat Lanjutan (Personel Operating Advanced Dynamic Positioning System Training /POADPSDT)	30	60	90	120	150
22	Diklat Pengoperasian Kapal pada Daerah Kutub : (Ship Operating in Polar Water Training)	60	120	180	240	300
	a. Diklat Pengoperasian Kapal pada Daerah Kutub untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi	30	60	90	120	150

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT (REVALIDASI)	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	<i>(Training for Masters and Officers in Charge of a Navigational Watch of Ships Operating in Polar Water)</i>					
	b. Diklat Pengoperasian Kapal Pada Daerah Kutub untuk Kepala Kamar Mesin dan Perwira Dinas Jaga Mesin Kapal <i>(Training For Chief Engineer And Officer In Charge Of An Engineering Watchkeeping Of Ships Operating In Polar Water)</i>	30	60	90	120	150
23	Diklat RADAR Simulator (RADAR Simulator Training/RS)	392	470	564	677	812
24	Diklat ARPA Simulator (ARPA Simulator Training/AS)	404	485	582	698	838
	Diklat Penanganan Paket Muatan Berbahaya dan Beracun : (Cargo Handling on Ship Ships Carrying Dangerous And Hazardous Substances In Packaged Form)	60	120	180	240	300
25	a. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating <i>(Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Packaged Form)</i>	30	60	90	120	150
	b. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Muatan Curah Kering Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating <i>(Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk)</i>	30	60	90	120	150
26	Diklat Kapal Tangki : (Tanker Proficiency Training) :	136	163	196	235	282
	Diklat Dasar Kapal Tangki Minyak dan Kimia <i>(Basic Oil and Chemical Tanker /BOCT)</i>	136	163	196	235	282
27	Diklat RADAR Simulator (RADAR Simulator Training/RS)	273	328	393	472	566
28	Diklat ARPA Simulator (ARPA Simulator Training/AS)	268	322	386	463	556
TOTAL		6.237	7.814	9.593	11.739	14.389

f. POLTEKPEL Surabaya

1) Keahlian

Tabel 4. 53 Target Lulusan Diklat Keahlian PP Surabaya

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	DIKLAT PEMBENTUKAN KOMPETENSI PELAYARAN	720	690	900	1170	1170
1	Pendidikan Diploma - III Pelayaran	0	270	240	240	240
A	Program Studi Keahlian Nautika	-	120	90	90	90
B	Program Studi Keahlian Teknika	-	120	90	90	90
C	Program Studi Keahlian Electro Technical Officer	-	30	60	60	60
2	Pendidikan Diploma - IV Pelayaran	0	0	0	270	270
A	Program Studi Keahlian Nautika	-	-	-	120	120
B	Program Studi Keahlian Teknika	-	-	-	120	120
C	Program Studi Keahlian Electro Technical Officer	-	-	-	30	30
3	Pendidikan Non Diploma	720	420	660	660	660
E	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	210	210	210	210	210
F	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	210	210	210	210	210
G	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	150	-	120	120	120
H	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	150	-	120	120	120
II	DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	810	990	990	990	990
1	Bidang Keahlian Nautika	360	450	450	450	450
A	Diklat Pelaut - II (DP - II / ANT - II)	30	60	60	60	60

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
B	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	60	90	90	90	90
C	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	60	90	90	90	90
D	Diklat Pelaut - V (DP - V / ANT - V)	210	210	210	210	210
2	Bidang keahlian Teknika	450	540	540	540	540
A	Diklat Pelaut - II (DP - II / ATT - II)	30	60	60	60	60
B	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	60	60	60	60	60
C	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	180	210	210	210	210
D	Diklat Pelaut - V (DP - V / ATT - V)	180	210	210	210	210
TOTAL		1.440	1.110	1.560	1.830	1.830

2) Pemutakhiran

Tabel 4. 54 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran PP Surabaya

NO	JENIS DIKLAT PEMUTAKHIRAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	780	900	1170	960	900
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	150	180	300	210	180
B	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	180	210	240	240	210
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ANT - V)	360	390	420	420	420
D	Diklat Pelaut - D (DP - D / ANT - D)	90	120	210	90	90
2	Bidang Keahlian Teknika	720	840	960	930	780
B	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	150	180	210	210	180
C	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	180	210	240	240	210
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ATT - V)	300	330	390	390	300
D	Diklat Pelaut - D (DP - D / ATT - D)	90	120	120	90	90
TOTAL		1.500	1.740	2.130	1.890	1.680

3) Teknis

Tabel 4. 55 Target Lulusan Diklat Teknis PP Surabaya

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training/BST)	5.208	5.225	5.250	5.275	5.300
2	Diklat Keterampilan Penggunaan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong selain Sekoci Penolong Cepat. Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats other than Fast Rescue Boat/PSCRB)	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
3	Diklat Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Fast Rescue Boat/PFRB)	0	0	0	0	0
4	Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (Advanced Fire Fighting/AFF)	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid/MFA)	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Diklat Perawatan Medis (Medical Care/MC)	200	210	220	230	240
7	Diklat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer/SSO)	125	200	210	220	230
8	Diklat Manajemen Pengendali Massa (Crowd Management Training/CMT)	300	380	400	425	450
9	Diklat Manajemen Krisis dan Perilaku Manusia (Crisis Management and Human Behaviour Training/ CMHBT)	300	400	410	435	460
10	Diklat Keselamatan Penumpang, Muatan dan Kekedapan Lambung (Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training/PS, CS and HIT)	600	600	600	600	600

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
11	Diklat Kepedulian Keamanan (Security Awareness Trainin /SAT)	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320
12	Diklat Kepedulian Keamanan untuk Pelaut dengan Tugas Jaga Keamanan (Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties/ SATSDSD)	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320
13	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (Electronic Chart Display and Information System/ECDIS)	600	700	710	720	730
14	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (Bridge Resource Management/BRM)	100	200	225	250	275
15	Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (Engine Room Resource Management /ERM)	100	200	225	250	275
16	Diklat Kapal Tangki : (Tanker Proficiency Training) :	600	850	945	1.200	1.450
	a. Diklat Dasar Kapal Tangki Minyak dan Kimia (Basic Oil and Chemical Tanker/BOCT)	150	200	210	300	350
	b. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation /AOTCO)	150	200	210	300	350
	c. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operation/ACTCO)	100	150	175	200	250
	d. Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair (Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation/BLGTCO)	100	150	175	200	250
	e. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair Tingkat Lanjutan (Advance Liquefied Gas Tanker Cargo Operations/ALGTCO)	100	150	175	200	250
20	Diklat RADAR Simulator (RADAR Simulator Training/RS)	90	100	110	120	130
21	Diklat ARPA Simulator (ARPA Simulator Training/AS)	90	100	110	120	130
22	Diklat Penanganan Paket Muatan Berbahaya dan Beracun : (Cargo Handling on Ship Ships Carrying Dangerous And Hazardous Substances In Packaged Form)	0	0	0	0	0
	a. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating (Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Packaged Form)					
	b. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Muatan Curah Kering Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating (Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk)					
TOTAL		16.513	18.955	19.550	20.485	21.410

g. BP2IP Tangerang

1) Keahlian

Tabel 4. 56 Target Lulusan Diklat Keahlian BP2IP Tangerang

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	DIKLAT PEMBENTUKAN KOMPETENSI PELAYARAN	930	1.050	1.260	1.350	1.410
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	150	180	210	210	240
B	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	150	180	180	210	210

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
C	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	210	240	240	270	300
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	150	180	180	210	210
E	Diklat Pelaut - Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DP - Rating Dinas Navigasi/WRNW)	180	180	270	270	270
F	Diklat Pelaut - Rating Dinas Jaga Mesin (DP - Rating Dinas Jaga Kamar Mesin/WRER)	90	90	180	180	180
II	DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	570	570	660	750	750
1	Bidang Keahlian Nautika	330	330	420	480	480
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	30	30	30	60	60
B	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	30	30	30	60	60
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ANT - V)	90	90	180	180	180
D	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSD)	180	180	180	180	180
2	Bidang keahlian Teknika	240	240	240	270	270
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	30	30	30	60	60
B	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	30	30	30	30	30
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ATT - V)	90	90	90	90	90
D	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSE)	90	90	90	90	90
TOTAL		1.500	1.620	1.920	2.100	2.160

2) Pemutakhiran

Tabel 4. 57 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP2IP Tangerang

NO	JENIS DIKLAT PEMUTAKHIRAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	540	600	990	420	270
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	90	90	180	30	30
B	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	120	120	270	60	60
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ANT - V)	150	150	270	90	90
D	Diklat Pelaut - D (DP - D / ANT - D)	180	240	270	240	90
2	Bidang Keahlian Teknika	450	570	960	360	210
B	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	90	90	180	30	30
C	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	120	120	270	60	60
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ATT - V)	150	150	270	90	90
D	Diklat Pelaut - D (DP - D / ATT - D)	90	210	240	180	30
TOTAL		990	1.170	1.950	780	480

3) Teknis

Tabel 4. 58 Target Lulusan Diklat Teknis BP2IP Tangerang

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training/BST)	840	1.050	1.230	1.200	1.500
2	Diklat Keterampilan Penggunaan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong selain Sekoci Penolong Cepat. Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats other than Fast Rescue Boat/PSCRB)	840	1.050	1.230	1.200	1.500
3	Diklat Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Fast Rescue Boat/PFRB)	30	30	60	60	60
4	Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (Advanced Fire Fighting/AFF)	840	1.050	1.230	1.200	1.500
5	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid/MFA)	750	960	1.140	1.110	1.410
6	Diklat Perawatan Medis (Medical Care/MC)	450	660	840	810	1.110
7	Diklat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer/SSO)	120	120	150	150	150
8	Diklat Manajemen Pengendali Massa	30	30	30	30	30

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	(Crowd Management Training/CMT)					
11	Diklat Keselamatan Penumpang, Muatan dan Kekedapan Lambung (Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training/PS, CS and HIT)	30	30	30	30	30
12	Diklat Kepedulian Keamanan (Security Awareness Training/SAT)	60	60	60	60	60
13	Diklat Kepedulian Keamanan untuk Pelaut dengan Tugas Jaga Keamanan (Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties/SATSDSD)	30	30	30	30	30
14	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (Electronic Chart Display and Information System/ECDIS)	90	90	90	120	120
15	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (Bridge Resource Management/BRM)	90	90	120	120	120
16	Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (Engine Room Resource Management/ERM)	60	60	60	90	90
17	Diklat Kapal Tangki : (Tanker Proficiency Training) :					
	a. Diklat Dasar Kapal Tangki Minyak dan Kimia (Basic Oil and Chemical Tanker/BOCT)	840	1.050	1.230	1.200	1.500
	b. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations /AOTCO)	30	30	60	60	60
	c. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations/ACTCO)	30	30	60	60	60
	d. Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair (Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations/BLGTCO)	30	30	60	60	60
	e. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair Tingkat Lanjutan (Advance Liquefied Gas Tanker Cargo Operations/ALGTCO)	30	30	60	60	60
18	Diklat Anjungan Lepas Pantai : (Offshore Supply Vessel Training)					
	a. Diklat Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai Untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi (Training Of Masters And Officers In Charge Of A Navigational Watch On Board Offshore Supply Vessels)	30	30	30	30	30
	b. Diklat Operasi Penanganan Jangkar Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi (Offshore Supply Vessels Performing Anchor-Handling Operations for Masters and Officers in Charge of Navigational Watch)	30	30	30	30	30
19	Diklat Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis (Dynamic Positioning System Training) :					
	a. Diklat Personil Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis Tingkat Dasar (Personel Operating Basic Dynamic Positioning System Training/POBDPST)	480	540	630	810	780
	b. Diklat Personil Pengoperasian Sistem Posisi Dinamis Tingkat Lanjutan (Personel Operating Advanced Dynamic Positioning System Training/POADPSDT)	420	480	570	750	720
21	Diklat RADAR Simulator (RADAR Simulator Training/RS)	480	540	630	810	780
22	Diklat ARPA Simulator (ARPA Simulator Training/AS)	480	540	630	810	780
23	Diklat Penanganan Paket Muatan Berbahaya dan Beracun : (Cargo Handling on Ship Ships Carrying Dangerous And Hazardous Substances In Packaged Form)					
	a. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating (Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Packaged Form)	300	360	390	420	450
	b. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Muatan Curah Kering Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating	630	420	420	480	540

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	<i>(Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk)</i>					
	TOTAL	8.070	9.420	11.100	11.790	13.560

h. BP2IP Barombong

1) Keahlian

Tabel 4. 59 Target Lulusan Diklat Keahlian BP2IP Barombong

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	DIKLAT PEMBENTUKAN KOMPETENSI PELAYARAN	7.440	7.440	8.940	8.940	9.000
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	-	-	30	30	60
B	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	-	-	30	30	60
C	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	120	120	120	120	120
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	120	120	120	120	120
E	Diklat Pelaut - Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DP - Rating Dinas Navigasi / WRNW)	3.600	3.600	4.320	4.320	4.320
F	Diklat Pelaut - Rating Dinas Jaga Mesin (DP - Rating Dinas Jaga Kamar Mesin / WRER)	3.600	3.600	4.320	4.320	4.320
II	DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	3.060	3.060	3.660	3.660	3.720
1	Bidang Keahlian Nautika	1.530	1.530	1.830	1.830	1.860
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)			30	30	60
B	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	90	90	120	120	120
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ANT - V)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
D	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSD)	240	240	480	480	480
2	Bidang keahlian Teknik	1.530	1.530	1.830	1.830	1.860
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)			30	30	60
B	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	90	90	120	120	120
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ATT - V)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
D	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSE)	240	240	480	480	480
	TOTAL	10.500	10.500	12.600	12.600	12.720

2) Pemutakhiran

Tabel 4. 60 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP2IP Barombong

NO	JENIS DIKLAT PEMUTAKHIRAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	25.920	30.240	0	0	0
A	Diklat Pelaut - IV (DP - IV/ ANT - IV)	4.320	8.640			
B	Diklat Pelaut - V (DP - V/ ANT - V)	7.200	7.200			
C	Diklat Pelaut - D (DP -D/ ANT - D)	14.400	14.400			
2	Bidang Keahlian Teknik	25.920	30.240	0	0	0
A	Diklat Pelaut - IV (DP - IV/ ATT - IV) peningkatan	4.320	8.640			
C	Diklat Pelaut - V (DP - V/ ATT - V) peningkatan	7.200	7.200			
D	Diklat Pelaut - D (DP -D/ ATT - D) peningkatan	14.400	14.400			
	TOTAL	51.840	60.480	0	0	0

3) Teknis

Tabel 4. 61 Target Lulusan Diklat Teknis BP2IP Barombong

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training/BST)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2	Diklat Keterampilan Penggunaan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong selain Sekoci Penolong Cepat. Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats other than Fast Rescue Boat/PSCRB)	1.080	1.440	1.440	1.440	1.440
3	Diklat Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Fast Rescue Boat/PFRB)	360	360	360	360	360
4	Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (Advanced Fire Fighting/AFF)	720	720	1.080	1.080	1.080
5	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid/MFA)	720	720	1.080	1.080	1.080
6	Diklat Perawatan Medis (Medical Care/MC)	360	360	360	360	360
7	Diklat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer/SSO)	720	720	1.080	1.080	1.080
8	Diklat Manajemen Pengendali Massa (Crowd Management Training/CMT)	360	360	360	360	360
10	Diklat Manajemen Krisis dan Perilaku Manusia (Crisis Management and Human Behaviour Training/CMHBT)	360	360	360	360	360
11	Diklat Keselamatan Penumpang, Muatan dan Kekedapan Lambung (Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training/PS, CS and HIT)	360	360	360	360	360
12	Diklat Kepedulian Keamanan (Security Awareness Training/SAT)	720	720	1.080	1.080	1.080
13	Diklat Kepedulian Keamanan untuk Pelaut dengan Tugas Jaga Keamanan (Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties/SATSDSD)	360	360	360	360	360
14	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (Electronic Chart Display and Information System/ECDIS)	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
15	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (Bridge Resource Management/BRM)	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
16	Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (Engine Room Resource Management /ERM)	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
17	Diklat Kapal Tangki : (Tanker Proficiency Training) :					
	a. Diklat Dasar Kapal Tangki Minyak dan Kimia (Basic Oil and Chemical Tanker/BOCT)	720	720	720	720	720
	b. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations/AOTCO)	360	360	360	360	360
	c. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operation / ACTCO)	360	360	360	360	360
	d. Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair (Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation/BLGTCO)	360	360	360	360	360
	e. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair Tingkat Lanjutan (Advance Liquefied Gas Tanker Cargo Operations/ALGTCO)	360	360	360	360	360
21	Diklat RADAR Simulator (RADAR Simulator Training/RS)	720	720	720	720	720
21	Diklat ARPA Simulator (ARPA Simulator Training/AS)	720	720	720	720	720
TOTAL		21.240	21.600	23.040	23.040	23.040

i. BP2IP Sorong

1) Keahlian

Tabel 4. 62 Target Lulusan Diklat Keahlian BP2IP Sorong

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	DIKLAT PEMBENTUKAN KOMPETENSI PELAYARAN	360	360	360	360	360
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)					
B	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)					
C	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	120	120	120	120	120
D	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	120	120	120	120	120
E	Diklat Pelaut - Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DP - Rating Dinas Navigasi / WRNW)	60	60	60	60	60
F	Diklat Pelaut - Rating Dinas Jaga Mesin (DP - Rating Dinas Jaga Kamar Mesin / WRER)	60	60	60	60	60
II	DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	540	720	720	840	840
1	Bidang Keahlian Nautika	270	360	360	420	420
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ANT - III)	30	60	60	60	60
B	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	60	60	60	120	120
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ANT - V)	120	120	120	120	120
D	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSD)	60	120	120	120	120
2	Bidang keahlian Teknika	270	360	360	420	420
A	Diklat Pelaut - III (DP - III / ATT - III)	30	60	60	60	60
B	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	60	60	60	120	120
C	Diklat Pelaut - V (DP - V / ATT - V)	120	120	120	120	120
D	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSE)	60	120	120	120	120
TOTAL		900	1.080	1.080	1.200	1.200

2) Pemutakhiran

Tabel 4. 63 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP2IP Sorong

NO	JENIS DIKLAT PEMUTAKHIRAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	60	60	90	90	90
A	Diklat Pelaut - IV (DP - IV/ ANT - IV)	30	30	30	30	30
B	Diklat Pelaut - V (DP - V/ ANT - V)	30	30	30	30	30
C	Diklat Pelaut - D (DP -D/ ANT - D)			30	30	30
2	Bidang Keahlian Teknika	60	60	90	90	90
A	Diklat Pelaut - IV (DP - IV/ ATT - IV)	30	30	30	30	30
B	Diklat Pelaut - V (DP - V/ ATT - V)	30	30	30	30	30
C	Diklat Pelaut - D (DP -D/ ATT - D)			30	30	30
TOTAL		120	120	180	180	180

3) Teknis

Tabel 4. 64 Target Lulusan Diklat Teknis BP2IP Sorong

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training/BST)	210	210	270	300	300
2	Diklat Keterampilan Penggunaan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong selain Sekoci Penolong Cepat. Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats other than Fast Rescue Boat/PSCRB)	90	90	180	180	180
3	Diklat Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Fast Rescue Boat/PFRB)	90	90	180	180	180

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (Advanced Fire Fighting/AFF)	90	90	180	180	180
5	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid/MFA)	90	90	180	180	180
6	Diklat Perawatan Medis (Medical Care/MC)	90	90	180	180	180
14	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (Electronic Chart Display and Information System/ECDIS)	30	30	90	90	90
15	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (Bridge Resource Management/BRM)	30	30	90	90	90
16	Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (Engine Room Resource Management/ERM)	30	30	90	90	90
21	Diklat RADAR Simulator (RADAR Simulator Training/RS)	60	60	60	90	90
22	Diklat ARPA Simulator (ARPA Simulator Trainin /AS)	60	60	60	90	90
TOTAL		870	870	1560	1650	1650

j. BP2IP Malahayati Aceh Besar

1) Keahlian

Tabel 4. 65 Target Lulusan Diklat Keahlian BP2IP MAB

NO	JENIS DIKLAT KEAHLIAN PELAYARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	DIKLAT PEMBENTUKAN KOMPETENSI PELAYARAN	120	180	180	180	180
A	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	60	60	60	60	60
B	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	60	60	60	60	60
C	Diklat Pelaut - Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DP - Rating Dinas Navigasi / WRNW)	-	30	30	30	30
D	Diklat Pelaut - Rating Dinas Jaga Mesin (DP - Rating Dinas Jaga Kamar Mesin / WRER)	-	30	30	30	30
II	DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPELAUTAN	60	60	60	180	180
1	Bidang Keahlian Nautika	30	30	30	90	90
A	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ANT - IV)	-	-	-	30	30
B	Diklat Pelaut - V (DP - V / ANT - V)	30	30	30	30	30
C	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSD)	-	-	-	30	30
2	Bidang keahlian Teknika	30	30	30	90	90
A	Diklat Pelaut - IV (DP - IV / ATT - IV)	-	-	-	30	30
B	Diklat Pelaut - V (DP - V / ATT - V)	30	30	30	30	30
C	Diklat Pelaut - Terampil (DP - Terampil / ABSE)	-	-	-	30	30
TOTAL		180	240	240	360	360

2) Pemutakhiran

Tabel 4. 66 Target Lulusan Diklat Pemutakhiran BP2IP MAB

NO	JENIS DIKLAT PEMUTAKHIRAN KEAHLIAN PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Keahlian Nautika	90	90	90	0	0
A	Diklat Pelaut - IV (DP - IV/ ANT - IV)	30	30	30	-	-
B	Diklat Pelaut - V (DP - V/ ANT - V)	30	30	30	-	-
C	Diklat Pelaut - D (DP -D/ ANT - D)	30	30	30	-	-
2	Bidang Keahlian Teknika	90	90	90	0	0
A	Diklat Pelaut - IV (DP - IV/ ATT - IV)	30	30	30	-	-
B	Diklat Pelaut - V (DP - V/ ATT - V)	30	30	30	-	-
C	Diklat Pelaut - D (DP -D/ ATT - D)	30	30	30	-	-
TOTAL		180	180	180	0	0

3) Teknis

Tabel 4. 67 Target Lulusan Diklat Teknis BP2IP MAB

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training/BST)	120	120	120	120	120
2	Diklat Keterampilan Penggunaan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong selain Sekoci Penolong Cepat. Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats other than Fast Rescue Boat/PSCRB)	180	180	180	180	180
3	Diklat Sekoci Penolong Cepat (Proficiency in Fast Rescue Boat/PFRB)	-	-	-	-	-
4	Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (Advanced Fire Fighting/AFF)	180	180	180	180	180
5	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (Medical First Aid/MFA)	180	180	180	180	180
6	Diklat Perawatan Medis (Medical Care/MC)	180	180	180	180	180
7	Diklat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer/SSO)	-	180	60	120	120
14	Diklat Peta Elektronik dan Sistem Informasi (Electronic Chart Display and Information System/ECDIS)	48	48	48	48	48
15	Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan (Bridge Resource Management/BRM)	30	30	30	30	30
16	Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (Engine Room Resource Management/ERM)	30	30	30	30	30
17	Diklat Kapal Tangki : (Tanker Proficiency Training) :					
	a. Diklat Dasar Kapal Tangki Minyak dan Kimia (Basic Oil and Chemical Tanker / BOCT)	30	30	30	30	30
	b. Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations/AOTCO)	30	30	30	30	30
18	Diklat RADAR Simulator (RADAR Simulator Training/RS)	30	30	30	30	30
19	Diklat ARPA Simulator (ARPA Simulator Training/AS)	30	30	30	30	30

NO	JENIS DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
20	a. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating (Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Packaged Form)	30	30	30	30	30
	b. Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Muatan Curah Kering Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating (Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk)	30	30	30	30	30
TOTAL		1128	1308	1188	1248	1248

k. BP2TL Jakarta

1) Teknis Fungsional

Tabel 4. 68 Target Lulusan Diklat Fungsional BPPTL

NO	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Marine Inspector Type A	60	60	60	60	60
2	Marine Inspector Type B	90	90	90	90	90
3	Kesyahbandaran Klas A	60	60	60	60	60
4	Kesyahbandaran Klas B	120	120	60	120	90
5	TTPL Tingkat Madya	60	60	60	60	60
6	TTPL Tingkat Pratama	90	90	90	90	90
7	Kepelabuhanan	60	90	90	60	60
8	Ketatalaksanaan Angkutan Laut	90	90	90	90	90
9	SBNP Tingkat Terampil	60	60	60	60	60
10	Dasar Bintara KPLP	60	60	60	60	60
11	Dasar Perwira KPLP	60	60	60	60	60
12	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	60	60	60	60	90
13	Penceg. & Penangg. Pencemaran	60	60	60	60	60
14	Pengukuran Kapal	60	60	60	60	60
15	Marine Inspector Radio	60	60	60	60	60
16	Penilaian Gambar Rancang Bangun Kapal	30	30	30	30	30
17	Dasar - Dasar Kesyahbandaran	150	120	150	150	150
18	Pengukuran Kapal Dibawah 7 GT	150	150	150	150	150
19	Kesyahbandaran Perikanan Untuk Pelabuhan Perikanan	60	60	90	60	60
20	Kenavigasian Untuk Auditor	30	30	30	30	30
21	Kesyahbandaran Untuk Auditor	30	30	30	30	30
22	Kepelabuhanan Untuk Auditor	30	30	30	30	30
23	Ketatalaksanaan Agk. Laut Untuk Auditor	30	30	30	30	30
24	Auditor ISM Code	90	90	90	120	90
25	Pengawas Pemanduan	90	90	90	90	90
26	VTS Operator	30	30	30	30	30
27	Maritime English	30	30	30	30	30
28	Compass Eren	30	30	30	30	30
29	Port Agency	30	30	30	30	30
30	Penyelenggara Pelabuhan	30	30	30	30	30
31	Sertifikasi radio Elektronika (SRE-II)	30	30	30	30	30
32	Sea and Coast guard	30	30	30	30	30
TOTAL		1.950	1.950	1.950	1.980	1.950

2) Refreshing Teknis

Tabel 4. 69 Target Lulusan Diklat Teknis BPPTL

NO	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Marine Inspector Type A	60	60	60	90	90
2	Marine Inspector Type B	90	90	90	90	90
3	Marine Inspector Radio	30	30	30	30	30
4	Kesyahbandaran Klas A	60	60	60	60	60
5	Kesyahbandaran Klas B	90	90	90	90	90
6	Pengukuran Kapal	60	60	60	60	60
	TOTAL	390	390	390	420	420

C. Kelembagaan

Pengembangan dan peningkatan kelembagaan SDM Perhubungan Laut diarahkan kepada penataan regionalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan guna pemerataan kesempatan masyarakat mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan transportasi laut di seluruh wilayah Republik Indonesia. Regionalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan transportasi laut mengikuti pola hirarki jalur pendidikan formal dan non formal, jenjang pendidikan tinggi, pendidikan menengah dan pendidikan dasar transportasi laut. Regionalisasi tersebut juga dilakukan untuk organisasi/lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur transportasi laut. Secara umum regionalisasi tersebut diarahkan kepada Regional I Kawasan Indonesia Barat, Regional II Kawasan Indonesia Tengah dan Regional III Kawasan Indonesia Timur.

Pengembangan lembaga ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi laut bagi SDM yang berfungsi sebagai regulator transportasi laut, SDM penyedia jasa transportasi laut dan SDM tenaga kerja di bidang transportasi laut dicapai dengan pengembangan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan Keahlian Transportasi Laut, diklat teknis transportasi laut, Pendidikan Sarjana Sains Terapan (S1 Terapan), Magister Sains Terapan (S2 Terapan) dan Doktor Sains Terapan (S3 Terapan).

D. Kurikulum Silabi dan Modul

Kurikulum SDM Perhubungan laut disusun sesuai fungsi dengan fungsi-fungsi pelayaran sebagai berikut:

- Fungsi 1-*Coordination and Negotiation*. Pada fungsi ini menitik beratkan pada pengembangan kurikulum yang mengacu kepada kerja sama baik nasional dan internasional. Sebagai contoh kerjasama nasional melalui kerjasama dengan kementerian pendidikan dan kementerian tenaga kerja. Pengembangan kurikulum yang mengacu kepada kerjasama internasional seperti kerjasama multilateral (WTO, IMO, IALA, ILO, UNCTAD, UNESCAP, IAPH, Tokyo MOU), Bilateral (9 countries signed + 25 countries on going), Undertaking STCW (67 Parties), regional (RC-PSC, ASEAN, IOR-ARC, APEC, ASEAN-CCS), sub-regional (BIMP-EAGA, ANF, IMT-GT, IMS-GT, RFC, TTEG) dan regional association (APA, FASC, FASA, AFFA)
- Fungsi 2-*Shipping*. Pengembangan kurikulum diarahkan kepada kebutuhan SDM Marine Inspector A, Marine Inspector B, Marine Inspector Radio, Naval drawing approval person, Ships measurement and registry, Auditor ISM dan VIMSAS, Assessor CAS (Condition Assessment Scheme), Auditor maritime labour compliance.
- Fungsi 3-*Seafaring*. Pengembangan kurikulum diarahkan kepada kebutuhan Merchant seafarers, Seafarers for AHTS, MODU, Oil Platform & PFSO, Fishermen for Fishing vessels & Mother ship, Seafarers for Non-Conventional Vessel Standards , Seafarer for State Vessel, MET Instructor, Assessor & Examiner , Auditor & Assessor for QSS.
- Fungsi 4-*Sea Traffic and Shipment*. Pengembangan kurikulum pada fungsi ini diarahkan pada kebutuhan SDM untuk pengelolaan lalu lintas dan angkutan laut.
- Fungsi 5-*Port and Dredging*. Pengembangan kurikulum pada fungsi ini diarahkan kepada kebutuhan SDM untuk pengelolaan kepelabuhanan, port authority dan pengelolaan alur dan kolam pelabuhan.
- Fungsi 6-*Navigation*. Pengembangan kurikulum pada fungsi ini diarahkan kepada SDM untuk pengelolaan navigasi laut khususnya yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran diantaranya SDM penjaga mercu suar,SDM perawatan rambu-rambu navigasi laut, SDM pengelolaan peta-peta laut.

- Fungsi 7-Sea and Coast Guard. Pengembangan kurikulum pada fungsi ini diarahkan untuk SDM laut yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut, inspektur untuk pemeriksaan pemenuhan persyaratan kapal baik nasional dan internasional baik sebagai FSCO dan PSCO.

a. Penyusunan Konsep Peraturan Tentang Kurikulum dan Pelaksanaan Diklat

Tabel 4. 70 Peraturan Tentang Kurikulum dan Pelaksanaan Diklat

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	PERATURAN TENTANG KURIKULUM					
1	Kurikulum Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	1	-	-	-	-
2	Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	-	1	-	-	-
3	Kurikulum Diklat Keterampilan Khusus Pelaut	-	1	-	-	-
II	PERATURAN PELAKSANAAN DIKLAT					
1	Pedoman Pelaksanaan Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	1	-	-	-	-
2	Pedoman Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	1	-	-	-	-
3	Pedoman Pelaksanaan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut	-	1	-	-	-
4	Pedoman Pelaksanaan Diklat Komunikasi Radio dan Operator Radio GMDSS	-	1	-	-	-
5	Pedoman Pelaksanaan Diklat Pengukuhan Jabatan Tingkat Manajemen Pada Kapal Niaga untuk pemilik sertifikat ANT - III / ATT - III, ANT - IV / ATT - IV, dan ANT - V / ATT - V	-	-	1	-	-
III	PERATURAN TENTANG SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN					
1	Peraturan Tentang Penerbitan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan	1	-	-	-	-
IV	PERATURAN TENTANG PENERBITAN IJAZAH DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV					
1	Peraturan Tentang Penerbitan Ijazah Diploma III dan Diploma IV	1	-	-	-	-
V	PERATURAN TENTANG PEMBINAAN MENTAL, MORAL DAN KESAMAPTAAN					
1	Peraturan Pelaksanaan Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaaan Taruna Diklat Pelayaran	1	-	-	-	-

b. Kurikulum

Tabel 4.59
Kurikulum Diklat Pelayaran

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	Kurikulum					
1	Kurikulum Diklat Pembentukan Kompetensi Pelayaran	6	6	6	6	6
2	Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	6	6	6	6	6
3	Kurikulum Diklat Teknis Fungsional Pelayaran	4	4	4	4	4
4	Kurikulum Pengelola Simulator Kepelautan	3	3	3	3	3
5	Kurikulum Pengelola Laboratorium Kepelautan	3	3	3	3	3
6	Kurikulum TOT for Instructors (IMO Model Course 6.09)	1	1	1	1	1

7	Kurikulum TOT for Assessor and Examiner (IMO Model Course 3.12)	1	1	1	1	1
8	Kurikulum TOT Penyuluh Penyelenggaraan Diklat Transportasi	1	1	1	1	1
9	Kurikulum TOT Auditor Quality Standards System	1	1	1	1	1
10	Kurikulum TOT Penyuluh Operator Sarana Transportasi Laut	2	2	2	2	2
11	Kurikulum Pelatihan Pengelola Kapal Latih	2	2	2	2	2
12	Kurikulum Pelatihan Penerbitan Sertifikat DKKP	1	1	1	1	1
13	Kurikulum Pelatihan Pengelola IMO Publications	1	1	1	1	1
14	Kurikulum Pelatihan Teknisi Simulator Kepelautan	1	1	1	1	1
15	Kurikulum Pelatihan Teknisi Laboratorium Kepelautan	1	1	1	1	1
16	Kurikulum Pelatihan Manajemen Diklat Keterampilan Khusus Pelaut	1	1	1	1	1
17	Kurikulum Pelatihan Manajemen Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	1	1	1	1	1
18	Kurikulum Pelatihan Manajemen Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	1	1	1	1	1

c. Silabus

Tabel 4. 71 Silabus Diklat Pelayaran

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Silabus					
1	Silabus Diklat Pembentukan Kompetensi Pelayaran	6	6	6	6	6
2	Silabus Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	6	6	6	6	6
3	Silabus Diklat Teknis Fungsional Pelayaran	6	6	6	6	6
4	Silabus Pengelola Simulator Kepelautan	1	1	1	1	1
5	Silabus Pengelola Laboratorium Kepelautan	1	1	1	1	1
6	Silabus TOT for Instructors (IMO Model Course 6.09)	1	1	1	1	1
7	Silabus TOT for Assessor and Examiner (IMO Model Course 3.12)	1	1	1	1	1
8	Silabus TOT Penyuluh Penyelenggaraan Diklat Transportasi	1	1	1	1	1
9	Silabus TOT Auditor Quality Standards System	1	1	1	1	1
10	Silabus TOT Penyuluh Operator Sarana Transportasi Laut	1	1	1	1	1
11	Silabus Pelatihan Pengelola Kapal Latih	2	2	2	2	2
12	Silabus Pelatihan Penerbitan Sertifikat DKKP	1	1	1	1	1
13	Silabus Pelatihan Pengelola IMO Publications	1	1	1	1	1
14	Silabus Pelatihan Teknisi Simulator Kepelautan	1	1	1	1	1
15	Silabus Pelatihan Teknisi Laboratorium Kepelautan	1	1	1	1	1
16	Silabus Pelatihan Manajemen Diklat Keterampilan Khusus Pelaut	1	1	1	1	1
17	Silabus Pelatihan Manajemen Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	1	1	1	1	1
18	Silabus Pelatihan Manajemen Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	1	1	1	1	1

d. Bahan Ajar

Tabel 4. 72 Bahan Ajar Diklat Pelayaran

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	Bahan Ajar					
1	Ajar Diklat Pembentukan Kompetensi Pelayaran	5	5	5	5	5
2	Ajar Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	5	5	5	5	5
3	Ajar Diklat Teknis Fungsional Pelayaran	5	5	5	5	5
4	Ajar Pengelola Simulator Kepelautan	1	1	1	1	1
5	Ajar Pengelola Laboratorium Kepelautan	1	1	1	1	1
6	Ajar TOT for Instructors (IMO Model Course 6.09)	1	1	1	1	1
7	Ajar TOT for Assessor and Examiner (IMO Model Course 3.12)	1	1	1	1	1
8	Ajar TOT Penyuluh Penyelenggaraan Diklat Transportasi	1	1	1	1	1
9	Ajar TOT Auditor Quality Standards System	1	1	1	1	1
10	Ajar TOT Penyuluh Operator Sarana Transportasi Laut	1	1	1	1	1
11	Ajar Pelatihan Pengelola Kapal Latih	2	2	2	2	2
12	Ajar Pelatihan Penerbitan Sertifikat DKKP	1	1	1	1	1
13	Ajar Pelatihan Pengelola IMO Publications	1	1	1	1	1
14	Bahan Ajar Pelatihan Teknisi Simulator Kepelautan	1	1	1	1	1
15	Bahan Ajar Pelatihan Teknisi Laboratorium Kepelautan	1	1	1	1	1
16	Bahan Ajar Pelatihan Manajemen Diklat Keterampilan Khusus Pelaut	1	1	1	1	1
17	Bahan Ajar Pelatihan Manajemen Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	1	1	1	1	1
18	Bahan Ajar Pelatihan Manajemen Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	1	1	1	1	1

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Diklat SDM perhubungan laut diarahkan kepada pemenuhan sarana dan prasarana diklat sesuai dengan persyaratan program pada jenjang pendidikan tinggi, menengah dan dasar untuk SDM kepelautan dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk SDM aparatur transportasi laut sesuai standar nasional dan internasional. Untuk standar internasional mengacu kepada persyaratan sarana dan prasarana peraturan yang dikeluarkan oleh IMO dan organisasi terkait lainnya. Secara nasional, integrasi pemenuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pengembangan sarana dan prasarana diklat juga diarahkan untuk pengadaan dan pengelolaan kapal latih yang akan dipergunakan secara nasional oleh UPT diklat kepelautan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, diklat swasta.

Pengembangan sarana dan prasarana yang berbasis *distance learning* atau *E-learning* merupakan tuntutan dalam memberikan pelayanan diklat kepada masyarakat yang lebih luas dan merata mengingat keterbatasan- keterbatasan terutama keterbatasan wilayah geografis, akan dikembangkan secara bertahap.

Tabel 4. 73 Sarana Prasarana Diklat Pelayaran

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	Pembangunan Lanjutan Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Laut					
1	BP2IP Minsel Sulut Tahap 3 dan 4	1 Paket	1 Paket	-	-	-
2	BP2IP Padang Pariaman Sumbar Tahap 3 dan 4	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-
II	Pembangunan baru Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Laut					
1	BP2P NTT	-	-	-	1 Paket	1 Paket
2	BP2P Bengkulu	-	-	-	1 Paket (FS)	-
3	BP2P Maluku	-	-	-	1 Paket	1 Paket
III	Pembangunan Kapal Latih	6 Unit (MYC)				

F. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan dan Organisasi/Lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur transportasi laut membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan nasional maupun internasional. Secara nasional persyaratan tersebut perlu diintegrasikan dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, SDM penyedia jasa transportasi laut dan tenaga kerja di bidang transportasi laut serta pengelola pendidikan dan pelatihan perhubungan laut harus mengembangkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan keahlian transportasi laut, diklat teknis transportasi laut, pendidikan sarjana sains terapan (S1 terapan), magister sains terapan (S2 terapan) atau doktor sains terapan (S3 terapan).

4. Pengembangan Sdm Perhubungan Udara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan mengamanahkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan SDM Penerbangan. Tanggung jawab pengembangan SDM Perhubungan menjadi tugas pokok dari Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Dan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, pengembangan SDM Penerbangan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Transportasi mengamanahkan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan SDM transportasi dilaksanakan dengan tujuan tersedianya SDM transportasi yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab, serta memenuhi standar nasional dan internasional meliputi aparatur pemerintah dan masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan penerbangan selain mengacu pada peraturan perundangan di bidang transportasi juga harus mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Hal ini disebabkan bentuk beberapa lembaga berupa sekolah tinggi dan akademi.

Sekolah tinggi dan akademi di lingkungan perhubungan udara dibentuk pada tahun 2000 dengan bentuk sekolah kedinasan. Bentuk sekolah kedinasan ini perlu dikaji mengingat saat ini tidak ada lagi ikatan dinas bagi lulusan dari lembaga-lembaga tersebut.

Terbitnya aturan baru terkait pendidikan tinggi yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berdampak pada penyelenggaraan di Sekolah Tinggi dan Akademi yang melaksanakan pembentukan melalui program Diploma.

Selain itu, penerbangan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*) dan standar internasional lainnya.

Perkembangan peraturan di bidang pendidikan dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan, menuntut Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara untuk

lebih berperan sebagai regulator penerbangan. Untuk itu Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara akan menyusun aturan-aturan penerbangan dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan.

Perkembangan peraturan di bidang pendidikan dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan diklat, menuntut Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara untuk lebih berperan sebagai regulator diklat penerbangan. Untuk itu Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara akan menyusun aturan-aturan diklat penerbangan dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan.

Aturan-aturan yang akan disusun antara lain:

- a. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan diklat Penerbang, TPU, CNS/ATM (TNU dan ATC), dan diklat teknis lainnya;
 - b. Revisi Statuta STPI dan ATKP;
 - c. Revisi Surat Keputusan Kepala BPSDM Perhubungan terkait kurikulum-kurikulum diklat yang telah disahkan.
- A. Kebutuhan SDM Transportasi Udara

SDM di Bidang Penerbangan, khususnya untuk penerbang, ahli teknik pesawat udara dan ahli lalu lintas udara, juga mengalami peningkatan kebutuhan seiring dengan perkembangan industri penerbangan selama satu dekade terakhir yang terus mengalami peningkatan cukup signifikan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, industri penerbangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia, pada tahun 2015 merencanakan untuk mengoperasikan 154 pesawat yang akan dioperasikan sendiri, dan 50 pesawat yang akan dioperasikan oleh Citilink. Sedangkan maskapai penerbangan swasta nasional, Lion Air, pada tahun 2025 diproyeksikan untuk mengoperasikan 408 pesawat Boeing dan 234 pesawat Airbus.

SDM di Bidang Penerbangan, khususnya untuk penerbang, ahli teknik pesawat udara dan ahli lalu lintas udara, juga mengalami peningkatan kebutuhan seiring dengan perkembangan industri penerbangan selama satu dekade terakhir yang terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Dengan perkembangan *demand* penumpang angkutan udara baik dalam negeri maupun luar negeri, tentunya akan

menuntut penyediaan armada udara yang pada akhirnya membutuhkan pasokan penerbang dan ahli teknik pesawat udara. Kebutuhan akan ahli lalu lintas udara pada 5 (lima) tahun mendatang akan mengalami trend mendatar cenderung menurun sejalan dengan terpenuhinya SDM di bandara-bandara nasional serta terpenuhinya rasio kecukupan ahli lalu lintas udara. Menurut ICAO: *Global and Regional 20-year Forecasts*: kebutuhan dunia pilot (*most likely scenario*) s.d tahun 2030 adalah 980.799 orang dengan kebutuhan diklat sebanyak 52.506 orang, kapasitas pelatihan 44.360 orang sehingga kekurangan (*shortage*) pilot sebesar 8.146 orang. Kebutuhan dunia Asia Pasific (*most likely scenario*) s.d tahun 2030 adalah 229.676 orang dengan kebutuhan diklat sebanyak 13.983 orang, kapasitas pelatihan 4.935 orang sehingga kekurangan (*shortage*) pilot sebesar 9.048, kurang pilot di asia pasifik ini merupakan nilai terbesar dibandingkan wilayah lainnya.

Kebutuhan dunia akan teknisi pesawat udara sd tahun 2030 adalah 1.164.969 orang dengan kebutuhan diklat sebanyak 70.331 orang, kapasitas pelatihan 52.260 orang sehingga kekurangan (*shortage*) teknisi pesawat udara sebesar 18.071 orang. Kebutuhan dunia Asia Pasific sd tahun 2030 adalah 289.510 orang dengan kebutuhan diklat sebanyak 19.010 orang, kapasitas pelatihan 4.265 orang sehingga kekurangan (*shortage*) TPU sebesar 14.745, kurang TPU di asia pasific ini merupakan nilai terbesar dibandingkan wilayah lainnya.

Kebutuhan dunia akan *air traffic controllers* (ATC) sd tahun 2030 adalah 139.793 orang dengan kebutuhan diklat sebanyak 8.718 orang, kapasitas pelatihan 6.740 orang sehingga kekurangan (*shortage*) ATC sebesar 1.978 orang. Kebutuhan dunia Asia Pasific sd tahun 2030 adalah 44.282 orang dengan kebutuhan diklat sebanyak 2.931 orang, kapasitas pelatihan 1.865 orang sehingga kekurangan (*shortage*) ATC sebesar 1.066, kurang ATS di asia pasific ini merupakan nilai terbesar dibandingkan wilayah lainnya.

Berdasarkan estimasi dan perkembangan dunia penerbangan nasional diatas, kebutuhan pilot nasional dapat diestimasi sekitar 700 – 800 pilot baru pertahun, yang akan disupply oleh 13 sekolah pilot swasta dan 2 UPT diklat BPSDM Perhubungan yaitu STPI dan BPPP Banyuwangi. Demikian juga dengan kebutuhan TPU nasional, diperkirakan 900 – 1000 TPU baru pertahun yang akan

dipenuhi hanya UPT BPSDM Perhubungan, kebutuhan ATC diperkirakan setiap tahun semakin kecil yaitu 200 – 300 ATC baru pertahun yang akan dipenuhi hanya UPT BPSDM Perhubungan, dan di perkirakan pada akhir periode 2015-2019, Kebutuhan ATC akan terpenuhi. Selain kebutuhan industri penerbangan, kebutuhan aparatur penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara antara lain inspektur penerbangan dan tenaga teknis (teknisi penerbangan) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Secara Umum, kebutuhan industri penerbangan Nasional dan Internasional SDM Perhubungan Udara sampai dengan 2019 diperkirakan sebagai berikut:

- a. Teknisi Pesawat Udara : 900 – 1000 per tahun
- b. Pemandu Lalu Lintas Udara : 200 - 300 per tahun

Sedangkan untuk kebutuhan pilot saat ini dibutuhkan lulusan yang telah memiliki *rating Jet Engine*, untuk lulusan pilot *Ab-Initio* masih harus dilakukan pelatihan tambahan (*Rating Jet Engine*)

B. Target Lulusan dan Penyerapannya

Salah satu sasaran/target produksi lembaga diklat transportasi udara adalah pengembangan program diklat unggulan di setiap UPT, diantaranya adalah:

- a. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara

Tabel 4. 74 Target Lulusan Diklat PPSDM Phb. Udara

NO	NAMA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Instructor Course	40	40	40	40	40
2	Peningkatan SDM Aparatur Perhubungan Udara	73	80	80	80	80
3	ICAO English Proficiency Assesment	45	45	45	50	50
4	TOT Safety Management System	20	20	20	20	20
5	TOT Genset Acos	20		20		20
6	Peningkatan Keterampilan Instructional	20	40	20	20	20
7	ICAO Developing Countries Training Programme	100	100	100	100	100
8	Penyusunan Kurikulum dan Silabus	60		40		
9	Pengasuh Taruna	20	20	20	20	20
10	Applied Approach	20	40	20	20	40
11	IELP Remedial Course	20	20	20	20	20
12	Inspector Training System	20	20	20	20	20
13	Flight Training Devices	6	10			
14	PPL & Ground Flight	6		10		
15	Inspektur Aerodrome	20	20	20	20	20
16	Inspektur Angkutan Udara	20	20	20	20	20
17	Inspektur Operasional Navigasi Penerbangan	20	20	20	20	20

NO	NAMA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
18	TOT DVOR/DME	20	20	20	20	20
19	TOT PAPI/VASI	20	20	20	20	20
20	TOT SSR	20	20	20	20	20
21	Human Factor & Error Management for ATC	20	20	20	20	20
22	Human Factor & Error Management for A/C Engineer	20	20	20	20	20
23	Flight Instructor Certified	12		12		

b. STPI Curug

Tabel 4. 75 Target Lulusan Diklat STPI

NO	NAMA DIKLAT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	PEMBENTUKAN					
A	Teknik Penerbangan					
1	Teknik Navigasi Udara (TNU)	24	24	24	24	24
2	Teknik Listrik Bandara (TLB)	24	24	24		
3	Teknik Mekanikal Bandara (TMB)	24	24	24		
4	Teknik Pesawat Udara (TPU)	24	24	24	24	24
B	Penerbang					
1	Sayap Tetap	150	180	210	210	210
2	Sayap Putar	24	24	24	24	24
C	Keselamatan Penerbangan					
1	Pemandu Lalu Lintas Udara (PLLU)	24	24	24	24	48
2	Komunikasi Penerbangan (KP)	24				
3	Penerangan Aeronautika (PA)	24	24	24	24	24
4	PKP-PK	24	24	24		
D	Manajemen Penerbangan					
1	Manajemen Transportasi Udara (MTU)	24	24	24	24	24
2	Operasi Bandar Udara (OBU)	24	24	24	24	24
C	Pelatihan Teknis					
1	ATC / APP RADAR	12	12	24	24	24
2	ATC / ACC RADAR	12	12	12	12	12
3	TCC DVOR	20	10	20	20	20
4	ATC SUPERVISOR	12		12		12
5	ATS AUTOMATION		20		20	
6	SENIOR AVSEC	20	20	20		
7	TYPE RATING GROUP 1 (AIRFRAME & ENGINE)	20	20	20	20	20
8	TYPE RATING BELL 206 (AIRFRAME & ENGINE)	20		20		20
9	BASIC AVSEC	20	20	20		
10	MSSR (TCC)	20	20	20	20	20
11	ADS CPDLC	20		20		20
12	TCC X-RAY	20		20		20
13	BASIC AMHS	20	20			
14	RADAR MAINTENANCE	20	20	20	20	20
15	BASIC PKP - PK	20	20	20		
16	DANGEROUS GOODS	20	20	20		
17	INSPECTOR AERODROME	20	20			
18	PUSHBACKING AIRCRAFT	20	20			
19	CISCO DISCOVERY NETWORK	20	20			
20	ATPL	20	20		20	
21	AIRSPACE CAPACITY MANAGEMENT	20	20	20		
22	TCC TOWER SET	20	20		20	
23	TCC DME	20	20		20	
24	SMS FOR AIR SAFETY PERSONNEL	20	20	20	20	20
25	SMS FOR ENGINEERING	20	20	20	20	20
26	ATC REFRESHER	20	20	20	20	40
27	JUNIOR PKPPK	20	20	20		
28	SENIOR PKPPK	20	20	20		
29	PANS OPS	20	20	20	20	20

NO	NAMA DIKLAT	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
30	AIRWORTHY INSPECTOR	20	20	20	20	20
31	AGL	20	20	20		
32	HUMAN FACTORS FOR PILOT	20	20	20	20	20
33	CARTHOGRAPHY	20	20	20	20	20
34	AFTN/AMSC	20	20			
35	GROUND INSTRUCTOR COURSE	20	20	20	20	20
36	FLIGHT INSTRUCTOR COURSE	20	20	20	20	20
37	TYPE RATING BOEING 737-NG	20	20	20	20	20
38	TYPE RATING AIRBUS A-320	20	20	20	20	20

c. ATKP Medan

Tabel 4. 76 Target Lulusan Diklat ATKP Medan

NO	NAMA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	PEMBENTUKAN					
A	Teknik Penerbangan					
1	Teknik Navigasi Udara (TNU)	24	24	24	24	24
2	Teknik Listrik Bandara (TLB)	24	24	24	24	24
B	Keselamatan Penerbangan					
1	Pemandu Lalu Lintas Udara (PLLU)	24	24	24	24	24
II	TEKNIS					
A	Teknik Penerbangan					
1	Flight Information Service (FIS)	20	20	20	20	20
2	Building Automation System (BAS) dan Fire Alarm System (FAS)	20	20	20	20	20
3	Rating Public Address System (PAS), Building Amenities (BA) dan Checking System (CS) / (PBC)	20		20		20
4	Airfield Lighting System (ALS)	20	20	20	20	20
5	Constant Current Regulator (CCR)	20	20	20	20	20
6	Genset dan ACOS	20	20	20	20	20
7	Transmisi dan Distribusi (TRD)	20	20	20	20	20
8	UPS dan Solar Cell (PSS)	20	20	20	20	20
9	Traction Equipment (TQM)	20	20	20	20	20
10	Air Conditioning System (ACS)		20		20	
11	Water and Pump System (WPS)	20		20		20
12	Alat-Alat Berat (A2B)	20	20	20	20	20
13	Ground Power Unit (GPU)	10	10		10	
14	Air Starter (ASR)	10	10		10	
15	Helicopter Landing Officer (HLO)	20		20		20
16	Voice Switching Communication System (VSCS) / Tower Set	20	20	20	20	20
17	Automatic Message Switching Centre (AMSC)	20	20	20	20	20
18	Very Small Aperture Terminal (V-SAT)	20		20		20

NO	NAMA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
19	TCC VHF Omnidirectional Range (VOR)	20	20	20	20	20
20	TCC Distance Measuring Equipment (DME)	20	20	20	20	20
21	TCC Mode S Surveillance Radar System (MSSR)	20	20	20	20	20
22	Air Traffic Control Automation (ATC Auto)	20		20		20
23	TCC Instrument Landing System/ Runway Visual Range (ILS/RVR)	20	20	20	20	20
24	TCC Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Barang (P3B)	20	20	20	20	20
25	TCC Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Orang (P3O)	20	20	20	20	20
26	TCC Peralatan Pemantauan Penunda Upaya kejahatan (P3UK)	20	20	20	20	20
27	Aircraft Avionic	20	20	20	20	20
28	Non Diploma TNU	20		20		20
29	Non Diploma TLB	20		20		20
	Pemanduan Lalu Lintas Udara					
31	ATS Resources Management Training	20		20		20
32	ATS Safety Management and Investigation	20		20		20
33	Performance Based Navigation		20		20	
34	Aerodrome Control / Junior ATC	20	20	20	20	20
35	Aeronautical Search And Rescue		20		20	
36	Procedural Approach and Area Control / Senior ATC	20	20	20	20	20
37	Approach Control Radar	40	60	40	60	40
38	Area Control Radar	40	60	40	60	40
39	ATC Refresher Training Course	20	40	20	40	20
40	ICAO English Language Proficiency	60	60	60	60	60
41	ATC Automation Course		20		20	
43	Team Resources Management Course	20		20		20
44	Human Factor in ATC Course	20	20	20	20	20
45	ATS Operational Management Course	20		20		20
46	ATS Safety Officer Course	20		20		20
47	ATC Simulator Evaluation Training	20		20		20
48	ADS - B Course		20		20	
49	Air Traffic Flow Management Training	20		20		20
50	Dangerous Goods Type A		20		20	
51	Dangerous Goods Type B	20		20		20
52	Programmable Logic Controller (PLC) and Human Machine Interface (HMI)		20		20	
53	Supervisory Controller And Data Acquisition (SCADA)		20		20	
54	Cisco Computer Networking		20		20	

d. ATPK Surabaya

Tabel 4. 77 Target Lulusan Diklat ATPK Surabaya

NO	NAMA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	PEMBENTUKAN					
A	Teknik Penerbangan					
1	Teknik Navigasi Udara (TNU)	24	24	24	24	24
2	Teknik Listrik Bandara (TLB)	48	48	48		
3	Teknik Pesawat Udara (TPU)	48	48	48	48	48
4	Teknik Bangunan dan Landasan (TBL)	24	24	24	24	24
B	Keselamatan Penerbangan					
1	Pemandu Lalu Lintas Udara (PLLU)	24	24	24	24	24
2	Komunikasi Penerbangan (KP)	24	24	24		
B	Manajemen Penerbangan					
1	Manajemen Transportasi Udara	24	24	24	24	24
II	TEKNIS					
1	Manajemen Bandar Udara	20	20	20	20	20
2	Genset ACOS	20	20	20	20	20
3	Teknik Bangunan dan Landasan	20	20	20	20	20
4	ND PLLU	24	24	24	24	24
5	ND Teknik Pesawat Udara	24	24	24	24	24
6	ATC Refresher	20	20	20		
7	Dangerous Goods	20	20			
8	Aerodrome Inspector		20			
9	TCC ILS		20			
10	TCC X Ray		20			20
11	TCC AMSS			20		20

e. ATPK Makassar

Tabel 4. 78 Target Lulusan Diklat ATPK Makassar

NO	NAMA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	PEMBENTUKAN					
1	Diploma III Teknik Navigasi Udara	24	24	24	24	24
2	Diploma III Teknik Listrik Bandara	24	24			
3	Diploma II Teknik Pesawat Udara	24	48	48	48	48
4	Diploma II Lalu Lintas Udara	20				
5	Diploma III Lalu Lintas Udara	24	24	24	24	24
6	Diploma III Komunikasi Penerbangan	24	24	24		
7	Diploma III Penerangan Aeronautika	24		24		24

NO	NAMA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
8	Penerbang		12	24	24	24
B.	PELATIHAN					
1	Approach Radar	24	24	36	36	48
2	ACC Radar	24	24	24	24	24
3	Dangerous Goods Type A	20	20	20	20	20
4	Dangerous Good Type B	-	20	20	-	-
5	Management Bandar Udara	20	20	20	20	20
6	Programmable Logic Control	20	20	-	20	20
7	Basic Aviation Security	20	20	20	-	-
8	Junior Aviation Security	20	20	20	-	-
9	Senior Aviation Security	20	20	20	-	
10	ICAO English Language Proficiency	20	20	20	20	20
11	AMSC	20	20	20	-	-
12	Inspector Aviation Security	20	20	20	-	-
13	Human Factors for ATC	20	20	-	20	20
14	TCC X-RAY	20	20	-	-	-
15	AFIS & En-route Simulator	20	20	20	-	-
16	Genset ACOS	20	20	20	-	-
17	Constant Current Regulator	20	20	20	20	20
18	TCC DME					

f. BPPP Palembang

Tabel 4. 79 Target Lulusan Diklat BPPP Palembang

NO	NAMA	2015	2016	2017	2018	2019
	Pelatihan Teknis Keamanan Penerbangan	600	700	920	880	880
a.	Personel PKP-PK dan/atau Salvage (PerDirjen Hubud No: KP.473 Tahun 2012)					
a.1	Basic PKP-PK	40	40	40	40	40
	1. Simpul dan Tali temali (confined space and structure rope rescue)			20		20
	2. Pencegahan Pemadam Kebakaran (Fire Prevention)				20	20
	3. Teknik Pemadaman Api (Fire Fighting Technic)			20		20
	4. Penanganan Barang Berbahaya (Hazardous material operation)				20	
	5. Pengenalan Pesawat Udara (Aircraft Familiarization)		20	20	20	20
	6. Operasi Alat Bantu Pernafasan (Breathing Apparatus Operation)	60	60	60	40	20
	7. Topografi Bandar Udara (Airport Topography)				20	
a.2	Junior PKP-PK	60	60	60	40	40
	1. Standar Manajemen Keadaan Darurat (Standard of Emergency Management)				20	
	2. Komando dan Pengontrolan Operasi Api (Fire Operation Command and Control)					20

NO	NAMA	2015	2016	2017	2018	2019
	3. Strategi dan Taktik Pemadaman Api (Strategies and tactics in fire fighting)				20	20
	4. Kepemimpinan Operasi Pemadaman (Fire ground leadership)					
	5. Evaluasi Pengujian Mutu Foam (aviation fire fighting foam evaluation)					20
	6. Pengoperasian dan mengendarai Foam Tender (Foam Tender Operation and Driving)	60	60	60	60	60
a.3	Senior PKP-PK	20	20	20	20	20
	1. Manajemen Kebakaran (Fire Safety Management)					
	2. Manajemen Crisis (Crisis Management)				20	20
	3. Inspeksi Kebakaran (Fire Safety Inspection)					
	4. Investigasi terjadinya api (Fire Investigation)					
	5. Operasi Watch Room dan Pelaporan Insiden (Watchroom operation and incident reporting)				20	20
	6. Audit Pelayanan Keselamatan Kebakaran (fire service safety audits)					
	7. Audit prosedur penanggulangan keadaan (Airport Emergency Plan Audit)					20
	8. Manajemen Search And Rescue (Search and Rescue Management)			20	20	
a.4	Salvage					
a.5	Airport Emergency Plan			20	20	20
a.6	Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK	20	20	20	20	20
b.	Personel Aviation Security					
1	Basic Aviation Security	60	60	60	40	40
2	Junior Aviation Security	40	40	40	40	20
3	Senior Aviation Security	40	40	40	40	20
4	Inspector Aviation Security					20
5	Advance Avsec					
6	Dangerous Goods (Type A)	40	40	40	40	40
7	Dangerous Goods (Type A) Recurrent	40	40	40	40	40
8	Dangerous Goods (Type B)	40	40	40	40	40
9	Inspector Dangerous Goods	20		20		
10	Operator X-Ray dan Metal Detector	40	40	40	40	40
11	Cargo Security				20	20
12	CCTV and Access Control				20	20
15	Aviation Security Management				20	20
16	Risk Management			20		20
c.	Pelatihan Teknis Navigasi Penerbangan	0	0	0	20	20
1	ICAO English Language Proficiency				20	
d.	Pelatihan Teknis Personel Bandar Udara					
a.	Personel Fasilitas Teknik Bandar Udara					
1	Hygiene dan Sanitasi				20	
2	Bangunan dan Landasan			20		
3	Kawasan Bandar Udara	40	40	40	40	40
4	Fasilitas Teknik Bandar Udara				20	

NO	NAMA	2015	2016	2017	2018	2019
5	Pengujian Aspal	20		20		20
b.1	Apron Movement Controller		20			20
	1. Apron Movement Controller Junior			20		
	2. Apron Movement Controller Senior				20	
b.2	Marshaller	20				
	1. Marshaller Fixed Wing			20		
	2. Marshaller Rotary Wing					20
b.3	Bidang Pelayanan Garbarata					
	Ground Support Equipment					20
c.	Personel Elektronika Bandara					
1	Teknik Genset & Acos					20
2	Programmable Logic Control	20				
d.	Personel Teknik Listrik Bandara					
1	Fasilitas Teknik Listrik Bandara					20
e.	Pelatihan Teknis Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	0	20	0	40	20
1	Flight Attendant		20			
2	Flight Operation Officer (Initial)				20	
3	Dangerous Goods for Flight Crew				20	
4	Aviation Security for Flight Crew					20
f.	Pelatihan Bidang Non Teknik Penerbangan	200	160	180	160	180
1	Airport Information Officer		20			
2	Human Factor	20				
3	Safety Management System	40	40	40	40	40
4	Aerodrome Inspector		20		20	
5	Aviation English			20		
6	AMDAL Penyusun				20	
7	AMDAL Penilai					20
8	Teknik Digital	20				
9	Teknik Komputer	20	20	20	20	20
10	Komputerisasi Data Penerbangan	20		20		20
11	Penyelamatan Diri Saat Keadaan Darurat di Pesawat Udara	60	60	60	60	60
12	Hukum Udara	20		20		20
g.	Pelatihan Bidang Manajemen Penerbangan	100	80	100	80	100
1	Manajemen Bandar Udara	40	40	40	40	40
2	Keudaraan Tingkat Dasar	20	20	20	20	20
3	Keudaraan Tingkat Sarjana	40	20	40	20	40
	JUMLAH	1000	1060	1380	1400	1420

g. BPPP Jayapura

Tabel 4. 80 Target Lulusan Diklat BPPP Jayapura

NO	NAMA	2015	2016	2017	2018	2019
OPERATOR BANDARA						
1	AERODROME MULTIPORPUSE OFFICER		20	20		
2	AFIS (COM)		20	20	20	20
PERSONEL PKP-PK						
3	BASIC PKP-PK	20	40	20	20	20
4	AVIATION ENGLISH FOR FF	20				20
5	FIRE PREVENTION				20	
6	FIRE FIGHTING TECHNICAL			20		
7	HAZARDOUS MATERIAL OPERATION					20
8	AIRPORT EMERGENCY PLAN (BASIC)					20
9	BREATHING APPARATUS OPERATION	60	20	40	20	20
10	AIRPORT TOPOGRAPHY			20		
11	SIMPUL DAN TALI-TEMALI		20			20
12	JUNIOR PKP-PK	40	20	40	20	20
13	FIRE SERVICE HIDRAULIC				20	
16	FIRE GROUND LEADERSHIP	40		20	20	
17	EVALUASI PENGUJIAN MUTU FOAM					20
18	FOAM TENDER AND DRIVING OPERATION	40	20		20	20
19	STANDAR OF EMERGENCY MANAGEMENT				20	20
20	SALVAGE			20		20
21	SENIOR PKP-PK	40	20	20	40	20
22	FIRE SAFETY MANAGEMENT	20	20	20	20	
23	AIRPORT MANAGEMENT					20
24	RISK MANAGEMENT			20		
25	CRISIS MANAGEMENT FOR FF		20			
26	AIRPORT EMERGENCY PLAN (SENIOR)				20	
27	FIRE INVESTIGATION		20			20
28	FIRE SAFETY INSPECTION			20		
29	WATCHROOM OPERATION	20	20	20	20	40
30	FIRE SERVICE SEFETY AUDITS				20	
PERSONEL KEMAMAN PENERBANGAN						
32	BASIC AVIATION SECURITY	40	40	40	20	20
33	JUNIOR AVIATION SECURITY	40	20	20	40	40
34	SENIOR AVIATION SECURITY	20	20	20	20	20
35	X-RAY AND HAND HELD METAL DETECTOR OPERATION		20	20	20	20
36	DANGAROUS GOODS TYPE A	60	40	40	40	80
37	DANGEROUS GOODS TYPE B	40	20	40	20	40
38	TEKNIK X-RAY INSPECTION MECHINE & HHMD	20	20	20	20	20
39	EXPLOSIVE AND LIQUID DETECTOR OPERATION		20	20	20	20
PERSONEL BANDAR UDARA						
44	BANGUNAN DAN LANDASAN	20	20	20	20	20
45	UJI ASPAL	40	40		40	
46	UJI BETON	40	40		40	
47	TEKNIK KONSTRUKSI LANDASAN PACU			20		20
48	FASILITAS SISI UDARA		20		20	
49	FASILITAS SISI DARAT		20		20	

NO	NAMA	2015	2016	2017	2018	2019
50	KAWASAN BANDAR UDARA	40	20	20	20	20
51	KAWASAN HELIPORT		20		20	
	PERSONEL MEKANIKAL					
52	AIR CONDITIONING SYSTEM		20		20	
53	WATER AND PUMP SYSTEM			20		20
	PERSONEL PELAYANAN PESAWAT					
55	MARSHALLING (FIXED WING)	20	20	20	20	20
56	MARSHALLING (ROTARY WING)			20		
57	APRON MOVEMENT CONTROL (JUNIOR)	20		20		20
58	APRON MOVEMENT CONTROL (SENIOR)		20		20	
	PERSONEL LISTRIK BANDAR UDARA					
74	AIRFIELD LIGHTING SYSTEM		20		20	
75	CONSTANT CURRENT REGULATOR			20		20
76	AIRCRAFT DOCKING GUIDANCE SYSTEM					
77	ACOS	20		20		20
78	TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	20	20		20	
79	UPS DN SOLAR CELL	20		20		20
	TEKNIK ELEKTRONIKA BANDAR UDARA					
80	FLIGHT INFORMATION DISPLAY SISTEM			20		20
81	TEKNISI ELEKTRONIKA BANDARA		20		20	
82	HF AIR TO GROUND COMM	20		20		
	NAVIGASI PENERBANGAN					
83	AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE		20		20	
	UMUM					
84	MANAJEMEN BANDAR UDARA	20	20	20	20	20
85	TEKNIK DIGITAL			20		
86	TEKNIK KOMPUTER	20			20	
87	PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL	20	20			20
88	OPERATOR BANDAR UDARA			20		20

h. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

Tabel 4. 81 Target Lulusan Diklat BP3 Banyuwangi

NO	NAMA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penerbang/ Pilot	24	48	60	60	120

C. Kelembagaan

Arah pengembangan kelembagaan penerbangan adalah ke arah lembaga yang mampu menyelenggarakan berstandar dan bertaraf internasional. Organisasi/ kelembagaan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan yang ada saat ini adalah

organisasi/ kelembagaan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan yang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan udara.

Namun berdasarkan kajian dan analisis kelembagaan, perlu perubahan ataupun penyempurnaan terhadap beberapa organisasi/ kelembagaan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan yang ada, tetap berfokus pada penyelenggaraan vokasi. Perubahan ataupun penyempurnaan tersebut diantaranya adalah rencana perubahan bentuk kelembagaan beberapa unit pelaksana teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum (BLU), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang dan Jayapura. Serta perubahan bentuk beberapa Balai dan Akademi menjadi Politeknik sesuai ketentuan dan kebutuhan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri akan personil penerbangan yang berkompeten, perlu kiranya dilakukan penambahan kapasitas melalui penambahan lembaga dan penambahan program di lembaga yang sudah ada.

Tabel 4. 82 Rencana Pengembangan Kelembagaan

TAHUN	URAIAN
2015	- Eselonering BPPP Palembang dan Jayapura - Pembentukan AMTO di ATKP Makassar - Pembentukan BPPP Curug - Kerjasama dengan Australia, ENAC - Prancis, dll - FS untuk prodi baru di UPT - STPI sudah mempunyai AMO - Penyempurnaan STATUTA UPT - Pengembangan <i>Pilot School</i> di Sulawesi
2016	- Pengembangan <i>Pilot School</i> di Sumatera, Kalimantan. - Pembukaan Spesialis 1 bidang Penerbangan di STPI Curug - Jurusan TPU STPI, ATKP Makasar berstandar EASA - Mengupayakan Bandara Rengat menjadi Bandara khusus untuk latihan terbang
2017	- BLU untuk seluruh UPT - Pengembangan ATS Training Provider di lokasi baru - Pengakuan LP3 Banyuwangi oleh BOEING
2018	- Pengembangan pilot school di ATKP Medan dan Makassar - Pembentukan AMTO
2019	- Pembukaan ATS Training Provider

D. Kurikulum Silabi dan Modul

Kurikulum dan silabi merupakan serangkaian unsur utama dalam proses pembelajaran dalam Program Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan/mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap mental, kesamaptaan fisik

dan disiplin dijadikan landasan terbentuk ketangguhan mental, fisik dan disiplin serta etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang menuntut kompetensi yang tinggi. Kurikulum dan silabi merupakan instrumen yang berguna sebagai pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan untuk memenuhi suatu kompetensi tertentu.

Penyusunan kurikulum transportasi dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Standar kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan transportasi;
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Kebutuhan pengguna lulusan transportasi di dalam negeri dan mancanegara;
- d. Regulasi nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dalam rangka menjamin standar penyelenggaraan penerbangan, pengembangan kurikulum penerbangan akan mengacu kepada *ICAO Trainair Plus Methodology*. Dengan menggunakan metode tersebut, maka kurikulum-kurikulum yang dihasilkan akan dibentuk menjadi suatu paket pelatihan baku (*Standardized Training Package/STP*).

Tabel 4. 83 Kebutuhan Kurikulum Diklat Penerbangan

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kurikulum	15	20	20	20	20

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Penyediaan sarana pembelajaran dan/atau pelatihan merupakan unsur untuk mencapai kompetensi peserta menjadi lebih baik.

Pengembangan sarana dan prasarana akan diarahkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini telah terpasang beberapa sistem informasi di lembaga antara lain *Learning Management System (LMS)* dan *Flight Training Management System (FTMS)*. Sistem-sistem informasi yang telah terpasang tersebut perlu diintegrasikan dalam suatu sistem, sehingga menjadi satu kesatuan sistem yang akan

memudahkan dalam operasional . Sistem terpadu tersebut akan dibuat dalam suatu Indonesia *Integrated Aviation Training Information System* (IIATIS).

Pengembangan sarana dan prasarana penerbangan antara lain pengembangan Sarana prasarana unit pelaksana teknis diklat udara yang meliputi pengembangan Laboratorium Praktek Kecakapan berbasis komputer (*Computer Based Training*), teknologi pendidikan multimedia interaktif, *E-learning* dan *distance learning* dan simulator pesawat untuk penerbang yang disesuaikan dengan tipe pesawat yang umum beroperasi serta pembagunan unit pelaksana diklat baru sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 4. 84 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

TAHUN	URAIAN
2015	- Pengadaan dan peningkatan sarpras di seluruh UPT sesuai program unggulan - Persiapan Bandara Rengat untuk pilot school - Pembuatan <i>Indonesia Integrated Aviation Training Information System</i> (IIATIS)
2016	- Pemenuhan sarana TPU di ATKP Makassar
2017	- Pengadaan 51 Unit Pesawat latih baru (MYC, 2015 – 2017) - Terwujudnya fasilitas berstandar EASA - Penambahan fasilitas training di LP3 Banyuwangi
2018	- Penambahan fasilitas UPT baru - Melengkapi fasilitas menuju AMTO
2019	- Penambahan fasilitas UPT baru

F. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Sesuai dengan visi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara untuk melaksanakan bertaraf internasional, maka SDM di lingkungan Perhubungan Udara, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, perlu dikembangkan baik kualitas maupun kualitasnya. Pengembangan SDM akan dilaksanakan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui penyelenggaraan dan kerja sama pertukaran personil dengan instansi internasional.

Tabel 4. 85 Pengembangan SDM Pendidik dan Kependidikan

TAHUN	URAIAN
2015	- Upgrade instruktur/dosen TPU dalam rangka EASA - Terpenuhinya jumlah instruktur/dosen Penerbang dan TPU - Penambahan/ peningkatan/pengembangan kuantitas dan kualitas pengajar - Pendamping expert asing Pilot dan TPU Persiapan instruktur menuju SP1
2016	- Dosen dan Instruktur sudah dapat mengajar dengan bahasa inggris - Program pertukaran pengajar dg Australia

TAHUN	URAIAN
	- Penambahan/ peningkatan/pengembangan kuantitas dan kualitas pengajar - Pendamping expert Pilot, TPU dan CNS/ATM (PLLU dan TNU)
2017	- Peningkatan kompetensi teknisi perawatan pesawat - Menjadi penyelenggara Internasional - Penambahan/ peningkatan/ pengembangan kuantitas dan kualitas pengajar - Pendamping expert Pilot, TPU dan CNS/ATM (PLLU dan TNU)
2018	- Tersedianya lulusan Instruktur/ dosen dengan kualifikasi S2/SP1 linier - Penambahan/ peningkatan/ pengembangan kuantitas dan kualitas pengajar - Pendamping expert Pilot, TPU dan CNS/ATM (PLLU dan TNU)
2019	- Penambahan lulusan S2/SP1 - Pembukaan kelas internasional di Loka PPP Banyuwangi - Penambahan/ peningkatan/ pengembangan kuantitas dan kualitas pengajar - Pendamping expert Pilot, TPU dan CNS/ATM (PLLU dan TNU)

5. Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

Sumber Daya Manusia Perhubungan merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Terwujudnya pelayanan transportasi yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya.

Penyediaan dan pengembangan SDM di bidang transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah, yang di dalam penerapannya harus senantiasa diselenggarakan dengan berpedoman pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta mengedepankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Pemerintah dan pemerintah daerah, dengan sektor pembangunan lainnya, dan seluruh pemangku kepentingan di dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah dan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut peranannya untuk menyadarkan para pelaku kegiatan transportasi mengenai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi.

1. Kebutuhan SDM Aparatur Perhubungan

Dalam jangka waktu lima tahun direncanakan kebutuhan aparatur yang dipersiapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. 86 Kebutuhan SDM Aparatur Perhubungan

NO	UNIT ESELON I	KONDISI SAAT INI	Kebutuhan Per Tahun					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Ditjen Phb Darat	701	10	10	10	10	10	50
2	Ditjen Phb Laut	18.714	250	250	250	250	250	1250
3	Ditjen Phb Udara	10.322	150	150	150	150	150	750
4	Ditjen Phb Perkeretaapian	629	10	10	10	10	10	50
5	Badan Litbang	310	5	5	5	5	5	25
6	BPSDMP	3.378	50	50	50	50	50	250
7	Setjen	1.365	20	20	20	20	20	100
8	Itjen	356	5	5	5	5	5	25
	Total	35.775	500	500	500	500	500	2500

2. Target Lulusan

Kebijakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan diarahkan kepada peningkatan kompetensi Aparatur Perhubungan agar dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dan efisien.

Target produksi dan lulusan PPSDM Aparatur Perhubungan per tahun dari tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 87 Target Lulusan Diklat Aparatur Perhubungan

NO	JENIS DIKLAT	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Diklat Prajabatan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2	Diklat character Building	1.000	1.500	1.500	2.000	3.000	9.000
3	Diklat kepemimpinan	500	500	500	500	500	2.500
4	Diklat fungsional	600	600	600	600	600	3.000
5	Diklat teknis Manajerial	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
6	Workshop/ bimtek/ penyuluhan	500	500	500	500	500	2.500
7	Diklat pembinaan Purna tugas	250	250	250	250	250	1.250
	TOTAL	8.850	9.350	9.350	9.850	15.850	53.250

3. Kelembagaan

Organisasi/kelembagaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang ada saat ini adalah organisasi/ kelembagaan Badan Pengembangan SDM

Perhubungan yang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diuraikan pada Bab III sebelumnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan.

Namun berdasarkan kajian dan analisis kelembagaan, terdapat kemungkinan perubahan ataupun penyempurnaan terhadap beberapa organisasi/ kelembagaan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan yang ada. Perubahan ataupun penyempurnaan tersebut diantaranya adalah rencana perubahan bentuk kelembagaan beberapa unit pelaksana teknis (UPT) diklat menjadi Badan Layanan Umum (BLU), peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politkenik/ Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). Badan Pengembangan SDM Perhubungan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.

Saat ini Badan Pengembangan SDM Perhubungan memiliki Sekretariat, 4 (empat) Pusat Pengembangan SDM Perhubungan dan 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas UPT sebagai penyelenggara Diklat masyarakat, dan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi pengelolaan keuangan, sampai dengan saat ini telah memiliki 7 (tujuh) UPT menjadi Badan Layanan Umum.

Sampai dengan tahun 2019 ditargetkan UPT diklat aparatur perhubungan di Ciwedey sudah beroperasi pada tahun 2016.

4. Kurikulum Silabi dan Modul

Kurikulum dan silab merupakan serangkaian unsur utama dalam proses pembelajaran dalam Program Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan/ mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap mental, kesamaptaan fisik dan disiplin dijadikan landasan terbentuk ketangguhan mental, fisik dan disiplin serta etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang menuntut kompetensi yang

tinggi. Kurikulum dan silabi merupakan instrumen yang berguna sebagai pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan diklat untuk memenuhi suatu kompetensi tertentu. Kurikulum dan Silabi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ditetapkan oleh instansi masing-masing bekerjasama dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis ditetapkan berdasarkan adanya kompetensi tertentu yang dibutuhkan pada masing-masing sub-sektor (modatransportasi). Kurikulum dan silabi dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang pada saat itu. Tetapi pada kenyataan sekarang ini, terutama di sektor transportasi darat masih belum banyak menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi untuk lulusannya hanya tergantung terhadap pembukaan formasi Pegawai Negeri Sipil baik di Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan di daerah. Penyusunan kurikulum diklat transportasi dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Standar kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan transportasi;
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Kebutuhan pengguna lulusan diklat transportasi di dalam negeri dan manca negara;
- d. Regulasi nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Sampai dengan tahun 2019 PPSDM Aparatur Perhubungan akan melakukan reviu kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membuat kurikulum baru untuk pelaksanaan diklat pembentukan karakter dan beberapa jenis diklat baru lainnya.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana diklat merupakan bagian dari komponen diklat. Sarana dan prasarana dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Penyediaan sarana pembelajaran dan/atau pelatihan merupakan unsur untuk mencapai kompetensi peserta diklat menjadi lebih baik.

Dalam rangka penambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang Transportasi, akan dibangun beberapa kampus baru UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu pada Diklat Darat, Laut, dan Udara, Perkeretaapian, Aparatur Perhubungan dan Karakter Perhubungan dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi dan kurikulum atau materi diklat yang akan diajarkan, supaya penyelenggaraan diklat di UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Penyediaan sarana praktikum diklat perhubungan membutuhkan upaya rehabilitasi, pemulihan, serta pengadaan yang *up to date*. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengembangan SDM Perhubungan tersebut, maka diperlukan alat bantu pendidikan dan pelatihan berupa pengembangan Laboratorium Praktek Kecakapan berbasis komputer (*Computer Based Training*) dan teknologi pendidikan multimedia interaktif.

Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :

- a. Mendukung sistem pendidikan dan pelatihan perhubungan yang sudah ada dalam hal peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan handal dalam tugas keseharian di lapangan.
- b. Menyiapkan Alat bantu Diklat dalam hal ini Laboratorium Kecakapan berbasis komputer dan teknologi pendidikan multimedia interaktif sesuai dengan kebutuhan Badan Diklat Perhubungan.
- c. Menyiapkan insan perhubungan yang mempunyai kualifikasi teknis masa sekarang dan menghadapi masa yang akan datang dengan peralatan dan sistem yang modern secara *Computer Based Training & Learning* melalui Laboratorium kecakapan Multi fungsi untuk pelatihan dan pendidikan.
- d. Pengembangan laboratorium kecakapan ini bertujuan untuk :
 - 1) Memberikan solusi dan penerapan alat bantu pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional dengan didukung oleh alat dan sistem modul pendidikan yang sudah diakui di hampir seluruh dunia;
 - 2) Penyampaian informasi yang terkait dengan pendidikan menjadi lebih cepat;
 - 3) Proses pendidikan terarah, tepat sasaran dan sangat efektif & efisien;

- 4) Mempercepat proses pemahaman siswa melalui metoda belajar simulasi dan praktek;
- 5) Responsif terhadap perkembangan teknologi pertahanan dengan proses diseminasi pengetahuan yang efektif;
- 6) Mengakomodir implementasi CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau (LDT) Latihan Dalam Tugas;
- 7) Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan penggunaan peralatan berbasis TI dengan sistem Multimedia Interaktif.

Dengan dilakukannya pengembangan Alat Praktek Pendidikan dan Pelatihan berupa Laboratorium kecakapan berbasis komputer dan Teknologi pendidikan multimedia interaktif diarahkan untuk :

- a. Menghasilkan keluaran SDM yang handal, terampil dan berkualitas dan dengan pemenuhan sarana laboratorium kecakapan secara tepat akan berguna untuk mengoptimalkan, mempermudah proses pengelolaan, penyampaian informasi, dan evaluasi kinerja di Badan Diklat Perhubungan;
- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas setara dengan lembaga pendidikan taraf internasional.

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat fundamental mengingat bahwa di lingkungan diklat perhubungan merupakan diklat teknis. Rehabilitas/perbaikan dan pengadaan peralatan diklat sering menghadapi kondisi dimana kuantitas dan kualitas yang cukup sulit ditemukan di pasaran.

Ketersediaan prasarana merupakan salah satu dari faktor yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Prasarana berupa bangunan/gedung dan fasilitas tidak bergerak membutuhkan perawatan dan pembaruan yang memadai. Tidak seluruh prasarana yang dimiliki lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dalam kondisi yang baik/ cukup untuk digunakan dalam proses penyelenggaraan diklat.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam sarana dan prasarana diklat perhubungan, yaitu :

- a. Belum adanya standarisasi sarana dan prasarana diklat;
- b. Daya tampung prasarana diklat belum optimal;

- c. Rehabilitasi dan renovasi gedung yang kurang memadai;
- d. Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana diklat kurang memadai;
- e. Sebagian sarana praktek diklat yang tidak mengikuti perkembangan IPTEK (*out of date*).

Kebutuhan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 88 Pembangunan dan Pengembangan UPT Diklat Aparatur Perhubungan

(Dalam Juta)

NO	SATKER/UPT	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	PPSDMAP Bogor	27.000	15.000	15.000			57.000
	a. Pembebasan lahan 5 ha	15.000					15.000
	b. Penggantian bangunan penduduk	12.000					12.000
	c. Pembangunan asrama D 3 lantai		15.000				15.000
	d. Pembangunan Kelas 3 lantai			15.000			15.000
2	UPT Diklat Aparatur di Ciwedey	30.000	30.000				60.000
	a. Pembangunan tahap III	30.000					30.000
	b. Pembangunan tahap IV		30.000				30.000
3	UPT Diklat Aparatur di Makassar	30.000	1.000	700	15.000	15.000	61.700
	a. Pengadaan lahan 10 ha	30.000					30.000
	b. Masterplan		1.000				1.000
	c. DED			700			700
	d. Pembangunan tahap I				15.000		15.000
	e. Pembangunan tahap II					15.000	15.000
4	UPT Diklat Aparatur di Bali	30.000	1.000	700	15.000	15.000	61.700
	a. Pengadaan lahan 10 ha	30.000					30.000
	b. Masterplan		1.000				1.000
	c. DED			700			700
	d. Pembangunan tahap I				15.000		15.000
	e. Pembangunan tahap II					15.000	15.000
5	UPT Diklat Aparatur di Banjarmasin	-	-	-	700	25.000	25.700
	a. Study Kelayakan				700		700
	b. Pengadaan lahan 10 ha					25.000	25.000
6	UPT Diklat Aparatur di Padang	-	-	-	700	25.000	25.700
	a. Study Kelayakan				700		700
	b. Pengadaan lahan 10 ha					25.000	25.000
7	UPT Diklat Aparatur di Papua					700	700
	Study Kelayakan					700	700
	TOTAL	117.000	47.000	16.400	31.400	80.700	292.500

6. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Sumberdaya manusia merupakan kunci keberhasilan suatu institusi atau lembaga yang bergerak di segala bidang, khususnya untuk lembaga pendidikan dan pelatihan adalah tenaga kependidikan yaitu sumberdaya manusia baik yang bertugas sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang meliputi dosen, widyaiswara, instruktur juga yang bertugas di manajemen atau administratif pada unit pelaksana teknis (UPT).

Jumlah sumber daya manusia Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2010 adalah sebanyak 2.663 orang, yang ditinjau dari latar belakang pendidikan S3 sebanyak 11 orang, S2 sebanyak 389 orang, S1 sebanyak 731 orang, D IV sebanyak 246 orang, D III sebanyak 333 orang, DII sebanyak 95 orang, D I sebanyak 15 orang, SLTA sebanyak 740 orang, SLTP sebanyak 71 orang dan SD sebanyak 32 orang.

Kebutuhan SDM aparatur perhubungan untuk tenaga pengajar dari tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 89 Kebutuhan SDM Aparatur Perhubungan untuk Tenaga Pengejar

NO	SATKER/UPT	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	PPSDMAP Bogor	5	5	4			14
2	UPT Diklat Aparatur di Ciwedey	5	10				15
3	UPT Diklat Aparatur di Makassar				5	10	15
4	UPT Diklat Aparatur di Bali				5	10	15
5	UPT Diklat Aparatur di Surabaya	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	10	15	4	10	20	59

Kebutuhan SDM aparatur perhubungan untuk tenaga administrasi dari tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 90 Kebutuhan Sdm Aparatur Perhubungan Untuk Tenaga Administrasi

NO	SATKER/UPT	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	PPSDMAP Bogor	10	10	-	-	-	20
2	UPT Diklat Aparatur di Ciwedey	15	15	-	-	-	30
3	UPT Diklat Aparatur di Makassar	-	-	-	15	15	30
4	UPT Diklat Aparatur di Bali	-	-	-	15	15	30

NO	SATKER/UPT	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
5	UPT Diklat Aparatur di Surabaya	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	25	25		30	30	110

6. Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM BPSDMP

Sesuai dengan hasil analisa SWOT yang telah dilakukan, Strategi yang harus ditempuh adalah *Strategi Defensif* dengan salah satu yang harus dibenahi adalah mengoptimalkan recruitment, penempatan dan pengembangan Pegawai. Pengembangan pegawai dilaksanakan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui diklat-diklat.

Kelemahan personil secara nyata dapat dilihat dari komposisi tingkat pendidikan Aparatur Kementerian Perhubungan tahun 2013 yaitu dari total 100% (33.935 orang) SDM aparatur, hanya sekitar 17,9 % (6.064 orang) yang berpendidikan tingkat sarjana, dan 3,2 % (1.091orang) berpendidikan tingkat pascasarjana. Disamping kondisi rendahnya prosentasi tingkat pendidikan tersebut, permasalahan personil lainnya adalah rendahnya jumlah SDM Aparatur tingkat Sarjana yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang transportasi dan bidang pendukung transportasi lainnya.

Untuk itu diperlukan suatu program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM baik itu melalui pendidikan maupun pelatihan. Program ini diperuntukkan untuk SDM Aparatur Kementerian Perhubungan secara umum dan BPSDMP Perhubungan khususnya, adapun kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Rintisan Pendidikan Gelar.

Maksud dari Program Rintisan Pendidikan Gelar Pascasarjana adalah mengembangkan SDM Aparatur Kementerian Perhubungan untuk dapat meningkatkan kinerja Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan prima transportasi yang efektif dan efisien serta dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas layanan jasa transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian serta multimoda.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Aparatur Perhubungan sebagai faktor kunci dalam mendukung pencapaian transportasi yang meliputi pelayanan yang selamat, aman, tepat waktu, nyaman, mudah, mencukupi dan terjangkau yang dilakukan secara efektif dan efisien serta berorientasi *zero-accident* melalui peningkatan jenjang kemampuan akademik bidang transportasi dan bidang-bidang pendukung transportasi.
2. Mewujudkan lulusan pascasarjana magister S-2 dan doktor S-3 di bidang transportasi dan bidang pendukung transportasi yang memenuhi standar akademik melalui program reguler, *sandwich* maupun *double degree* di dalam dan diluar negeri;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang profesional dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *zero accident* dengan mengimplemantasikan ilmu yang telah diperoleh dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari;
4. Mewujudkan SDM yang memenuhi kualifikasi akademik dan keilmuan dalam rangka pemenuhan tenaga Pengajar/ Dosen di sekolah- sekolah Kementerian Perhubungan dan peneliti-peneliti perhubungan;
5. Mewujudkan peningkatan rasio jumlah SDM Aparatur yang berlatar belakang pendidikan pascasarjana S-2 dan S-3 di bidang transportasi dan bidang pendukung transportasi.

Sasaran dari Program Rintisan Pendidikan Gelar Pascasarjana Magister S2/Sp1 dan Doktor S3/Sp2 beasiswa BPSDMP adalah SDM Aparatur Kementerian Perhubungan yang telah berstatus PNS baik yang berasal dari unit Kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian dan Badan-badan. Untuk mewujudkan lulusan pascasarjana Magister S-2 dan Doktor S-3 di bidang transportasi dan bidang pendukung transportasi yang memenuhi standar akademik dilakukan melalui program reguler dalam negeri, *sandwich programme* maupun *double degree* luar negeri dengan melibatkan *Partner university* di Luar negeri.

Bidang Ilmu/ Rumpun Ilmu/ Program Studi/ Peminatan yang ditawarkan Program Rintisan Pendidikan Gelar Pascasarjana adalah sebagai berikut:

1. Transportasi : Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Logistik
2. Pendukung : Teknik Sipil dan Lingkungan, Teknik Mesin dan Dirgantara, Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Teknik Elektro dan Informatika, Teknik Industri, Hukum, dan Kesehatan Penerbangan.
3. Lain-lain : Bidang Ilmu/ Program Studi sesuai kebutuhan.

Jumlah peserta baru yang akan direkrut untuk program beasiswa “Rintisan Pendidikan Gelar’ Pascasarjana Magister S2/Sp1 dan Doktoral S3/ Sp2 disesuaikan dengan kebutuhan dari subsector dan anggaran yang ada.

Penyelenggaraan Program Rintisan Pendidikan Gelar Pascasarjana bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri Terkemuka di Indonesia yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Univeritas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Brawijaya (UB). Pemilihan Perguruan Tinggi Negeri Tersebut disesuaikan dengan kebutuhan ilmu yang dibutuhkan oleh sektor Perhubungan saat ini dan kedepan. Disamping disiplin ilmu yang telah dikerjasamakan saat ini, setiap tahun BPSDM Perhubungan membutuhkan masukan dari Subsektor dan Pendukung mengenai disiplin ilmu yang masih dibutuhkan.

Dalam rangka menyempurnakan sistem atau mekanisme pelaksanaan serta pengembangan Program Rintisan Pendidikan Pascasarjana Magister S2/Sp1 dan Doktoral S3/Sp2 dan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas peserta sesuai target yang ingin dicapai, Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan kegiatan koordinasi, pemantauan (monitoring) dan evaluasi.

- b. Peningkatan Kualitas Dosen BPSDM dan Aparatur Perhubungan
Maksud dari kegiatan “Peningkatan Kualitas Dosen Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Aparatur Perhubungan” yaitu mempersiapkan dan meningkatkan SDM Perhubungan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya di sektor transportasi.

Tujuan dari kegiatan “Peningkatan Kualitas Dosen Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Aparatur Perhubungan” adalah mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk dosen-dosen di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bermutu, kreatif dan proaktif untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di sektor perhubungan bagi kemajuan serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa perhubungan.

Sasaran dari kegiatan “Peningkatan Kualitas Dosen Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Aparatur Perhubungan” adalah SDM Aparatur Kementerian Perhubungan yang telah berstatus PNS baik yang berasal dari unit Kerja Sekretariat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, Inspektorat Jenderal dan Badan-badan.

Pelatihan ini dilakukan di dalam negeri dan atau dalam dan luar negeri dengan melibatkan institusi pendidikan dan pelatihan sebagai penyelenggara. Target kegiatan “Peningkatan Kualitas Dosen Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Aparatur Perhubungan” yaitu sekitar 80 sd 120 Orang setiap tahunnya”.

- c. Pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Bimbingan Teknis
- Bentuk lain dari peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Perhubungan adalah penyelenggaraan Pelatihan- pelatihan yang menunjang pelaksanaan tugas operasional sehari-hari serta pembekalan sebelum menjadi pegawai negeri. Hal ini dilakukan sejalan dengan tugas pokok Sekretariat BPSDM Perhubungan dalam memberikan bantuan Teknis dan Administratif. Sasaran dari pelatihan ini adalah SDM Aparatur Kementerian Perhubungan, khususnya SDM Aparatur BPSDM Perhubungan. Adapun Pelatihan yang telah dan akan dilaksanakan dalam periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Diklat Teknis Dalam Rangka Reformasi Birokrasi BPSDMP
 2. Pembinaan Jiwa Korsa
 3. Pembinaan Pelatihan Manajemen di Alam Terbuka

4. Pembinaan Mental Intelektual dan Rohani
5. Diklat Pembentukan Karakter dan Kesamaptaan Aparatur Kemenhub
6. Diklat Peningkatan Kualitas Leadership Manajerial
7. Diklat Peningkatan Kecerdasan Emosional, Intelektual, Spiritual
8. Diklat Pembina Taruna
9. Diklat Orientasi CPNS
10. Pembinaan Pola Pengasuhan Taruna
11. Pelatihan Keprotokolan
12. Pembinaan Dan Penyuluhan Arsip dan Dokumen Negara
13. Pembinaan Tata Persuratan dan Tata Naskah dilingkungan BPSDM Perhubungan
14. Kegiatan Tim Independen Pengawas Mutu Diklat Transportasi
15. Pelatihan dan Bimbingan Teknis lainnya.

2. Kerjasama dan Kemitraan

Kerjasama dan kemitraan merupakan kebutuhan organisasi modern saat ini baik di kalangan swasta maupun pemerintah, karena tidak ada satu pun organisasi yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri secara langsung karena hal itu tidak efektif dan efisien.

Prinsip kerjasama dan kemitraan adalah masing-masing pihak mendapatkan manfaat dan harus saling menguntungkan. Bentuk dari Kerjasama dan kemitraan dapat berupa MoU, MoA ataupun Perjanjian Kerjasama.

Kerjasama dan kemitraan yang telah dan akan tetap dilaksanakan oleh BPSDM Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Dalam Negeri Dan Luar Negeri: Kerja Sama Antar Instansi/ Pemerintah/ Lembaga dilaksanakan di instansi pendidikan dan instansi pemerintah.
2. Pengembangan Hubungan Kerja Sama Luar Negeri: dilaksanakan pada instansi pendidikan, instansi pemerintah, dan organisasi internasional di luar negeri. Perjanjian internasional misalnya dengan organisasi ICAO, IMO, institusi pendidikan luar negeri (STC, JAA-TO, KOTSA, BOEING, EASA, RMIT).

3. Peraturan Perundang-undangan di Bidang SDM Perhubungan

Undang-undang di sektor Perhubungan mengamanatkan bahwa Pemerintah (Kemenhub) bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional. Hal-hal yang terkait dengan pengembangan SDM Transportasi yang terdapat dalam undang-undang tersebut dan turunannya harus ditindak lanjuti dan menjadi pertimbangan teknis utama.

Lahirnya Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia serta sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Sektor Transportasi mengamanatkan bahwa Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia di bidang transportasi harus memiliki Kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis Kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan ;
2. Kompetensi (softskill & hardskill) diperoleh setelah mengikuti Diklat Transportasi;
3. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut Diklat Transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.

Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2012 ini adalah penetapan aturan-aturan pelaksanaan berupa peraturan-peraturan Menteri Perhubungan dan Keputusan Kepala BPSDM Perhubungan. Penetapan Peraturan sebagai turunan ini merupakan hal yang urgent untuk secara efektifnya peraturan pemerintah ini dapat dilaksanakan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam renstra 2015-2019 terkait dengan Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang SDM Perhubungan adalah antara lain:

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Ratifikasi konvensi internasional;
- 2) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan Bantuan Hukum dilaksanakan pada UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
- 3) Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama dilaksanakan dengan pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta kerja sama antara Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri
- 4) Sosialisasi/workshop Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penyelenggaraan sumber daya manusia di bidang transportasi.

4. Penataan Organisasi dan Kelembagaan

Pelaksanaan kegiatan ORTALA bertujuan untuk menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang hukum, organisasi dan tata laksana. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang hukum, organisasi dan tata laksana. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang hukum, organisasi dan tata laksana, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Organisasi/ kelembagaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang ada saat ini adalah organisasi/ kelembagaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Saat ini Badan Pengembangan SDM Perhubungan memiliki Sekretariat, 4 (empat) Pusat Pengembangan SDM Perhubungan dan 27 (dua puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas UPT sebagai penyelenggara Diklat masyarakat, dan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi pengelolaan keuangan, sampai dengan tahun 2017 telah memiliki 23 (dua puluh tiga) UPT menjadi Badan Layanan Umum. Kebijakan pencetakan UPT BLU akan dilanjutkan pada renstra 2015-2019 ini

dengan beberapa UPT akan menjadi UPT PK BLU yaitu: BP2 Pelayaran Minahasa Selatan, BP2 Pelayaran Padang Pariaman dan BP2 Pembangunan Karakter SDM Transportasi Bandung.

Berdasarkan kajian dan analisis kelembagaan, perlu perubahan ataupun penyempurnaan terhadap beberapa organisasi/ kelembagaan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan termasuk struktur organisasi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan yang ada, tetap berfokus pada penyelenggaraan diklat vokasi disamping penyelenggaraan diklat-diklat profesi. Perubahan ataupun penyempurnaan tersebut diantaranya adalah rencana perubahan bentuk kelembagaan beberapa unit pelaksana teknis (UPT) diklat menjadi Badan Layanan Umum (BLU), peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politkenik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan, penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.

5. Sarana dan Prasarana Diklat SDM Aparatur Perhubungan

Sarana dan Prasara di Sekretariat BPSDM Perhubungan diarahkan untuk memenuhi pelaksanaan tugas operasional Sekretariat dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada unit kerja di lingkungan BPSDM Perhubungan dan Unit kerja di luar BPSDM Perhubungan. Sarana dan prasarana dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Sarana dan prasarana dibagi menjadi:

- a. Peralatan Diklat;
- b. Buku-buku dan Bahan Cetakan;
- c. Layanan Perkantoran;
- d. Kendaraan Bermotor;
- e. Peraratan dan Fasilitas Perkantoran; dan
- f. Gedung dan Bangunan.

Adapun kegiatan-kegiatan terkait dengan sarana dan prasarana ini adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional Perkantoran

Kegiatan Operasional Kantor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada pimpinan, pemeliharaan gedung dan inventaris kantor serta perangkat-perangkat penunjang lainnya termasuk SDM (Satpam, Pramubakti, Cleaning Service, Pengemudi). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang baik, serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercipta suasana kerja yang dapat menunjang terciptanya kinerja yang maksimal.

b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

Kegiatan Pengadaan peralatan kantor merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kantor yang memadai. Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya fasilitas kantor yang memadai sehingga dapat tercipta kinerja pegawai yang maksimal.

c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Kegiatan Pengadaan Kendaraan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan membantu didalam mobilitas pekerjaan pada unit kerja itu sendiri. Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya mobilitas yang cepat didalam menunjang kegiatan operasional sehari-hari pada unit kerja bersangkutan.

d. Kegiatan Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan

Kegiatan Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan merupakan kegiatan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi atau pengetahuan mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transportasi ataupun SDM transportasi baik dilingkungan Kementerian Perhubungan dan juga perkembangan transportasi yang ada pada setiap belahan dunia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai kemajuan transportasi baik itu dalam negeri maupun luar negeri.

7. Sistem Informasi Manajemen Sdm Di Bidang Transportasi

1. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No.51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi diatur bahwa Menteri menyelenggarakan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di bidang transportasi.

2. Pengembangan SIM SDM di Bidang Transportasi

Sistem Informasi Manajemen SDM di Bidang Transportasi merupakan pendukung pengembangan SDM Transportasi disamping unsur utama pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan. Sistem informasi manajemen SDM di bidang Transportasi memuat:

1. SDM di bidang transportasi
2. Kompetensi di bidang transportasi
3. Lulusan tiap jalur, jenis & jenjang
4. Penyebaran, penyerapan/ penempatan lulusan diklat
5. Kesempatan kerja di bidang Transportasi
6. Lembaga diklat di bidang Transportasi
7. Tenaga kerja di bidang Transportasi

Sistem informasi manajemen SDM di bidang Transportasi juga harus mencakup perluasan kesempatan kerja yaitu:

1. Informasi Lapangan Kerja;
2. Pelaksanaan Kerjasama;
3. Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Sekretariat BPSDM Perhubungan telah memulai pembangunan dan pengembangan SIM SDM di bidang Transportasi ini pada periode Renstra sejak 2010-2014, dan pada renstra tahun 2015-2019 tetap dilaksanakan secara konsisten dengan kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan terukur yang dilaksanakan secara bertahap. Hal yang penting juga dalam SIM adalah pengelolaan Website. Pelaksanaan proses mengelola website yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan Manajemen pengelolaan (merencanakan, memuat isi,

menanggapi perkembangan isu-isu SDM Perhubungan terkini, serta mengontrol berita dan naskah-naskah yang akan dimuat) yang bertujuan untuk memperkenalkan, menginformasikan, mensosialisaikan, kepada masyarakat luas tentang kegiatan-kegiatan kegiatan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan seluruh Unit Pelaksana Teknisnya secara *on line* sehingga Regulator, Operator serta masyarakat dapat setiap waktu mengakses perkembangan terkini dari Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

D. Kegiatan Strategis Badan Pengembangan Sdm Perhubungan 2015-2019

Pada periode Renstra tahun 2010-2014, telah ditetapkan kegiatan-kegiatan strategis baik strategis sesuai dengan sifat kegiatannya ataupun strategis menurut biaya kegiatannya. Kegiatan-kegiatan strategis pada renstra 2010-2014 sebagian telah terlaksana dan sebagian belum terlaksana. Pada Renstra 2015-2019 ini ditetapkan, kegiatan-kegiatan yang tetap akan dilaksanakan ataupun yang tidak akan dilaksanakan lagi. Kegiatan Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan antara lain :

1. Pengadaan Pesawat Latih

Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai Organisasi yang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM Transportasi dalam upaya meningkatkan dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) perhubungan telah dituntut untuk mampu menciptakan sumber daya manusia Transportasi yang handal dalam perencanaan, implementasi operasional dan evaluasi transportasi untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap berjalannya sistem transportasi di Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Transportasi untuk seluruh matra Transportasi baik darat, laut, udara maupun perkeretaapian. Salah satu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menjadi prioritas Kementerian Perhubungan adalah penyediaan SDM transportasi udara terutama tenaga penerbang yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional dan internasional dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan dan pelatihan penerbang adalah suatu pelatihan yang memerlukan keterampilan khusus, ketersediaan lahan dan ketersediaan pesawat latih. Kemampuan Badan Pengembangan SDM Perhubungan

hingga tahun 2014 hanya mampu menghasilkan 60 – 80 lulusan penerbang per tahun dan angka tersebut jauh dibawah target angka yang diharapkan oleh pemerintah sebesar 400 orang lulusan penerbang pada setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan oleh rata-rata produksi jam terbang per bulan hanya 400 jam terbang yang disebabkan oleh kurangnya pesawat latih yang ada saat ini. Dari kondisi tersebut dalam rangka meningkatkan jumlah lulusan penerbang per tahun Badan Pengembangan SDM Perhubungan akan mengadakan tambahan pesawat latih sebanyak 51 pesawat latih yang terdiri dari pesawat sayap tetap single engine, multi engine dan pesawat sayap putar multi engine.

2. Pembangunan Kapal Latih (*Multi Purpose*)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menjamin bahwa bahwa pelaksanaan dan penilaian diklat kepelautan tetap memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh STCW Code Amandement 2010 dan setiap aktivitas diklat kepelautan harus didukung dengan sistem standar mutu Badan Pengembangan akan memandang perlu penyediaan kapal latih. Badan Pengembangan SDM Perhubungan akan melaksanakan kegiatan kapal latih dengan jenis Kapal Latih Multy purpose sebanyak 6 (Enam) unit, yang berfungsi sebagai sarana prakek untuk meningkatkan kompetensi terhadap peserta didikTaruna yang di didik pada diklat kepelautan baik dilingkungan Badan pengembangan SDM perhubungan maupun diklat kepelautan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kapal Latih Muti Guna (*Multi Purpose*) ini juga direncanakan akan digunakan sebagai kapal perintis yang dibangun dalam rangka mendukung program kebijakan Presiden Republik Indonesia mengenai Konsep Tol Laut dan dapat digunakan untuk mengangkut penumpang serta sebagai sarana praktek laut bagi peserta diklat kepelautan. Proses pengadaan kapal latih dilakukan dengan metoda pengadaan *Multiyears contract* (MYC) selama 3 (tiga) tahun untuk mempercepat proses pengadaan serta penyelesaian kapal latih. Adapun spesifikasi dari kapal latih yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

3. Pembangunan dan Pengembangan Kampus Baru.

Kegiatan pengembangan dan pembangunan kampus ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah lulusan SDM Transportasi serta mewujudkan pemerataan sarana dan prasaran diklat SDM Transportasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini adalah pembangunan unit kerja baru atau pengembangan kampus yang

meliputi pembangunan prasarana maupun pengadaan sarana diklat. Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Pengembangan SDM sesuai dengan matryanya masing-masing dengan output kegiatan yaitu Lahan, Bangunan Diklat Perhubungan, Jaringan, Peralatan Diklat Perhubungan. Adapun rencana pengembangan dan pembangunan kampus baru Badan Pengembangan SDM Perhubungan dalam periode renstra 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

LOKASI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUS BARU



Gambar 4. 3 Rencana Pengembangan dan Pembangunan Kampus Baru BPSDMP Tahun 2015 – 2019

BAB V PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tahun 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis BPSDM Perhubungan tahun 2015-2019 disusun untuk mengetahui tingkat capaian kinerja melalui realisasi program pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target/ sasaran Indikator Kinerja Utama BPSDM Perhubungan tahun 2015-2019 yang meliputi realisasi program pembangunan SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Aparatur Perhubungan serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.

Hasil analisis capaian ini akan digunakan dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan dalam rangka menentukan arah pengembangan SDM Perhubungan.

Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2015-2019 mencakup Pengembangan SDM Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Laut, Udara, Aparatur serta dukungan manajemen dan Teknis Lainnya yang meliputi:

1. Landasan Hukum;
2. Kebutuhan SDM Perhubungan;
3. Sasaran/ Target Produksi dan Penyerapan Lulusan;
4. Kelembagaan;
5. Kurikulum Silabi dan Modul;
6. Sarana dan Prasarana;
7. Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Dalam rangka menjaga efektifitas, konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra BPSDM Perhubungan 2015-2019, Sekretariat BPSDM Perhubungan akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaannya kedepan dan juga diharapkan Renstra masing-masing unit kerja di lingkungan BPSDM Perhubungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra BPSDM Perhubungan dalam mewujudkan visi ***“Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ”***.